



• iNOVASI • UNTUK • NEGERI •
info indonesia

••• EDISI # 66 APRIL 2026

<https://www.infoindonesia.id>

**PERCAYALAH
DENGAN
PRABOWO**

••• RUSUN PANIKI
DITARGETKAN
SELESAI 2027

••• MENANTIKAN DONGENG
RESHUFFLE KABINET
MERAH PUTIH

••• SUMSEL 2028
MEMBUKA GERBANG
EKONOMI GLOBAL



info indonesia

www.infoindonesia.id

INOVASI UNTUK NEGERI

Network



INFO PASANG
NUR AISAH
+ 62 815-1157-6312
IKLAN



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat

Koran Cetak Info Indonesia



www.infoindonesia.id
facebook @infoindonesia.id twitter @_infoindonesia
Instagram @info_indonesia.id YouTube : infoindonesiatv

JAKARTA
JL. Raya Kalibata No. 8
Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781
Email : redaksi@infoindonesia.id



PEMIMPIN UMUM :

Usman Rizal

PEMIMPIN PERUSAHAAN

Nur Aisah

PEMIMPIN REDAKSI

Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Rahmad Romli

Redaktur Pelaksana

Irmayani

REDAKTUR

Nina Erlina, Ega Tri Gustina,
Nur Khamida, Sukma Mawarni

REPORTER

Ari Irgan, Siti Nieke, Agung Prasetya,
Rizwan Suandi, Hari Priyadi,
Putri Aridhani

DESAIN MEDSOS

Al Amin, M. Fikri, Adam Aulia.

TATA LETAK

Sujatmiko

KEUANGAN

Atika

SEKRETARIS REDAKSI

Nur Aisah

PENGEMBANGAN BISNIS

Ega Tri Gustina, Ellisa Mawarni

DISTRIBUSI

Abdul Muchtar

BANK ACCOUNT

a/n PT. WAHANA MULTIMEDIA, BCA
No. Rek 553-041-4321,
KCP Otista Jakarta Timur

DAMPAK

Kian berkembang kecerdasan buatan (artificial intelligence, AI), semakin meningkat pula informasi palsu yang menyebar begitu saja bagaikan virus di udara terbuka. Dari perkembangan ini kita mengenal AI generative, bermakna fungsi menciptakan konten baru --bukan sekadar menganalisis data-- termasuk informasi palsu hasil rekayasa atau modifikasi yang viral di berbagai platform media sosial, dengan begitu banyak saluran dan aneka aplikasi.

Satu hal lagi, di Indonesia mungkin ada yang menganggap sinis saat memadankan AI sebagai akal imitasi. Imitasi, tiruan, dekat belaka dengan kepalsuan.

Banyak contoh dapat kita kemukakan. Yang seiring dengan perkembangan terakhir di tingkat global misalnya adalah dampak perang Iran menghadapi Amerika Serikat dan Israel, antara lain munculnya narasi audio visual palsu mengenai pengunduran diri anchor Stasiun Televisi Al Jazeera saat siaran langsung, yang diklaim sebagai bentuk protes atau kegagalan dalam menyampaikan berita terkait peran geopolitik Iran.

Di dalam negeri, mulai April 2026 kita memulai delapan langkah transformasi budaya kerja nasional untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Diakui atau tidak, transformasi, perubahan menuju format yang lebih baik ini, juga merupakan upaya penyesuaian terhadap dampak perang di Timur Tengah dengan kendala pasok energi jalur laut di Selat Hormuz. Salah satu penerapan transformasi ini adalah penyelenggaraan negara berbasis teknologi digital.

Namun, tantangan AI generatif juga mengiringi penerapan transformasi yang mengandalkan teknologi digital. Contoh kecil saja, apa yang terjadi dengan laporan masalah parkir liar di Jalan Damai, Kelurahan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur melalui aplikasi JAKI (Jakarta Kini). Foto materi laporan memperlihatkan sejumlah mobil parkir di tepi jalan, tampak pula seorang petugas berbaju oranye berdiri di lokasi. Toh tindak lanjut laporan memperlihatkan deretan mobil parkir sudah tidak ada, sudut pandang foto tidak ada perubahan, namun tampilan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) sedikit berbeda. Karena hal itu, pengunggah foto melaporkan foto AI untuk merespons keluhan warga. Bahkan Gubernur Pramono Anung pun turun tangan mengoreksi soal ini

Pada akhirnya, di tengah kepekaan teknologi AI generatif yang berpotensi manipulatif, tantangan terbesar kita bukan hanya tentang kecanggihan alat, melainkan pula menjaga integritas kemanusiaan. Memperkuat kejujuran dalam setiap interaksi dan informasi adalah cara agar perkembangan teknologi membawa kemajuan, bukan kepalsuan yang justru merusak. ●

ALAMAT REDAKSI/IKLAN/PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,

Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

● TELP 021-791 96781 ● FAX 021-791 96786

Email : redaksi21pro@gmail.com

Instagram : info_indonesia.id

Tiktok : infoindonesia.tv

Facebook : infoindonesia. id

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH
PT Wahana Multimedia
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH
PT Dua Satu Pro

DAFTAR ISI

EDISI BULAN APRIL 2026



6



38



14



50

6

INFO UTAMA

Presiden Prabowo Subianto menanggapi gagasan pemakzulan dari jabatan Presiden. Toh ia menegaskan berhasil menavigasi perjalanan bangsa di periode berbahaya.

38

INFO PRIORITAS SUMSEL

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin.

14

INFO KEMENTERIAN

Kementerian Koperasi (Kemkop) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang pemberdayaan ekonomi umat melalui koperasi. Penandatanganan ini menandai langkah strategis yang akan dilakukan keduanya untuk memperkuat peran koperasi.

50

INFO SUMUT

Transformasi birokrasi tak lagi sekadar soal absensi, tetapi juga efisiensi energi, disiplin mobilitas, dan pelayanan publik yang tetap prima.



80

INFO EKONOMI

Pernyataan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengenai potensi terjadinya "chaos" nasional pada Juli–Agustus 2026 terus memantik perhatian publik.



84

INFO NASIONAL

Saat gejolak biaya penerbangan global dan meningkatnya kewaspadaan terhadap praktik haji ilegal, pemerintah Indonesia resmi membuka rangkaian penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi mulai 21 April 2026, ditandai dengan masuknya jemaah ke asrama haji di seluruh embarkasi nasional.



94

INFO KHUSUS

Jelang melewati perjalanan 1,5 tahun (18 bulan) pada 20 April 2026, wacana perombakan (reshuffle) kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka muncul kembali. Rumor tahunan atau semesteran?

3 DARI REDAKSI

36 OPINI

66 INFO KOLAH RAGA

68 INFO KESEHATAN

72 INFO WISATA

76 INFO HUKUM

90 INFO ISTANA



20

INFO KEMENPAR

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kembali memperkuat eksistensi brand Wonderful Indonesia di pasar Asia Timur dengan berpartisipasi dalam ajang Macao International Travel (Industry) Expo (MITE) 2026.

LEBIH PERCAYA KEPADA PRABOWO

Presiden Prabowo Subianto menanggapi gagasan pemakzulan dari jabatan Presiden. Toh ia menegaskan berhasil menavigasi perjalanan bangsa di periode berbahaya.

Sebenarnya konteks acara itu halalbihalal. Namun, ada judul "Sebelum Pengamat Diterbitkan". Lebih dari itu, muncul gagasan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto dari jabatannya.

Yang jalan hanya ini: Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Hanya itu. Kalau nasehati Prabowo nggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini," ungkap Profesor Saiful Mujani, guru besar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang juga pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Boleh jadi ungkapan itu adalah ajakan untuk berdiskusi, karena yang hadir dan berbicara di acara yang berlangsung di Beranda Utan Kayu, Jakarta Timur pada Selasa, 31 Maret 2026 itu adalah para tokoh, pengamat, aktivis, dan intelektual lintas disiplin ilmu seperti Dipo Satria Ramli, Feri Amsari, Islah Bahrawi, Ray Rangkuti, Sukidi, dan Ubedillah Badrun. Nah, di sesi akhir acara, Saiful Mujani bagaikan menyimpulkan apa yang dapat dilakukan sesuai diskusi.

Dari sudut pandang ilmu politik dan politik praktis, gagasan Mujani dikenal sebagai people power, partisipasi langsung publik sebagai alat koreksi terha-

dap institusi formal dalam hal ini negara. Sebagaimana dikemukakan Mujani, "Yang hanya kita yang bisa, rakyat gitu lho; 1998 juga tidak akan terjadi kalau Ray dan teman-teman nggak turun. Nggak akan itu MPR akan menurunkan Soeharto, nggak akan. Iya, itu dia dan itu tekanan. Itu tekanan, bukan undang-

undang itu. Itu tekanan, itu demo yang besar seperti di Amerika itu gitu lho. Jadi menurut saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impeachment seperti itu. Itu tidak akan jalan," ungkapnya.

Toh gagasan mengenai people power tetap perlu memenuhi syarat dan



kondisi yang dapat dipelajari dari pengalaman berbagai negara, bukan hanya Indonesia. Syarat dan kondisi itulah yang agaknya belum memadai. Malah gagasan Mujani menuai kontroversi termasuk tuduhan mengarah ke makar.

Mujani pun sudah menanggapi soal isu makar ini. "Kalau sikap politik dalam bentuk pernyataan verbal dan berkumpul yang dilindungi konstitusi dianggap makar, berarti makar dijamin oleh UUD," kata dia.

Lepas dari itu, Presiden Prabowo Subianto sendiri menanggapi gagasan menjatuhkannya dari kursi Presiden saat menyampaikan taklimat (arahan) dalam rapat kerja Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 8 April 2026. Menurut Prabowo, Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi dengan meletakkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat sehingga rakyat memiliki mekanisme evaluasi terhadap pemerintah; termasuk prosedur penggulingan presiden terpilih.

"Tidak ada masalah. Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu. Ada mekanismenya. Lakukan dengan baik, dengan damai," kata Prabowo, "Bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah."

Prabowo menambahkan, masyarakat bisa melakukan impeachment dengan mengikuti mekanisme yang tersedia. Prosesnya harus melalui DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi. Prabowo juga mengemukakan, Indonesia telah memiliki sejarah pergantian pemimpin yang baik.

Menurut dia, proses penurunan Presiden ke-1 Soekarno, Presiden ke-2 Soeharto, dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dengan damai atau melalui proses yang diatur. "Tidak melalui kekerasan," ujar Prabowo.

"Jadi, saudara-saudara percayalah kepada sistem yang dibangun pendiri-pendiri bangsa," kata Prabowo.

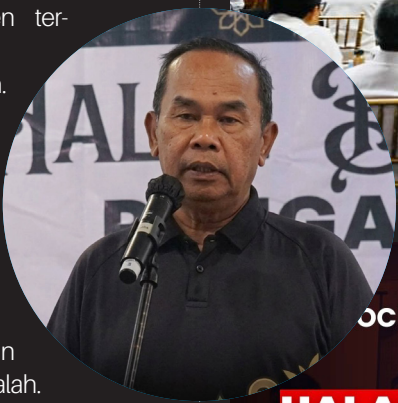
Menurut dia, masyarakat harus banyak belajar sejarah agar sadar sejak era

kolonial Indonesia kerap harus melawan bangsanya sendiri. Hal ini terjadi karena sejumlah kelompok masyarakat kerap terjebak pada politik adu domba atau *divide et impera* yang menggerogoti kekuatan bangsa. "Itu bukan hal baru. Itu ada di buku-buku sejarah," ujar Prabowo.

Mengenai kinerja pemerintahan dalam penyelenggaraan negara, Prabowo mengemukakan, dalam satu setengah tahun masa pemerintahannya, kinerja

dai oleh berbagai prestasi nyata yang dapat diukur secara matematis maupun terlihat secara fisik di lapangan. Hal tersebut, ucapnya, menunjukkan arah penyelenggaraan negara dapat dikendalikan dengan baik.

Kepala Negara juga menyampaikan bahwa dalam periode tersebut pemerintah juga menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian, termasuk konflik dan peperangan di berbagai wilayah yang memicu guncangan terhadap



OCIOCORNER

**HALAL BIHALAL
PENGAMAT
"SEBELUM
PENGAMAT
DITERTIBKAN"**



pemerintahan berjalan efektif, handal, serta mampu melaksanakan tugas bernegara dengan baik dan benar.

"Satu setengah tahun ini alhamdulillah kita telah membuktikan bahwa pemerintah kita efektif, pemerintah kita dapat melaksanakan tugas bernegara dengan benar dan baik," ujarnya.

Menurut dia, capaian tersebut ditan-

stabilitas dunia. Toh menurut Prabowo pemerintah mampu menavigasi berbagai tantangan dan potensi risiko yang muncul, serta menjaga arah perkembangan bangsa tetap terkendali.

"Alhamdulillah kita dapat mengendalikan arah perkembangan, arah bernegara bangsa kita. Kita dapat navigasi melalui hal-hal berbahaya," tandas Prabowo. ●

GAGASAN PEMAKZULAN HINGGA UPAYA MAKAR

Halalbihalal di Beranda Utan Kayu terus berkembang menjadi wacana pemakzulan hingga makar. Tapi, untuk apa menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan?

Seiring dengan rekaman video acara halalbihalal di Beranda Utan Kayu yang dapat diakses melalui platform di jaringan internet, beredar pula analisis media sosial yang berisi analisis mengenai potensi kekuatan politik domestik maupun pengaruh kekuatan eksternal yang dapat mengarah ke pemakzulan (impeachment) hingga upaya makar.

Melalui akun Youtube pribadinya,

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD, misalnya, mengemukakan pernyataan Saiful Mujani terkait menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dikategorikan sebagai makar.

"Istilah makar itu sebenarnya diatur di dalam satu pasal saja, Pasal 193, dua ayat, yang pertama itu yang dimaksud makar itu, makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Jadi bermaksud menggulingkan," kata Mahfud di akun YouTube resminya, Selasa, 7 April 2026.

Mahfud yang juga pakar hukum tata negara mengemukakan KUHP menjelaskan yang dimaksud dengan menggulingkan pemerintah adalah meniadakan atau mengubah susunan pemerintah dengan cara yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pernyataan Saiful Mujani, sambungnya, tidak bisa disebut masuk dalam kategori makar jika tidak diikuti tindakan.

"Nah orang berpidato itu kapan meniadakan, dan kapan langkah-langkahnya, apa yang diubah?" kata Mahfud.

Jadi, kata Mahfud, pernyataan Saiful Mujani tidak ada sama sekali unsur yang ada di dalam Pasal 193 KUHP baru, yaitu mengganti dan meniadakan susunan pemerintah. "Ingat lho di situ dikatakan susunan pemerintah. Yang dikatakan susunan pemerintah itu apa? Strukturnya apa pejabatnya? Kan tidak jelas juga kok langsung makar itu keliru, keliru, terlalu emosional," imbuh dia.

Toh Mahfud mengaku tidak sepakat dengan upaya menjatuhkan pemerintah di tengah masa jabatan karena akan kembali menimbulkan masalah. Ia malah menyarankan pemerintah menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja ke depan.

"Tapi ini kritik lah bahwa itu bukan makar. Jalan keluarnya apa? Kalau bagi pemerintah perbaiki dong. Kan masih ada tiga setengah tahun lagi kan untuk memperbaiki. Ini baru satu tahun de-



lapan bulan itu sudah banyak masalah seperti ini. Kritik-kritik itu harus ditampung,” katanya.

Tak urung, ada yang melaporkan Saiful Mujani ke Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya dan Sekitarnya (Polda Metro Jaya) meskipun tanpa menyertakan dugaan makar. Pelapornya tercatat atas nama Robina Akbar dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur.

“Pelaporan terdaftar pada Rabu, 8 April 2026 sekitar pukul 21.30 WIB,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Kamis, 9 April 2026. Menurut Kombes Budi, materi pelaporan terhadap Mujani adalah dugaan pelanggaran Pasal 246 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) mengenai tindak pidana penghasutan untuk melawan penguasa umum.

Dalam perkembangan lain, Ketua Umum Presidium Kebangsaan 08 H Kurniawan juga berencana melaporkan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi ke Bareskrim Polri terkait dugaan ajakan untuk menggulingkan pemerintah. “Insya Allah, hari Jumat (10 April 2026) besok, saya bersama tim hukum kami akan mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk membuat laporan resmi terhadap percobaan menggulingkan kekuasaan seorang Prabowo Subianto,” kata Kurniawan di Jakarta, Rabu, 8 April 2026

Menurut dia, pelaporan terhadap Mujani dan Islah Bahrawi karena dianggap paling vokal menyuarakan ajakan untuk menggulingkan pemerintah. “Saudara Saiful Mujani dan Islah Bahrawi, ya, karena mereka inilah yang paling getol menyuarakan, mengajak, menghasut dan menyebarkan kebencian, mengajak banyak orang untuk turun ke jalan menggulingkan pemerintahan sah,” ujar Kurniawan.

Dia pun mengaku telah berupaya membuka komunikasi dengan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi untuk menarik pernyataan mereka dan menyampaikan permintaan maaf, namun tidak mendapatkan tanggapan. Karena tidak mendapatkan tanggapan, Kurniawan dan relawan yang tergabung dalam DPP Rampas, Setia 08, Garda Raya 08, Garuda Astacita Nusantara, dan Garuda Emas, memilih untuk menempuh jalur hukum.

Sedangkan Mujani menilai pelaporan itu sah, namun tak tepat dibawa ke ran-

ah negara. Menurut dia, sikap dan opini sebaiknya ditanggapi secara terbuka. “Kecuali saya sudah mencederai orang lain secara fisik atau menghilangkan kebebasan dan hak orang lain. Bantah saja, kritik dilawan kritik. Tapi tidak apa-apa jika ingin menunjukkan secara lebih jelas bahwa negara ini sudah makin fasis,” ungkapnya.

Di tengah wacana pemakzulan hingga makar, pengamat politik Denny JA yang juga pendiri Lembaga Survei Indonesia, mengemukakan tetap optimistik

yang dianggap bergeser dari sikap bebas-aktif. “Walau sudah dijelaskan, menjadi anggota BOP adalah ikhtiar agar Indonesia punya engagement dan akses lebih untuk perjuangan Palestina merdeka, tapi tetap berkembang persepsi yang berbeda,” ungkap Denny.

Faktor ketiga, Presiden dianggap terisolasi dari realitas. “Ambil contoh program MBG. Gagasan program ini mencerahkan. Di atas kertas, eksekusi program ini terlihat berjalan baik. Angka tersaji. Target tercapai. Laporan men-



terhadap pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, dinamika politik belakangan ini termasuk wacana pemakzulan Presiden adalah percikan kegelisahan terkait pula dengan kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja.

Denny melihat tindak kekerasan seperti penyiraman air keras dan kekawatiran terhadap tindakan represi merupakan faktor pertama sumber percikan kegelisahan. Kedua, politik luar negeri

unjuklan distribusi lancar, manfaat dirasakan masyarakat. Namun di lapangan, cerita yang beredar berbeda,” ujarnya.

Lantas, mengapa Denny tetap optimistik terhadap Prabowo Subianto? “Prabowo sudah memiliki energi, keberanian, dan dorongan sejarah untuk meninggalkan jejak besar. Yang ia butuhkan sekarang adalah sistem yang memastikan bahwa setiap langkahnya tidak hanya besar, tetapi juga tepat,” ujarnya. ●



KRITIK DAN KERJA SAMA MENYELENGGARAKAN NEGARA

Menyelenggarakan negara dan membangun bangsa memang bukan urusan mudah. Perlu kerja sama para pemangku kepentingan sekaligus menghadapi kritikan.

Soal kerja sama dan kritik terhadap penyelenggaraan negara menjadi bagian tak terpisahkan dari taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Kerja dengan jajaran pemerintah. Di acara itu, Presiden Prabowo Subianto mengemukakan antara lain kelompok masyarakat yang tidak mau diajak bekerja sama dalam pembangunan bangsa.

Dalam taklimatnya, Prabowo mengemukakan telah mempelajari laporan-laporan dari para menteri dan jajarannya yang menunjukkan kondisi nasional saat ini masih relatif aman dan stabil. Termasuk di dalamnya memperhitungkan situasi geopolitik di Timur Tengah yang genting sejak akhir Februari 2026.

"Saya telah mempelajari data-data angka dan dalam kesempatan ini adalah kesempatan yang baik, setelah saya mempelajari angka-angka dan dapat laporan dari menteri-menteri saya ternyata kondisi kita cukup aman," kata Prabowo saat memberikan pengarahan dalam rapat kerja di Istana Merdeka Ja-

karta, Rabu, 8 April 2026..

Prabowo pun lantas menyinggung munculnya kritik dari kelompok-kelompok tertentu terhadap pemerintahannya. "Ada suatu fenomena yang kita rasakan bersama, bahwa ada kelompok di masyarakat, saudara-saudara kita juga, warga negara kita juga, keluarga besar NKRI juga yang mempunyai suatu sikap yang bisa dikatakan sangat tidak mau kerja sama," ujarnya.

Toh Prabowo menambahkan, tetap menghormati sikap itu. "Kita hormati, kita tidak ada masalah," sambungnya.

Prabowo juga membandingkan sikap itu dengan pembangunan jembatan di desa. Ada sebagian rakyat yang setuju. Namun di sisi lain, ada kelompok masyarakat lainnya mengkritik pembangunan jembatan.

"Saya katakan, kalau di suatu tempat di suatu desa, rakyat desa melihat ada kebutuhan bangun jembatan, kemudian sebagian besar daerah itu memutuskan bangun jembatan dan gotong royong bangun jembatan, tapi ada sekelompok

yang tidak mau ikut bangun jembatan. Ya tidak ada masalah," tuturnya.

Meski begitu, Prabowo mempertanyakan kelompok yang tak mau ikut membantu membangun jembatan, namun kerap mengkritiknya. Menurut dia, yang begini dapat menghambat pembangunan jembatan di desa.

"Boleh kritik boleh, hanya saya juga enggak ngerti kalau orang mau bangun jembatan, dia tidak mau ikut bangun jembatan, tapi dia kritik. 'Kamu goblok kamu, kayunya salah, jangan di situ. Pakunya salah, harusnya di sini. Rantainya salah'. Salah aja, tapi enggak jadi-jadi itu jembatan," jelas Prabowo.

Meski menghadapi berbagai kritik, Prabowo memastikan pemerintah terus membangun jembatan karena permintaan dan kebutuhan rakyat. Dia mengatakan fenomena tersebut juga terjadi di beberapa negara.

"Ya kita yang mau bangun jembatan. Apa sikap kita, apa kita grogi, tapi ini rakyat desa minta bangun jembatan, saya bangun jembatan untuk rakyat kita. Ini fenomena, tapi ini ada di banyak negara," tandas Prabowo.

Menanggapi taklimat Prabowo itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mempertanyakan mengapa Prabowo seperti masih merasa kekurangan pihak yang mau diajak bekerja sama. "Selama ini Pak Prabowo bangga terpilih dengan lebih dari 50 persen suara dukungan. Didukung oleh hampir semua parpol di kabinet; di jajaran eselon 1 birokrasi terkonsolidasi bahkan sampai komisaris di berbagai BUMN adalah para pendukung Pak Prabowo. Banyak orang yg mau bekerja sama, lantas apa kurangnya?" kata Andreas Kamis, 9 April 2026.

Mengenai pihak yang suka mengkritik pemerintah, Andreas menganggapnya sebagai hal wajar. "Kalau ada yang mengkritik tentu hal yang sangat lumrah di negara demokrasi. Mengapa Pak Prabowo khawatir kalau ada yang mengkritik? Saya kira hal yang sangat wajar dalam dinamika hidup bernegara," sambungnya.

Andreas pun berharap Prabowo memandang kritik sebagai pemacu dalam melakukan pembangunan. Justru, sambungnya, Prabowo seharusnya khawatir dengan pihak yang suka memuji dan

menyampaikan hal positif yang tidak sesuai realitas.

"Sebaiknya jadikanlah kritik-kritik sebagai pemicu dan akselerasi pembangunan. Sebagai orang yang berkuasa, menurut saya, Pak Prabowo seharusnya lebih khawatir terhadap orang-orang yang hanya memuji dan menyampaikan informasi yang baik-baik saja, yang tidak sesuai dengan situasi riil di lapangan," ungkap Andreas.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay memandang pernyataan Presiden Prabowo soal kerja sama dan kritik dari sisi positif. "Kita ambil positifnya. Saya melihat Prabowo ingin mengajak semua pihak untuk terlibat dan berpartisipasi. Karena itu, Prabowo ingin agar mereka yang mengkritik juga ikut membantu. Apa pun bidang dan keahliannya, semua diajak," kata Saleh, Kamis, 9 April 2026.

Menurut dia, Prabowo menyadari bahwa membangun Indonesia tidak mudah. Banyak sektor, kata dia, yang perlu dikerjakan bersama pihak lain. "Prabowo sadar betul bahwa memban-

gun Indonesia tidak mudah. Ada banyak hal yang bisa dia sentuh dan kerjakan, tetapi banyak juga yang harus membutuhkan kerja sama dengan pihak lain. Pada titik inilah Prabowo berharap semuanya ikut," ucap Saleh yang juga menjabat Ketua Komisi VII DPR.

Selanjutnya Saleh menyebut Prabowo juga tidak antikritik. Namun, Prabowo, lanjut dia, mau pengkritik itu juga ikut membantu membangun bangsa. "Soal kritik, saya kira itu biasa ya. Prabowo itu orang lama di militer dan politik. Kritik, saran, dan masukan itu sudah pasti langganan. Sampai sekarang, itu juga masih ada. Nah, Prabowo mau-nya semua yang mengkritik juga ikut berbuat dan bekerja sama," ujarnya.

la pun berharap situasi dan kondisi dijaga agar tetap teduh dan tidak gaduh. Kalau ada kritik dan masukan, kata dia, bisa disampaikan melalui jalur yang benar. "Ada banyak jalur yang bisa dilalui. Selain lewat KSP, bisa juga melalui seluruh kementerian yang ada. Jika ada yang berurusan dengan hukum, bisa disampaikan ke aparat penegak hukum," ungkapnya. ●



JK TERSERET KONTROVERSI IJAZAH JOKOWI

Urusan ijazah mantan Presiden Joko Widodo masih bergulir dan melebar. Hingga salah satu bekas wakilnya, HM Jusuf Kalla, ikut sibuk dan berada dalam koridor proses hukum.

Awalnya adalah rangkaian pernyataan tajam ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar di jagat digital. Rismon menuding Jusuf Kalla (JK) sebagai penyokong dana di balik gerakan yang meragukan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Tudingan terhadap JK muncul melalui narasi dalam video yang beredar di platform media sosial, khususnya YouTube. Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI itupun sudah membantah tudingannya bahwa dirinya mendanai Roy Suryo dan pihak-pihak terkait untuk mempersoalkan keaslian ijazah Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

Berdasarkan beberapa informasi yang tersebar di platform digital, JK menyatakan dirinya dituding memberi pendanaan sebesar Rp5 miliar untuk hal tersebut dan memastikan informasi itu tidak benar. "Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar," kata JK di kediamannya, Jakarta, Minggu, 5 April 2025.

JK pun menegaskan tidak pernah

terlibat dalam polemik isu ijazah Jokowi. Baik terlibat dengan Roy Suryo maupun Rismon Sianipar.

Lebih dari itu, JK melaporkan Rismon ke Bareskrim Polri lantaran merasa dirugikan atas tudingannya mendanai pelaporan soal keaslian ijazah Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. "Saya melaporkan saudara Rismon Sianipar atas perbuatannya yang saya anggap itu merugikan saya karena mengatakan saya ini mendanai Roy Suryo dan kawan-kawan untuk soal ijazah Pak Jokowi," ungkapnya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu, 8 April 2025.

Ia menegaskan tidak pernah melakukan tindakan tersebut dan menilai tuduhan itu merupakan suatu penghinaan bagi dirinya. "Bagi saya ini suatu penghinaan karena sangat tidak etis bagi saya, Pak Jokowi itu Presiden, yang saya wakilnya. Kita sama-sama di pemerintahan, bersama-sama selama lima tahun. Masa saya bayar orang Rp 5 miliar untuk menyelidiki beliau? Itu tidak pantas dan tidak mungkin saya lakukan," katanya.



Masih di Bareskrim, JK menyatakan polemik kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah meresahkan masyarakat dan merugikan banyak pihak termasuk dirinya. "Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua, puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini, waktu saya hilang, dilibatkan," ujarnya

JK mengingatkan debat kusir yang terus muncul di media massa soal ini hanya akan terus memicu polarisasi di masyarakat. "Waktu kita habis, biaya ongkosnya mahal, dan terjadi perpecahan di masyarakat. Pro kontra kan perpecahan, mati-matian di TV. Itu sifat nasional kita terganggu dengan cara itu," katanya.

Rupanya langkah hukum JK mendapat tanggapan dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Jokowi mengemukakan pelaporan oleh JK terhadap Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri merupakan hal bagus.

"Ya bagus diserahkan ke proses hukum itu hal yang bagus. Bagus," ujarnya saat ditemui awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 10 April 2026

Toh Jokowi enggan berkomentar mengenai pernyataan Rismon yang menyebut JK sebagai salah satu tokoh yang mendanai polemik ijazah palsu hingga bergulir sampai saat ini. Hingga akhirnya berujung pada pelaporan ke Bareskrim Polri. "Saya tidak ingin berspekulasi, serahkan semuanya pada proses hukum yang ada," kata dia.

Jokowi pun enggan berkomentar saat ditanya apakah nama-nama yang disebut Rismon apakah ada tokoh besar yang sempat ia ungkapkan. Ia menegaskan lebih memilih untuk menunggu proses hukum selesai dan mengungkapkan kebenaran.

"Saya enggak mau berspekulasi mengenai nama karena itu perlu bukti-bukti, fakta-fakta hukum. Jadi ini juga sama. Serahkan semuanya pada proses hukum yang ada. Makanya harapannya kasus ini segera naik ke pengadilan, pengen saya seperti itu. Segera diserahkan (ke kejaksaan), segera P21 dan diserahkan ke pengadilan untuk nanti kita

bisa menunjukkan mana yang benar, mana yang enggak benar," ujarnya.

Sebelumnya, Rismon melalui kuasa hukumnya membantah keras tuduhan yang menyebut dirinya telah menuding Jusuf Kalla (JK) sebagai penyokong dana atau 'bohir' dalam pusaran kasus ijazah palsu Joko Widodo. Pihak Rismon mengklaim bahwa bukti video yang menyeret namanya adalah produk manipulasi teknologi.

Kuasa hukum Rismon, Jahmada Girsang, menegaskan bahwa kliennya

dirinya sebagai mantan wakil presiden. "Dia hanya mengatakan itu bukan dia yang melakukan, tapi tidak membantah isinya. Tidak membantah," ujar JK kepada wartawan di Bareskrim Polri.

Menurut JK, Rismon hanya membantah keterlibatannya dalam pembuatan video, namun sama sekali tidak membantah narasi yang menyebut dirinya memberikan dana Rp5 miliar kepada Roy Suryo dan tim terkait polemik ijazah Jokowi. "Tidak membantah, hanya membantah bukan dia yang bikin. Bisa



tidak pernah melontarkan pernyataan tersebut. Menurut dia, potongan video yang beredar luas di media sosial merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). "Itu olahan AI semua ya, Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK," ujar Jahmada kepada wartawan, Minggu, 5 April 2026.

Sedangkan JK menilai bantahan Rismon tersebut tidak cukup untuk membantah substansi tuduhan yang dinilainya sangat merugikan martabat

saja dia minta orang lakukan," ungkap JK.

Ia menegaskan bahwa Rismon tidak secara gamblang membantah tuduhan pemberian dana Rp5 miliar yang dinilainya sebagai bentuk penghinaan berat terhadap martabatnya. "Kalau dia membantah bahwa itu tidak benar, bahwa Pak JK kasih Rp5 miliar, kasih uang, mungkin ada manfaatnya. Tapi kalau mengatakan itu AI, itu tidak ada artinya untuk saya," tandas JK. ●



GANDENG MUI UNTUK WUJUDKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang pemberdayaan ekonomi umat melalui koperasi. Penandatanganan ini menandai langkah strategis yang akan dilakukan keduanya untuk memperkuat peran koperasi sebagai instrumen utama pembangunan ekonomi berbasis umat.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar formalitas, melainkan pintu menuju kolaborasi intensif di masa depan. Menurutnya Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai program strategis nasional sangat layak dan ideal untuk diposisikan sebagai lembaga ekonomi yang dapat mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi dari level paling bawah yaitu desa.

"Program Kopdes/Kel Merah Putih ini adalah pengejawantahan dari Asta Cita Bapak Presiden yaitu membangun dari desa dan dari bawah. Ketika kita melakukan itu banyak ditemui masalah yang sifatnya mendasar sehingga ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan yang harus diselesaikan melalui koperasi," kata Menkop Ferry Juliantono dalam s a m b u t a n n y a

pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama di Kantor Pusat MUI Jakarta.

Menkop Ferry menekankan bahwa MUI, yang menaungi sekitar 87 ormas Islam diharapkan dapat mengoptimalkan seluruh potensinya untuk bersama-sama Kemenkop membangun ekonomi umat melalui koperasi-koperasi eksisting ataupun terlibat dalam pemberdayaan dan pengembangan Kopdes/Kel Merah Putih.

"Kami berharap MUI semakin memperkuat dakwah ekonominya dan terus mendorong agar umat Islam bisa punya pabrik sendiri. Kita punya kekuatan dan sumber daya yang sangat besar sehingga ini menjadi momentum kita semua untuk masuk di sektor riil," tegasnya.

Menkop meyakini melalui kolaborasi dengan MUI tersebut akan dapat memperkuat ekosistem ekonomi umat berbasis koperasi serta dapat memperluas partisipasi masyarakat menjadi anggota koperasi. Ia menegaskan bahwa koperasi dapat menjadi instrumen utama dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Ia memastikan bahwa Kopdes/Kel Merah Putih akan menjadi offtaker dari seluruh produk masyarakat desa



serta menjadi lembaga ekonomi umat untuk memastikan seluruh program dan bantuan pemerintah pusat dapat tersalurkan tepat sasaran.

Menkop Ferry berharap dukungan yang optimal dari seluruh pihak khususnya MUI agar program strategis nasional yaitu Kopdes/Kel Merah Putih dapat berjalan dan beroperasi secara optimal. Bersama dengan MUI dan juga Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Kemenkop berkomitmen untuk memastikan target pengembangan ekonomi umat dapat tercapai melalui ekosistem koperasi.

Wakil Ketua Umum MUI M. Cholil Nafis menyambut baik penandatanganan MoU tersebut karena dinilai sebagai langkah nyata pemberdayaan ekonomi umat. Ia menyatakan bahwa prinsip kerjasama yang disepakati harus berpedoman pada konsep ta'awun (saling tolong menolong) kemudian takaful (saling melindungi).

"Alhamdulillah kita ketemu untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman. Mari kita wujudkan kesepahaman ini dengan ta'awun dan takaful untuk membangun negeri," ujarnya.

Cholil turut menyoroti fakta bahwa umat Islam memiliki jumlah penduduk besar, namun kontribusi ekonomi syariah masih rendah sehingga diperlukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional.

"InsyaAllah ormas yang tergabung di MUI siap mendukung agar program prioritas Presiden bisa dijalankan dengan baik khususnya koperasi desa merah putih dengan melibatkan ormas," tegasnya.

Libatkan BPJS Kesehatan untuk Layanan Kesehatan Desa

Kemenkop juga memperkuat kolaborasi strategis dengan BPJS Kesehatan guna memperluas jangkauan perlindungan kesehatan bagi masyarakat di tingkat akar rumput.

Sekretaris Kementerian Koperasi (SesKemenkop), Ahmad Zabadi, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani antara Menteri Koperasi dan Direktur Utama BPJS Kesehatan pada 23 Desember

2024 lalu.

Dalam sambutannya, Zabadi mengungkapkan rencana besar pemerintah untuk melakukan launching operasionalisasi 30.000 Kopdes Merah Putih pada Agustus mendatang. Langkah ini diharapkan mampu menyentuh puluhan juta masyarakat desa secara langsung.

"Kalau kita hitung rata-rata anggotanya seribu orang saja, berarti minimal ada 30 juta masyarakat desa dan kelurahan yang akan terfasilitasi di tahap pertama," ujar Ahmad Zabadi.

"satu nyawa" yang bertujuan menyejahterakan masyarakat desa. Dengan total 139.000 koperasi yang saat ini eksis di Indonesia, potensi untuk mendorong kepesertaan BPJS Kesehatan dinilai sangat besar.

Sementara itu Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa saat ini cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 98% dari total penduduk Indonesia.

Fokus utama dari kolaborasi ini, kata



Zabadi menambahkan, potensi cakupan ini masih sangat luas mengingat terdapat total 83.393 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Jika seluruh wilayah tersebut memiliki koperasi dengan rata-rata 1.000 anggota, maka terdapat lebih dari 80 juta orang yang harus dipastikan mendapatkan hak layanan kesehatan.

Zabadi menyoroti pentingnya kolaborasi antara Kopdes Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, kedua entitas ini adalah

Prihati, adalah menjaga keberlangsungan program serta memastikan kualitas layanan kesehatan yang merata guna mencegah masyarakat jatuh miskin akibat beban biaya pengobatan.

"Hari ini kita melakukan penandatanganan MoU untuk bisa bekerja sama dalam rangka melaksanakan program JKN bisa sampai ke desa, masuk ke ekosistem Koperasi Merah Putih, kemudian ke ekosistem MBG dan SPPG ke daerah-daerah," ungkap Prihati. ●



KEMENDES PDT DAN BAZNAS SEPAKAT BENTUK DESA ZAKAT

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI) Sodik Mudjahid bersepakat melakukan sinergi serta kolaborasi meningkatkan literasi zakat di tingkat desa, mengadakan unit pengumpul zakat (UPZ) di desa hingga membuat percontohan desa zakat.

Mendes PDT Yandri Susanto dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa Kemendes PDT dan BAZNAS memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dalam meningkatkan literasi zakat di tingkat desa.

Menurutnya, literasi zakat di tingkat desa penting digaungkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dilakukan.

"Oleh karena itu, kampanye literasi zakat harus simpel, masuk akal, mudah dipahami dan mereka mau," ungkap Mendes Yandri.

Lebih lanjut Menteri Yandri mengatakan, saat ini Kemendes PDT memiliki banyak program yang bisa dikaitkan program zakat. Ia mencontohkan, bahwa saat ini ada program desa ayam

petelur, desa lele, desa nila, desa ayam pedaging dan sebagainya yang memiliki penghasilan.

Dengan penghasilan yang ada tersebut, ia mengimbau agar pemilik usaha baik individu maupun kelompok agar mengeluarkan zakat mal, sehingga pengusaha tidak hanya menikmati hasil dari usahanya tersebut tapi juga melaksanakan kewajiban berzakat.

"Nah ini mau saya tumbuhkan ke-

sadaran itu, kamu dapat duit dari Allah SWT ya kamu keluarkan dong zakat malnya. Jangan hanya kamu menikmati hasilnya saja. Nah itu bisa sebenarnya untuk juga membangun desa, meningkatkan SDMnya, beasiswa untuk pendidikan dan lain-lain," ujar Menteri Yandri.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua BAZNAS Sodik Mudjahid juga berkomitmen bahwa kolaborasi dua in-



stansi ini harus dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan literasi serta potensi zakat di desa.

Untuk itu, lanjut Sodik, sebagai upaya memaksimalkan potensi zakat di tingkat desa seluruh Indonesia, perlu adanya UPZ di desa sehingga memudahkan masyarakat yang akan melakukan zakat

"Ada 4 hal yang akan kami lakukan, meningkatkan potensi pengumpulan zakat, kolaborasi, UPZ-UPZ harus sampai desa dan menjaga amanah zakat tersebut," ungkap Sodik.

Optimalisasi Program JKN di Desa dan Daerah Tertinggal

Mendes PDT Yandri Susanto juga

tertinggal.

Mendes PDT Yandri Susanto dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan semua rakyat di desa memiliki jaminan kesehatan serta melek dan paham pentingnya kesehatan, perlu digalakkan literasi tentang kesehatan di desa.

Selaras dengan program Presiden Prabowo Subianto dengan Asta Cita keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan sangat erat kaitannya dengan kesehatan warga desa.

"Jadi ada Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bahan bakunya tentu sebagian be-

yang bisa memastikan pelayanan itu benar adanya, negara hadir. Dan kami tadi mendukung pernyataan pak Dirut BPJS, jangan sampai rakyat di desa itu miskin gara-gara sakit atau tidak sehat, kalau ada BPJS Inshaallah itu akan menjadi ringan beban ketika mereka sakit," sambungnya.

Untuk itu Kementerian Desa dan PDT akan melakukan upaya maksimal untuk memastikan bahwa program strategis nasional yaitu program JKN itu benar-benar terasa, dinikmati dan benar-benar dilaksanakan atau menjadi kebutuhan mendasar rakyat di desa.

"Karena dengan jumlah desa sangat besar 75.266 desa, rakyat Indonesia sebagian besar berada desa. Maka bilamana desa itu sehat, desa itu maju, desa itu makmur, sejatinya Indonesia sehat Indonesia makmur dan Indonesia maju akan menjadi kenyataan," ungkap Menteri Yandri.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menegaskan bahwa penguatan interoperabilitas data dan peningkatan kepesertaan aktif menjadi strategi utama dalam menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Komitmen tersebut ditegaskan melalui kerja sama antara BPJS Kesehatan dan empat kementerian/lembaga yang difokuskan untuk mengintegrasikan data, memperluas cakupan peserta, serta meningkatkan kepatuhan secara berkelanjutan.

Menurutnya, kerja sama ini akan melibatkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan RI, serta Badan Gizi Nasional.

Kerja sama dengan Kemendes PDT akan memperkuat perluasan perlindungan kesehatan hingga ke wilayah desa dan daerah afirmasi. Kerja sama ini akan memastikan peserta JKN Ini mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan nasional sampai ke desa-desa.

"Jika dirangkum, keseluruhan kerja sama ini membentuk satu orkestrasi besar penguatan JKN dari hulu sampai hilir, mulai dari penguatan basis data, perluasan cakupan kepesertaan, peningkatan keaktifan peserta, hingga integrasi program pembangunan kesehatan nasional," tegas Pujowaskito. ●



melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Prihati Pujowaskito.

Kemendes PDT dan BPJS Kesehatan bersepakat untuk memperkuat sinergi tugas dan fungsi dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional di desa dan daerah

sar itu dari desa, perlu orang-orang yang sehat. Termasuk yang nanti menggerakkan dan terlibat langsung di koperasi desa merah putih juga perlu orang-orang yang sehat. Jadi kami tentu menyambut baik dan terima kasih kepada Pak Dirut dan seluruh jajaran BPJS dan kami akan mengawal MoU ini," ujar Mendes Yandri.

"Sehingga semua warga sadar bahwa BPJS ini adalah alat pemerintah



PASTIKAN KESEMPATAN KERJA TETAP TERBUKA DI TENGAH TANTANGAN GLOBAL

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan pemerintah menyiapkan langkah cepat agar kesempatan kerja di Indonesia tetap terbuka meski ketidakpastian geopolitik global mulai menekan industri. Langkah ini penting agar pencari kerja mudah mendapatkan informasi lowongan dan pelatihan yang sesuai kebutuhan pasar.

Menaker Yassierli menekankan bahwa penguatan ketenagakerjaan nasional hanya bisa berjalan melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan tenaga kerja.

"Indonesia tak bisa hanya menunggu masalah terjadi. Kita harus bergerak cepat agar pasar kerja tetap stabil. Kemaker menyiapkan sistem peringatan dini PHK, dialog bersama perusahaan

dan pekerja, serta akselerasi program pelatihan dan peningkatan keterampilan," ujar Yassierli.

Yassierli juga menyoroti kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri. Menurutnya, banyak lowongan tersedia, tetapi informasi dan kualifikasi yang dibutuhkan belum tersambung dengan pencari kerja.

Untuk itu, perusahaan diminta melaporkan kebutuhan tenaga kerja melalui

platform KarirHub SIAPKerja, sehingga rekrutmen lebih transparan dan mudah diakses masyarakat.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan industri. Ia mengajak AmCham terlibat langsung dalam pengembangan keterampilan bagi pekerja low-medium skill, agar lulusan pelatihan siap memasuki dunia kerja.

"Selain menyiapkan peluang kerja,



kita juga mendorong akses setara bagi penyandang disabilitas. Dunia kerja yang sehat bukan hanya soal pertumbuhan, tapi juga soal kesempatan yang adil untuk semua,” tambah Yassierli.

Menaker mengingatkan, perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), akan mengubah dunia kerja secara masif. Kemnaker siap memfasilitasi kebutuhan perusahaan terkait tenaga kerja agar pasar kerja lebih adaptif, inklusif, dan mampu menjawab perubahan.

“Semua tantangan ini harus kita hadapi bersama demi stabilitas pasar kerja nasional,” ujarnya.

Ajukan Tambahan 150 Ribu Kuota Magang

Sementara tingginya minat masyarakat, terutama lulusan baru, terhadap program magang mendorong Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajukan penambahan 150 ribu kuota peserta Program Magang Nasional (MagangHub) tahun 2026.

Usulan ini ditujukan untuk memperluas akses pengalaman kerja sekaligus menjawab kebutuhan industri akan

tenaga kerja yang lebih siap kerja.

“Program Magang Nasional saat ini masih dalam tahap pengusulan anggaran. Dengan dukungan dari Kementerian Keuangan dan Kemenko Bidang Perekonomian, kami berharap program ini bisa dilaksanakan sehingga harapan para calon peserta magang untuk memperoleh kesempatan ikut program ini dapat terwujud,” ujar Yassierli usai Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta.

Menurut Yassierli, pelaksanaan Program Magang Nasional 2026 tidak boleh hanya terpusat di kota-kota besar seperti Jakarta. Program ini harus dirancang lebih merata agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah, mulai dari Indonesia bagian Barat, Tengah, hingga Timur.

“Dalam pelaksanaannya nanti, Kemnaker berkomitmen menjunjung prinsip pemerataan. Daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi diharapkan dapat memperoleh proporsi kuota magang yang lebih besar,” katanya.

Semua tantangan ini harus kita hadapi bersama demi stabilitas pasar kerja nasional

Penambahan kuota ini dinilai penting, terutama bagi lulusan baru yang kerap terkendala minim pengalaman kerja. Di sisi lain, industri juga akan memperoleh talenta yang lebih siap dan relevan dengan kebutuhan lapangan.

Sejalan dengan pembahasan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, program ini juga dirancang sebagai langkah konkret untuk menekan angka pengangguran terbuka, dengan fokus pada daerah berpengangguran tinggi serta sektor-sektor strategis yang membutuhkan tenaga kerja terampil.

“Kami pastikan bidang magang akan dibuat beragam, tidak terfokus pada satu sektor saja. Namun, rencana ini masih dalam proses pembahasan lanjutan dan koordinasi lintas sektoral sebelum diputuskan secara final,” ujar Yassierli.

Melalui Program Magang Nasional 2026, pemerintah menargetkan semakin terbukanya akses pengalaman kerja, meningkatnya kesiapan lulusan memasuki pasar kerja, serta semakin kuatnya keterhubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri. ●



PERKUAT PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI PASAR MAKAU

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kembali memperkuat eksistensi brand Wonderful Indonesia di pasar Asia Timur dengan berpartisipasi dalam ajang Macao International Travel (Industry) Expo (MITE) 2026.

Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Ni Made Ayu Marthini menyampaikan bahwa kehadiran Indonesia di MITE 2026 merupakan wujud komitmen untuk menggaungkan pariwisata berkelanjutan di tingkat global.

"Partisipasi ini bertujuan memperkuat awareness terhadap pariwisata Indonesia yang kini bertransformasi menuju pariwisata berkelanjutan," kata Ni Made Ayu.

Ia menegaskan, keikutsertaan ini menjadi langkah strategis untuk mempromosikan wajah baru pariwisata Indonesia yang berfokus pada kualitas dan keberlanjutan.

Paviliun Wonderful Indonesia di MITE 2026 mencerminkan sinergi antara Kemenpar, KJRI Hong Kong merangkap Makau, serta maskapai nasional Garuda Indonesia untuk wilayah Tiongkok, Hong Kong, dan Greater China.

Berlokasi di The Venetian Macao – Cotai Expo, Hall ABC booth C36 pada 10–12 April 2026, paviliun ini menampilkan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) serta Destinasi Pariwisata Regeneratif (DPR).

Selama tiga hari penyelenggaraan, paviliun memfasilitasi pertemuan Business-to-Business (B2B) melalui sistem Pre-scheduled Appointment (PSA) serta aktivitas Business-to-Consumer (B2C) guna mendorong transaksi paket wisata secara langsung.

Fokus promosi mencakup Jakarta, Bali, Bintan, Yogyakarta–Borobudur, Jawa Timur, dan Labuan Bajo, dengan penekanan pada wisata minat khusus seperti gastronomi, wellness, bahari, serta cultural immersion berbasis wastra.

Selain negosiasi bisnis, Paviliun Wonderful Indonesia juga menyediakan layanan informasi serta distribusi materi promosi guna memastikan penyampaian informasi destinasi unggulan Indone-

sia secara komprehensif kepada calon wisatawan.

"Melalui Paviliun Wonderful Indonesia, kami memperluas jejaring kemitraan bagi masyarakat Makau, wisatawan internasional, maupun diaspora Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia menghadirkan pariwisata yang berkelanjutan dan regeneratif. Kami mengundang dunia untuk melihat Indonesia melampaui sekadar keindahan alam," kata Ni Made Ayu.

Ia menambahkan, konektivitas menjadi faktor kunci dalam mengakselerasi kunjungan wisatawan dari pasar Asia Timur, khususnya Makau. Akses perjalanan saat ini didukung maskapai nasional maupun internasional melalui Hong Kong, termasuk Garuda Indonesia sebagai mitra strategis.

"Kemenpar berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan maskapai nasional untuk menambah frekuensi

dan memperluas jaringan penerbangan langsung ke depan,” ujarnya.

Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara II Kemenpar Yulia menyampaikan pasar Makau menunjukkan tren pertumbuhan positif. Peningkatan aksesibilitas penerbangan diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan tersebut.

Luncurkan Wonderful Indonesia Awards 2026

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana juga kembali meluncurkan program “Wonderful Indonesia Awards” sebagai ajang apresiasi bagi insan pariwisata atas dedikasi, sinergi, dan kontribusi mereka dalam memajukan pariwisata Indonesia.

“Wonderful Indonesia Awards 2026 bukan sekadar seremoni melainkan implementasi program untuk meningkatkan standar dan memastikan pembangunan pariwisata Indonesia yang berdaya saing global,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti.

Wonderful Indonesia Awards diselenggarakan untuk menjaga arah pariwisata Indonesia yang harus terus tumbuh menjadi sektor yang bermartabat, berkelanjutan, dan memberikan dampak yang nyata.

Menpar menggarisbawahi lima fokus utama yang menjadi standar baru pariwisata Indonesia. Yakni kualitas destinasi, kualitas layanan SDM, kualitas produk dan atraksi, keberlanjutan lingkungan, event yang berdampak.

“Pembangunan pariwisata tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, daerah, industri, hingga mitra strategis. Untuk itu, saya mengajak seluruh pemerintah daerah dan mitra swasta, menjadikan Wonderful Indonesia Awards sebagai bagian dari implementasi dalam meningkatkan standar, memperkuat implementasi dan memastikan pembangunan pariwisata Indonesia,” jelas Menteri Pariwisata.

Wonderful Indonesia Awards 2026 mengusung tema “Harmoni Nusantara untuk Pariwisata yang Berkualitas dan Berkelanjutan”. Tema ini dipilih sebagai wujud komitmen untuk menghadirkan pariwisata yang tidak hanya unggul secara kualitas tetapi juga selaras dengan

pelestarian lingkungan dan budaya.

Tahun ini, Wonderful Indonesia Awards menghadirkan 11 kategori penghargaan yang dirancang untuk memacu praktik terbaik di industri. Mulai dari tata kelola desa wisata hingga kepemimpinan inspiratif. Adapun kategori tersebut meliputi: Desa Wisata Terbaik, Kampung Wisata Terbaik,

menterian Pariwisata Vinsensius Jemadu, menyampaikan kegiatan “Kick-off Wonderful Indonesia Awards 2026” mengundang kehadiran 38 Gubernur atau yang mewakili; 514 Bupati dan Walikota seluruh Indonesia; Kementerian Lembaga terkait; serta perwakilan mitra asosiasi, korporasi; dan tentunya juga media dari seluruh Indonesia.



Restoran Berkelanjutan.

Kemudian kategori Kolaborasi Mitra Co-brand Terbaik, Mitra Pariwisata Terbaik 2026, Konten Kreator Wisata Terbaik, Pemimpin Pariwisata Terinspirasi, Pejuang Pariwisata 2026, Kolaborasi Mitra Desa Wisata Terbaik, KEN Hijau 2026 serta Tokoh Kunci Industri MICE.

Plt. Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Ke-

“Hal ini bertujuan untuk menginformasikan mekanisme pelaksanaan Wonderful Indonesia Awards 2026 sekaligus meningkatkan awareness dan partisipasi dari seluruh pelaku pariwisata. Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin komitmen dan kolaborasi bersama dalam mendukung penyelenggaraan Wonderful Indonesia Awards 2026,” kata Vinsensius. ●



BAHU-MEMBAHU PULIHKAN SUMATERA

Pemulihan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi cerminan kuat semangat gotong royong nasional. Puluhan ribu personel dari berbagai kementerian dan lembaga, aparat TNI-Polri, pemerintah daerah, hingga relawan kemanusiaan non pemerintah terus bekerja bersama di lapangan, memastikan setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan beriringan.

Sejak fase awal penanganan, pengerahan personel dilakukan secara besar-besaran melalui mobilisasi nasional. Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan keterlibatan lintas sektor menjadi kunci percepatan penanganan di wilayah terdampak.

"Mobilisasi dari awal yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah mobilisasi nasional yang dipimpin langsung Bapak Presiden. totalnya saat itu mencapai sekitar 92 ribu personel dari semua kementerian dan lembaga, belum termasuk relawan non-pemerintah," ujar Tito Karnavian.

Memasuki fase rehabilitasi, jumlah personel disesuaikan dengan kondisi yang semakin terkendali. Data Satgas PRR pada 31 Maret 2026 mencatat 23.618 personel lintas kementerian/lembaga dan sekolah kedinasan masih bertugas di wilayah terdampak bencana.

Keterlibatan relawan lintas lembaga ini terlihat nyata dalam berbagai sektor pemulihan. Pembangunan hunian sementara (huntara) menjadi salah satu contoh nyata kolaborasi tersebut.

Selain dikerjakan pemerintah melalui BNPB, Kementerian PU, dan dukungan TNI-Polri, pembangunan juga melibat-

kan berbagai organisasi masyarakat dan lembaga filantropi seperti Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, serta berbagai yayasan kemanusiaan lainnya.

Progres pembangunan huntara telah mencapai sekitar 84 persen, dengan 16.360 unit huntara telah selesai dibangun di tiga provinsi terdampak. Capaian ini mempercepat relokasi penyintas dari tenda ke hunian yang lebih layak.

Kerja bersama tersebut juga mendorong percepatan pemulihan infrastruktur. Akses jalan nasional dan jembatan nasional kini telah terbuka sepenuhnya secara fungsional, sehingga distribusi logistik tidak lagi terhambat. Di sisi lain, Jembatan-jembatan darurat yang dibangun oleh TNI, Polri, dan kementerian teknis menjadi penghubung vital bagi wilayah yang sebelumnya terisolasi.

Sementara itu, pembersihan lumpur yang menjadi tantangan utama di wilayah terdampak menunjukkan progres signifikan. Dari ratusan titik yang terdampak, sebagian besar telah berhasil dibersihkan dan mendukung percepatan aktivitas masyarakat. Kemendagri turut menerjunkan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam 3 gelombang untuk membantu pembersihan lumpur.



Pemulihan layanan dasar juga berjalan cepat. Listrik telah pulih di hampir seluruh wilayah, jaringan komunikasi kembali aktif, serta fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan puskesmas telah kembali melayani masyarakat.

Capaian ini berdampak langsung pada penurunan jumlah pengungsi. Dari kondisi awal yang mencapai lebih dari 2,1 jiwa pada Desember 2025, kini tercatat 36 kepala keluarga yang masih berada di tenda dan terus ditangani secara bertahap.

Merajut Kembali Konektivitas di Wilayah Terdampak

Pemulihan konektivitas melalui infrastruktur jembatan dilakukan secara paralel dengan membangun tiga model jembatan yang meliputi jembatan bailey, armco dan perintis di sejumlah titik terisolasi. Pembangunan jembatan dikerjakan secara gotong royong oleh personel TNI AD dan Polri yang tergabung dalam Satgas PRR.

Jembatan bailey adalah jenis jembatan rangka baja ringan yang bersifat portabel dan prefabrikasi. Jembatan ini dirancang untuk dirakit tanpa alat berat khusus dalam waktu singkat. Jembatan armco terbuat dari lembaran baja yang telah digalvanis dan dibentuk bergelombang untuk meningkatkan kekuatan struktur. Sedangkan jembatan perintis dibangun secara sederhana dengan material bervariasi dan kadang berbentuk jembatan gantung.

Berdasarkan data Satgas PRR sebagian besar jembatan di titik terisolasi di tiga daerah terdampak telah rampung dibangun. Adapun rinciannya, di Aceh dari 41 unit jembatan bailey yang akan dibangun, sebanyak 39 diantaranya telah rampung dibangun dan dua lainnya masih dalam proses pemasangan.

Kemudian dari 82 unit jembatan armco yang akan dibangun, sebanyak 44 jembatan diantaranya telah rampung dibangun. Selanjutnya dari 15 unit jembatan perintis yang dibangun, sebanyak 14 jembatan diantaranya telah rampung dibangun.

Sementara, di Sumut dari 24 unit jembatan bailey yang akan dibangun, sebanyak 12 jembatan telah rampung dibangun dan sisanya masih dalam proses pemasangan. Kemudian dari 33 unit jembatan armco yang akan diban-



gun, sebanyak 18 jembatan diantaranya telah rampung dibangun dan dari 13 unit jembatan perintis yang akan dibangun, sebanyak 12 diantaranya telah rampung dibangun.

Di Sumbar dari 11 unit jembatan bailey yang direncanakan, sudah seluruhnya rampung dibangun. Sementara dari 30 unit jembatan armco yang akan dibangun, sebanyak 13 diantaranya sudah rampung dibangun. Kemudian dari 9 unit jembatan perintis yang akan dibangun sebanyak 5 jembatan telah selesai dibangun.

Kasatga Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Muhammad Tito Karnavian, mengatakan upaya

pemulihan konektivitas di tiga daerah bencana tidak akan berhenti pada pembangunan jembatan dan jalan secara fungsional di level daerah. Sebagai langkah lanjutan, Satgas PRR akan segera mempercepat pembangunan jembatan dan jalan secara permanen, agar jaringan transportasi, mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan pergerakan ekonomi kembali normal sepenuhnya.

"Jembatan daerah, ini terutama di tingkat kabupaten/kota, ada yang sudah bisa 100 persen tapi temporer dan harus dipermanenkan, ada yang belum fungsional, harus di fungsionalkan, tapi tidak menghambat sistem logistik, itu yang paling penting sekali," kata Tito.



KICK-OFF IMUNISASI MR BAGI TENAGA MEDIS DAN NAKES

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi memulai pencanangan (kick-off) pemberian imunisasi Measles-Rubella (MR) bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan serta dokter internship. Langkah ini dilakukan untuk melindungi tenaga kesehatan sebagai kelompok berisiko tinggi terhadap penularan, sekaligus memutus rantai penyebaran virus di fasilitas pelayanan kesehatan.

Plt. Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes, dr. Andi Saguni, menuturkan bahwa imunisasi ini menyoar 39.212 tenaga medis dan 223.150 tenaga kesehatan di 14 provinsi dengan kasus campak tertinggi, serta 28.321 dokter umum dan dokter gigi internship di seluruh Indonesia.

"Kementerian Kesehatan senantiasa berupaya melindungi tenaga medis dan tenaga kesehatan karena merupakan kelompok yang sangat berisiko terhadap penularan campak. Imunisasi MR ini diharapkan dapat melindungi tenaga kesehatan sekaligus membantu penanggulangan kasus campak di Indonesia," ujar Andi.

Berdasarkan data surveilans Kemenkes, tren kasus penyakit campak nasional menunjukkan penurunan signifikan. Pada minggu ke-1 tahun 2026, tercatat puncak sebanyak 2.220 kasus, kemudian menurun menjadi 195 kasus pada minggu ke-13.

Meski tren menurun, kewaspadaan tetap diperlukan, terutama di 14 provinsi dengan kasus tertinggi, termasuk Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Nusa Tenggara Barat. Selain itu, capaian Outbreak Response Immunization (ORI) di 10 kabupaten/kota terdampak terus dikejar. Per 9 April 2026, Kota Depok telah mencapai 100%, diikuti Kabupaten Bima (80,8%) dan Kota Palembang (60,9%).

Pemberian imunisasi MR bagi tenaga kesehatan resmi dimulai pada 10 April 2026 di masing-masing rumah sakit tempat mereka bekerja, dengan dosis 0,5 ml yang diberikan secara subkutan.

Ketentuan pemberian vaksin didasarkan pada riwayat imunisasi sebelumnya yakni: tenaga kesehatan dengan riwayat dua dosis tidak perlu divaksin kembali; yang baru menerima satu dosis akan mendapatkan satu dosis tambahan; sementara yang belum memiliki riwayat imunisasi diwajibkan menerima dua dosis dengan interval minimal 28 hari.

Kegiatan kick-off dilaksanakan serentak di enam rumah sakit perwakilan, yaitu RSUP H. Adam Malik (Medan), RSUP Dr. Mohammad Hoesin (Palembang), RS

Pusat Otak Nasional (Jakarta), RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso (Jakarta), RSUD Kota Bandung, dan RS Kemenkes Makassar CPI.

Direktur Utama RSUP H. Adam Malik, dr. Zainal Safri, menyambut baik program ini. "Harapannya, kejadian campak pada orang dewasa, khususnya tenaga kesehatan, dapat dicegah karena riwayat imunisasi sebelumnya belum tentu memberikan perlindungan optimal," ungkapnya. RSUP Adam Malik menargetkan 160 tenaga kesehatan menerima vaksin pada hari ini.

Sementara itu, RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang menyatakan kesediaan melayani 100 tenaga kesehatan agar para tenaga medis dapat memberikan pelayanan optimal tanpa rasa khawatir.

Di tempat lain, RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso mencatat lonjakan kasus campak yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. "Tahun ini, hingga April saja sudah hampir 70 pasien," jelas dr. Nur Aliza. Pihaknya berkomitmen mendistribusikan vaksin secara bertahap kepada seluruh karyawan.

Adapun dr. Rizky, seorang dokter internship di RSUD Kota Bandung, menilai vaksinasi ini penting sebagai perlindungan ganda bagi tenaga kesehatan, pasien, maupun lingkungan kerja.

Prioritaskan Vaksinasi Bagi Tenaga Kesehatan

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memprioritaskan vaksinasi campak bagi tenaga kesehatan (nakes), menyusul terbitnya izin perluasan indikasi vaksin Measles-Rubella (MR) dari BPOM untuk kelompok usia dewasa.

Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, L. Rizka Andalusia, menyebut langkah ini diambil untuk melindungi garda terdepan yang berisiko tinggi tertular. Adapun sasaran prioritasnya adalah 39.212 tenaga medis dan 223.150 tenaga kesehatan di 14 provinsi dengan kasus tertinggi.

"Nah tentunya dengan adanya KLB ini potensi penularan kepada orang berisiko tinggi, dalam hal ini para nakes yang bekerja langsung dengan pasien, mengalami risiko tinggi," kata Rizka saat jumpa pers di Kantor BPOM Jakarta.

Selain nakes di daerah prioritas, vaksi-

nasi juga akan diberikan kepada 28.321 dokter umum dan dokter gigi yang sedang menjalani masa internship di seluruh Indonesia. Total kebutuhan untuk kelompok prioritas dewasa ini diperkirakan sekitar 290 ribu dosis.

Rizka memastikan kebutuhan tersebut sangat tercukupi dengan stok nasional saat ini. Hingga minggu ke-13 tahun 2026, tercatat stok vaksin MR sebanyak 9,8 juta dosis yang cukup untuk 5,5 bulan ke depan.

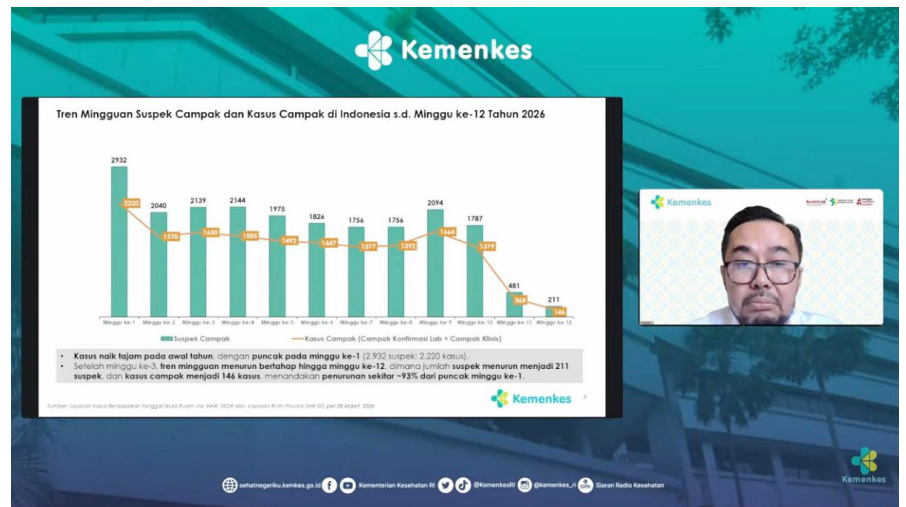
"Kami menjaga agar stok di seluruh daerah itu tetap terjaga tetapi juga tidak berlebihan sehingga tidak berisiko nanti vaksinya akan menjadi rusak. Karena kami punya suatu mekanisme pemantauan vaksin yang namanya SMILE melalui Satu Sehat Logistik, sehingga kami dapat memantau ketersediaan vaksin di seluruh provinsi, kabupaten/kota sampai

ke Puskesmas, sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan secara real-time," ujar Rizka. ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, izin perluasan indikasi telah diterbitkan untuk vaksin MR, MMR, dan measles tunggal produksi Bio Farma/Serum Institute of India, GlaxoSmith-Kline (GSK), serta Merck Sharp Dohme (MSD).

"Persetujuan ini merupakan hasil kajian ketat berbasis data ilmiah, sekaligus bentuk komitmen BPOM dalam memastikan setiap intervensi kesehatan memenuhi standar keamanan dan khasiat," jelas Taruna.

Di akhir keterangannya, Rizka mengimbau orang tua untuk segera melengkapi imunisasi dasar anak (usia 9 bulan, 18 bulan, dan booster SD) tanpa menunggu terjadinya wabah. ●





USUNG KONSEP BHINEKA TUNGGAL IKA, RUSUN PANIKI DITARGETKAN SELESAI 2027

Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan agar proyek rumah susun (Rusun) di Paniki Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado dan akan rampung pada awal tahun 2027 mendatang dengan mengusung konsep Bhineka Tunggal Ika

Kepastian itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau lokasi rencana pembangunan. Menteri Ara menyebut rusun ini butuh anggaran sekitar Rp 20 miliar dan nantinya diperuntukkan bagi masyarakat dengan biaya sewa yang terjangkau.

"Pembangunan ini kita percepat dan diharapkan sudah selesai pada Februari 2027. Rusun ini nantinya bisa disewa masyarakat dengan harga sekitar Rp 450 ribu per bulan," ujarnya.

Selain itu, Menteri Ara juga mengusulkan agar rusun yang akan dibangun di Manado mengusung konsep keberagaman dengan nama Rusun Bhineka Tunggal Ika.

"Nama ini mencerminkan keragaman masyarakat di Sulawesi Utara khususnya Manado," ujarnya.

Direktur Jenderal Perumahan Perumahan Kementerian PKP Sri Haryati menyampaikan bahwa lahan pembangunan telah siap setelah dilakukan land clearing dan pengecekan sertifikat. Selain itu, calon penghuni juga telah disiapkan melalui daftar tunggu berbasis by name by address (BNBA).

Sebelumnya, Pemerintah Kota Manado telah membangun rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di lokasi yang sama menggunakan APBD Kota Manado di Kelurahan Paniki dengan kapasitas 60 unit yang selesai pada tahun 2023.

Pemerintah Kota Manado kembali mengusulkan pembangunan rumah susun di Kelurahan Paniki Dua sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian layak sekaligus mengurangi kawasan permukiman tidak layak di Kota Manado.

Lokasi pembangunan berada di lahan seluas sekitar 3.280 meter persegi dengan ukuran kurang lebih 82 x 40 meter. Lahan tersebut telah bersertifikat Hak Pakai atas nama

Pemerintah Kota Manado dan memiliki akses strategis melalui Jalan Salak Raya

Rencana pembangunan mengusung tipe Rumah Susun Arunika 36 yang terdiri dari tiga lantai dengan total 44 unit hunian.

Bangunan dirancang dengan desain modern dan fungsional



serta dilengkapi fasilitas pendukung seperti area sirkulasi luas, pencahayaan alami optimal, dan ruang hunian yang nyaman bagi masyarakat.

Pembangunan Dimulai Mulai Juni 2026

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati mewakili Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau langsung lokasi rencana pembangunan rumah susun (Rusun) di Tanah Coklat, Kelurahan Paniki Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado.

Dalam peninjauan tersebut, Sri Haryati menyampaikan bahwa lahan pembangunan telah siap setelah dilakukan land clearing dan pengecekan sertifikat. Selain itu, calon penghuni juga telah disiapkan melalui daftar tunggu berbasis by name by address (BNBA).

"Lahannya sudah dilakukan land clearing, sertifikat juga sudah dicek. Ini bagus karena sudah ada daftar tunggu by name by address untuk calon penghuni. Perizinan juga harus terus dikawal oleh kepala balai, jika ada kendala segera disampaikan agar pembangunan rusun ini bisa menjadi percontohan pembangunan rusun yang baik," ujar Sri Haryati.

Ia juga menilai lokasi pembangunan cukup strategis karena dekat dengan berbagai fasilitas umum seperti rumah ibadah dan akses transportasi. Dengan kesiapan tersebut, pembangunan ditargetkan mulai pada Juni 2026 dan selesai pada Maret 2027.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Manado, Peter Alexander Eman, menyampaikan bahwa dimulainya land clearing menjadi sinyal kuat dukungan Pemerintah Kota Manado terhadap program strategis nasional di bidang penyediaan perumahan rakyat.

"Dimulainya land clearing ini menjadi sinyal kuat dukungan Pemkot Manado terhadap program strategis nasional di bidang penyediaan perumahan rakyat. Kami mengucapkan terima kasih dan siap mendukung pembangunan ini," kata Peter.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Manado juga telah membangun rumah susun bagi MBR di lokasi yang sama menggu-

nakan APBD Kota Manado di Kelurahan Paniki dengan kapasitas 60 unit yang telah selesai pada tahun 2023.

Pemerintah Kota Manado kembali mengusulkan pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Paniki Dua sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian layak sekaligus mengurangi kawasan permukiman tidak layak di Kota Manado.

Pembangunan rumah susun ini

diharapkan dapat memberikan hunian layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Manado sekaligus mendukung penataan kawasan perkotaan yang lebih tertib dan berkelanjutan. Program ini juga menjadi wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat yang membutuhkan. ●





BBM SUBSIDI TIDAK NAIK, APBN 2026 TETAP TERJAGA

Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun. Begitu kata Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Menkeu Purbaya menegaskan kebijakan subsidi BBM telah dihitung secara matang dengan mempertimbangkan berbagai skenario, termasuk asumsi harga minyak dunia yang mencapai 100 dolar AS per barel hingga akhir tahun.

Berdasarkan perhitungan tersebut, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga di kisaran 2,9 persen.

"Subsidi terhadap BBM akan terus diadakan sampai dengan akhir tahun dan harga BBM bersubsidi tidak akan naik. Anggaran kita cukup," kata Menkeu

Selain itu, pemerintah juga memiliki bantalan fiskal berupa sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 420 triliun yang dapat digunakan jika terjadi tekanan yang lebih besar, seperti lonjakan harga minyak yang tidak terkendali. Namun demikian, pemerintah menilai kemungkinan harga minyak bertahan tinggi dalam jangka panjang relatif kecil.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa juga meminta masyarakat tidak terpengaruh spekulasi mengenai kondisi keuangan negara. Ia menegaskan bahwa kapasitas fiskal pemerintah masih memadai untuk mendukung berbagai kebijakan yang telah ditetapkan.

"Masyarakat nggak usah khawatir, uang kita cukup. Setiap kebijakan yang diberikan tentu ada konsekuensi biayanya dan kami sudah hitung cukup,"

tegasnya

Di sisi lain, Menkeu menjelaskan bahwa peningkatan defisit pada awal tahun merupakan konsekuensi dari strategi percepatan belanja pemerintah. Lang-

kah tersebut dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi lebih merata, tidak menumpuk di akhir tahun seperti pola sebelumnya.

"Saya ingin menciptakan belanja



pemerintah hampir merata pertumbuhannya sepanjang tahun. Jadi defisit yang besar itu adalah konsekuensi logis dari kebijakan kita," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menjelaskan mengenai kinerja APBN 2025 yang menunjukkan perbaikan. Defisit berpotensi lebih rendah dari target awal 2,91 persen menjadi sekitar 2,8 persen.

"Jadi kondisi anggaran yang kita tidak

terus ke depan," kata Menkeu.

Penerimaan Pajak Tumbuh 20,7%

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tetap solid dan mampu menjadi shock absorber di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Menkeu memaparkan kinerja

Mewah (PPnBM) mencatatkan pertumbuhan drastis hingga 57,7 persen. Angka ini mengkonfirmasi adanya peningkatan aktivitas ekonomi riil di masyarakat.

Selain itu, PPh Orang Pribadi (Pasal 21) juga naik 15,8 persen, yang mencerminkan perbaikan kesejahteraan serta peningkatan kepatuhan wajib pajak pasca implementasi sistem Coretax.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp 112,1 triliun atau 24,4 persen dari target APBN. Meski PNBP berkontraksi 3 persen akibat fluktuasi harga komoditas di awal tahun, namun capaiannya dinilai masih sesuai jalur.

Terkait belanja, pemerintah mencatat pertumbuhan sebesar 31,4 persen (yoy), dengan defisit APBN hingga triwulan I terjaga di level 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menkeu menekankan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi mitigasi risiko untuk menjaga stabilitas harga energi.

"Kami siap menjaga harga BBM bersubsidi tetap tidak naik hingga akhir tahun 2026. Langkah ini tetap aman bahkan jika asumsi harga minyak mentah dunia mencapai rata-rata 100 dollar AS per barrel," tegas Menteri Keuangan.

Kekuatan fiskal ini didukung oleh adanya cadangan atau "bantalan" berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun yang siap digunakan untuk mengantisipasi gejolak ekonomi ekstrem.

Di sisi makro, stabilitas ekonomi tetap terjaga dengan inflasi pada Maret 2026 terkendali di angka 3,48 persen (yoy). Menkeu menjelaskan, jika dampak anomali harga listrik tahun lalu dikeluarkan, inflasi riil sebenarnya hanya berada di level 2,51 persen.

Indikator lain seperti sektor manufaktur juga menunjukkan tren ekspansif selama delapan bulan berturut-turut. Pemerintah pun optimistis pertumbuhan PDB triwulan I dapat mencapai angka 5,5 persen atau lebih. Hal ini diperkuat dengan tren positif pada penjualan kendaraan bermotor dan konsumsi semen yang menandakan daya beli masyarakat masih terjaga.

"Keadaan APBN kita masih terjaga. Kita sudah hitung dengan teliti pertahanan berlapis-lapis untuk memastikan ekonomi kita aman dan rakyat terlindungi," pungkas sang Bendahara Negara. •



seburuk yang kita duga sebelumnya. Dan yang paling penting adalah dengan defisit yang masih terjaga pada waktu itu, kita bisa menciptakan pembalikan arah ekonomi," ujar Menkeu.

Kondisi tersebut dinilai berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,39 persen pada triwulan IV 2025 dan berpotensi meningkat hingga di atas 5,5 persen.

"Jadi kalau ekonominya bagus, pendapatan bagus, nanti uang yang saya bagi ke Kementerian/Lembaga juga lebih konsisten, bisa lebih banyak sedikit, harusnya ekonomi kita akan membaik

positif ekonomi nasional yang didukung oleh pertumbuhan penerimaan negara yang kuat pada triwulan I 2026.

Hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun, atau tumbuh 10,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan pendapatan ini utamanya didorong oleh sektor perpajakan yang menunjukkan kualitas basis pajak yang semakin kuat dan pertumbuhan penerimaan pajak secara keseluruhan sebesar 20,7 persen (yoy).

Secara rinci, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang

ANGKUTAN LEBARAN 2026 BERLANGSUNG BAIK, HASIL SURVEI MEMUASKAN

Meski pelaksanaan angkutan Lebaran 2026 berlangsung baik namun Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mencatat sejumlah isu yang dihadapi selama pelaksanaan Angkutan Lebaran 2026. Menhub menyebut, sejumlah catatan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk pelaksanaan Angkutan Lebaran di tahun-tahun mendatang.

“**M**oda transportasi umum, baik itu darat, kereta api, laut dan udara secara umum berlangsung dengan baik, ada kenaikan dari jumlah angkutan umum yang digunakan oleh masyarakat. Relatif tidak terdapat hal-hal yang menonjol dalam pelaksanaan arus mudik maupun balik,” tutur Menhub Dudy.

Menhub Dudy menyoroti adanya titik-titik kepadatan yang terjadi pada saat puncak arus mudik maupun arus balik lebaran 2026. Misalnya, kepadatan di rest area km 57 tol Jakarta-Cikampek pada saat puncak arus mudik, kepadatan di pelabuhan Gilimanuk serta akses menuju tol Sumatera.

Menhub menyebut, sejumlah evaluasi telah dilakukan bersama dengan Kementerian/Lembaga maupun stake-

holder terkait.

“Kami sudah sampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Jasa-marga untuk mengevaluasi rest area km 57 maupun rest area lainnya, dan dilakukan mitigasi sehingga tidak terjadi hal serupa ke depannya,” lanjut Menhub Dudy.

Untuk penyeberangan, Menhub mengakui adanya kepadatan selama dua hari di Pelabuhan Gilimanuk pada masa arus mudik. Namun di hari ke-3,

pelabuhan.

“Pada saat itu kami melakukan penanganan dengan menggunakan buffer zone dan menyejajarkan kendaraan-kendaraan besar untuk segera menyeberang. Kami juga memprioritaskan kendaraan roda dua untuk didahulukan menyeberang,” papar Menhub Dudy.

Secara keseluruhan, Menhub melihat pelaksanaan Angkutan Lebaran 2026 berjalan dengan baik. Namun demikian, perbaikan akan terus dilakukan, bukan



kepadatan tersebut berhasil terurai. Adanya keterbatasan area buffer zone serta peningkatan kendaraan yang signifikan, termasuk kendaraan-kendaraan besar menjadi penyebab kepadatan di

hanya melibatkan satu pihak, melainkan seluruh stakeholder yang terlibat dalam penanganan arus mudik maupun balik lebaran. Menhub Dudy berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pe-

layanan kepada masyarakat sehingga dapat menghadirkan rasa aman, nyaman, dan kepastian selama melakukan perjalanan.

Sebagai informasi, berdasarkan Mobile Positioning Data (MPD), jumlah orang yang melakukan perjalanan selama masa Angkutan Lebaran (13-29 Maret 2026) mencapai 147,55 juta orang atau naik 2,53% dari hasil survei sebanyak 143,92 juta orang.

Secara keseluruhan, terdapat kenaikan penumpang angkutan umum sebesar 11,79% pada Angkutan Lebaran 2026, menjadi 23,73 juta orang dibandingkan periode sama tahun lalu. Kenaikan tertinggi terdapat pada moda penyeberangan yakni 5,61 juta penumpang, mengalami kenaikan sebesar 17,05% dibandingkan periode sama 2025.

Indikator mencatat 85,3% di kalangan masyarakat yang melakukan mudik menyatakan kepuasannya.

Menhub Dudy menjelaskan, capaian kepuasan yang tinggi ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan selama masa Angkutan Lebaran 2026 berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Ia pun mengapresiasi seluruh stakeholder yang telah bekerja sama dalam menyukseskan Angkutan Lebaran 2026.

"Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak, mulai dari Kementerian, TNI/Polri, BUMN, Pemerintah Daerah, Operator Transportasi, Asosiasi, Seluruh Petugas di lapangan, dan media massa yang telah menyukseskan Angkutan Lebaran 2026. Bagi kami capaian ini bukan hanya sekadar statistik semata, melainkan cerminan kolaborasi

moda angkutan laut 81,78, dan moda penyeberangan 77,48.

Sementara itu, survei KedaiKOPI dilakukan pada 23-30 Maret 2026 dengan jumlah responden sebanyak 1.101 orang. Tingkat kepuasan diukur dari sejumlah aspek, yaitu layanan armada transportasi umum serta infrastruktur dan kebijakan manajemen mudik secara keseluruhan.

Dari survei tersebut, diperoleh hasil bahwa sebanyak 88,8 persen responden merasa puas, dengan nilai rata-rata kepuasan sebesar 7,18 dari skala 1 sampai 10. Adapun kebijakan rekayasa lalu lintas yang diterapkan pemerintah, seperti sistem satu arah (one way) dan contraflow mendapat sambutan positif dari 80,8 persen responden.

Adapun pada survei indikator mayoritas warga secara umum sebanyak 80,8%,



Apresiasi Hasil Survei

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengapresiasi hasil survei lembaga. Hasil survei Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), menyebutkan bahwa indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 memperoleh nilai 82,15 (kategori baik), naik 3,45 poin dari tahun 2025.

Menurut lembaga survei KedaiKOPI, 88,8 persen responden merasa puas terhadap manajemen mudik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sedan-

yang baik antar seluruh stakeholder. Terima kasih pula kepada masyarakat yang telah mematuhi imbauan pemerintah selama periode tersebut," ungkap Menhub

Survei ITS dilakukan di 26 provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah responden sebanyak 5.105 orang. Aspek yang diukur meliputi prasarana, sarana, dan manajemen transportasi.

Dari survei tersebut, didapatkan hasil bahwa IKM layanan angleb 2026 tertinggi ada pada moda kereta api dengan nilai 94,30 atau masuk kategori sangat baik. Berikutnya moda angkutan jalan 84,50, moda angkutan udara 82,12,

puas dengan penyelenggaraan mudik lebaran tahun ini. Terlebih di kalangan pemudik, tingkat kepuasan lebih tinggi, yakni 85,3%, serta masyarakat yang menyatakan kepuasan terhadap angkutan umum sebesar 79,7%.

Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1200 orang. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error-MoE) sekitar $\pm 2,9\%$ pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh Provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional. ●



DUKUNG PENERTIBAN SPPG DAN OPTIMALISASI PROGRAM MBG NASIONAL

Kementerian Koordinator Bidang Pangan terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melakukan penegakan aturan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar, pengaturan distribusi MBG pada hari sekolah, serta berbagai isu penting lainnya.

"**A**tas perintah Presiden, kita diminta sudah sempurna sebelum akhir tahun," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan,

Secara umum, capaian program menunjukkan progres positif, namun diperlukan percepatan distribusi kepada kelompok pendidikan pesantren. Sementara kelompok sasaran 3B (Balita, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui), akan dilakukan monitoring dan evaluasi, termasuk penyesuaian standar gizi.

Berdasarkan mandat Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, telah disusun 10 aturan turunan berupa peraturan Badan Gizi Nasional. Dari jumlah tersebut, satu peraturan telah ditetapkan, sementara tiga lainnya telah melalui proses harmonisasi dan akan segera ditetapkan mengingat urgensi dan sifatnya yang strategis.

Pemerintah juga mengambil langkah

tegas terhadap SPPG yang tidak memenuhi ketentuan petunjuk teknis. Dari total 2.162 SPPG yang diberi peringatan, sebanyak 368 SPPG diberikan Surat Peringatan 1, 5 SPPG diberikan Surat Peringatan 2, dan 1.789 SPPG telah disuspend.

"Hingga 30 Maret 2026, pelaksanaan Program MBG telah menjangkau 61.680.043 penerima manfaat di 38 provinsi dengan 26.066 SPPG telah beroperasi. Dari jumlah tersebut, 2.162 diberi peringatan di antaranya 1.789 disuspend, kemudian SP-1 368, dan SP-2 5 SPPG," tegas Menko Pangan.

Dalam rangka efisiensi, penerima manfaat MBG akan difokuskan pada kelompok yang telah ditetapkan

dalam Perpres, sementara kelompok lainnya seperti lansia dan anak tidak sekolah dapat dipertimbangkan untuk dihentikan sementara sampai ada payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya.

Selain itu, pengawasan dan pemantauan terhadap operasional SPPG akan terus diperkuat. Hal ini mencakup evaluasi terhadap penerima manfaat, termasuk di sekolah kategori elite yang menunjukkan tingkat food waste yang relatif tinggi.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan Program MBG berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai standar, guna mendukung peningkatan pemenuhan gizi masyarakat Indonesia menuju generasi emas 45.



Lakukan Percepatan MBG di Pesantren

Menko Pangan Zulkifli Hasan juga melakukan kunjungan ke sejumlah pondok pesantren.

Kunjungan ini menjadi silaturahmi sekaligus diskusi antara pemerintah dan pimpinan pesantren dalam rangka implementasi program pemerintah di bidang pangan seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi para santri dan siswa di sekolah berbasis agama.

"Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan pondok pesantren saat ini masih dan akan terus dipercepat serta diperluas jangkauannya, karena berdasarkan data Kementerian Agama, baru 10% pesantren yang menerima MBG" ucap Menko Pangan.

"Pesantren perlu mendapatkan perhatian lebih, mengingat para santri juga membutuhkan akses terhadap makanan bergizi secara berkelanjutan," tambahnya saat melakukan kunjungan ke sejumlah pondok pesantren di Tambakberas seperti, Pondok Pesantren Terpadu Chasbullah, Pondok Pesantren Al-Lathifyyah 2, dan Pondok Pesantren As-Sa'idiyyah 2 Bahrul Ulum.

Lebih lanjut, pertemuan ini juga membahas aspek ketahanan pangan, di tengah kondisi global yang sangat dinamis.

Melalui silaturahmi ini, diharapkan dapat mendorong percepatan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di sekolah berbasis agama, agar cakupannya dapat semakin merata dan tepat sasaran sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia.

Dorong Kolaborasi Perkuat Program MBG

Sementara dalam kunjungan ke Jawa Timur, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasi atas dari Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi (GAPEMBI) Jawa Timur yang mendorong penguatan kolaborasi untuk mendukung program strategis nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Tolong dikawal program MBG untuk Indonesia yang lebih baik," lanjutnya.

Dalam bidang pembangunan sumber daya manusia, pemerintah menekankan pentingnya pemenuhan gizi

melalui program makan bergizi sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi mendatang.

"Program-program ini bukan sekadar kebijakan jangka pendek, tetapi menyangkut masa depan Indonesia secara menyeluruh, mulai dari ketahanan pangan, kesejahteraan rakyat, hingga kualiti

tas generasi mendatang," tegasnya.

Menko Pangan menegaskan bahwa keberhasilan program pemerintah membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan berbagai mitra strategis di daerah.

"GAPEMBI kita harapkan bisa menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan program MBG," ujarnya. •





STRATEGI TERUKUR WUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN

Target swasembada pangan nasional yang semula diproyeksikan dalam waktu empat tahun, berhasil dipercepat menjadi satu tahun melalui serangkaian langkah terukur dan terintegrasi yang dijalankan Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

Perubahan target tersebut tidak terjadi tanpa alasan. Pada awal pemerintahan, sektor pertanian menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari penurunan produksi beras, keterbatasan pupuk, kerusakan jaringan irigasi, hingga lemahnya distribusi sarana produksi.

Data menunjukkan bahwa volume pupuk sempat turun hingga 50 persen, sementara sekitar 17-20 persen petani tidak dapat mengakses pupuk bersubsidi akibat kendala kartu tani. Di sisi lain, sekitar 60 persen jaringan irigasi berada dalam kondisi rusak, diperparah oleh dampak El Nino dan keterbatasan alat dan mesin pertanian.

Mentan Amran menyampaikan bahwa percepatan target tersebut merupa-

kan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera mewujudkan swasembada pangan di tengah dinamika global yang semakin menantang.

"Bapak Presiden Prabowo tugaskan kepada kita agar swasembada pangan secepat-cepatnya. Kita siapkan lompatan bersama yang kita buat bersama agar itu terwujud, petani sejahtera, masyarakat tersenyum," kata Mentan Amran.

Menghadapi target besar tersebut, Kementerian Pertanian tidak hanya menjalankan program rutin, melainkan melakukan perubahan sistem secara menyeluruh.

Langkah pertama yang dilakukan adalah deregulasi besar-besaran. Sebanyak 547 regulasi disederhanakan,

termasuk pencabutan 291 peraturan dan penyederhanaan sejumlah kebijakan menjadi lebih efisien.

Secara paralel, Pemerintah menerbitkan sedikitnya 28 regulasi strategis yang terdiri dari 1 Peraturan Pemerintah (PP), 3 Peraturan Presiden (Perpres), 2 Keputusan Presiden (Keppres), 10 Instruksi Presiden (Inpres), 9 Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), 2 Keputusan Menteri Pertanian, serta 1 R-Inpres terkait percepatan produksi pangan.

Reformasi kemudian difokuskan pada sektor pupuk sebagai faktor kunci produksi. Pemerintah mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton, menurunkan harga pupuk subsidi (Urea & NPK) hingga 20 persen.

Memperluas akses petani melai-

lui penggunaan KTP sehingga seluruh petani dapat memperoleh pupuk tanpa hambatan administratif, membangun 7 pabrik pupuk baru, 5 diantaranya akan diresmikan sebelum tahun 2029 serta penyederhanaan penyaluran pupuk bersubsidi.

"Itulah hebatnya Presiden kita, pemerintahan sekarang. Volume pupuk dipenuhi, kemudian harga turun 20 persen. Sekarang petani mana ada yang berte-risik soal pupuk," ungkap Mentan Amran.

Efisiensi Anggaran dan Perbaikan Infrastruktur

Di sisi pembiayaan, Kementerian Pertanian melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp3,8 triliun yang dialihkan langsung ke kegiatan produktif seperti penyediaan benih unggul, pompanisasi, dan alat mesin pertanian. Kebijakan ini terbukti mampu mendorong peningkatan produksi beras.

Intervensi produksi dilakukan secara masif melalui berbagai program. Optimalisasi benih unggul diterapkan pada lahan seluas 5 juta hektare dengan produktivitas mencapai 9,52 ton per hektar untuk lahan irigasi, 6-7 juta ton per hektar untuk lahan rawa, 8-9 ton per hektar untuk lahan tadah hujan dan 9,06 ton per hektar untuk lahan toleran salin.

Program pompanisasi juga digencarkan pada 1 juta hektare lahan tadah hujan, yang sebelumnya hanya mampu tanam satu kali menjadi hingga tiga kali tanam.

Selain itu, pemerintah melakukan optimalisasi lahan rawa serta mencetak sawah baru dengan target mencapai 3 juta hektare, termasuk pengembangan kawasan seluas 500 ribu hektare di Kalimantan Tengah.

Perbaikan infrastruktur juga menjadi prioritas melalui pembangunan dan revitalisasi 61 bendungan dengan potensi layanan irigasi mencapai 400 ribu hektare. Langkah ini diperkuat dengan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang sebelumnya mengalami kerusakan hingga 46 persen.

Transformasi pertanian juga dilakukan dengan mendorong mekanisasi dan modernisasi. Mentan Amran mengungkapkan bahwa penggunaan alat dan mesin pertanian terbukti mampu menekan biaya produksi hingga 50

persen dan meningkatkan hasil produksi hingga 100 persen.

"Kita sedang menggeser pertanian dari cara tradisional menuju sistem modern dengan pemanfaatan drone untuk pemupukan dan penanaman serta penerapan precision agriculture dan smart farming sehingga biaya turun dan produktivitas naik. Dan ini kita libatkan generasi muda untuk terjun ke dalamnya," terangnya.

cadangan beras pemerintah

Seluruh langkah tersebut memberikan dampak signifikan. Produksi beras nasional meningkat sebesar 4,07 juta ton atau 13,29 persen di tahun 2025. Cadangan beras pemerintah (CBP) hingga April 2026 dilaporkan mencapai 4,59 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Nilai Tukar Petani (NTP) juga meningkat menjadi 125,35, tertinggi dalam 34 tahun terakhir, sementara pertumbuhan



Di saat yang sama, pembenahan tata kelola dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pemberantasan mafia pangan. Sebanyak 248 pejabat dilakukan rotasi dan evaluasi, serta ribuan izin distribusi pupuk dicabut guna memastikan distribusi berjalan tepat sasaran.

Berbagai strategi tersebut diperkuat melalui kebijakan di hilir yang langsung menyasar petani. Perum BULOG turun langsung ke lapangan membeli gabah petani dengan skema any quality seharga Rp6.500/kg. Langkah ini berhasil menjaga kestabilan harga gabah di tingkat petani, sekaligus meningkatkan

sektor pertanian mencapai 5,74 persen, tertinggi dalam 25 tahun.

"Empat tahun rencana awal swasembada, begitu Bapak Presiden melihat ada geopolitik yang memanas, 'Pak Mentan, apapun caranya, satu tahun'. Jadi, ini luar biasa satu tahun swasembada. Dan, stok cadangan beras kita insya Allah bulan ini lima juta ton," ucapnya.

Produksi tersebut melampaui kebutuhan domestik yang berada pada kisaran 2,5 - 2,6 juta ton per bulan. Surplus ini menegaskan kemandirian pasokan nasional sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan Indonesia. ●

EFISIENSI INSENTIF SPPG BISA MENGHEMAT ANGGARAN HINGGA 14 TRILIUN

Perdebatan mengenai struktur insentif dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada level Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada dasarnya bukan sekadar persoalan besar-kecilnya angka nominal, melainkan menyangkut efisiensi alokasi anggaran publik dalam kerangka kebijakan redistributif.

Dengan asumsi bahwa setiap SPPG melayani sekitar 2.500 hingga 3.000 porsi per hari dengan nilai manfaat Rp10.000 per porsi, maka total nilai program yang dikelola satu unit SPPG mencapai kisaran Rp25–30 juta per hari. Dalam satu bulan operasional (20 hari), angka ini setara Rp500–600 juta, dan dalam satu tahun mencapai Rp6–7,2 miliar.

Di sisi lain, apabila insentif SPPG ditetapkan sebesar Rp6 juta per hari di luar biaya operasional, maka total insentif mencapai Rp120 juta per bulan atau Rp1,44 miliar per tahun untuk satu unit. Dengan demikian, rasio antara insentif manajerial terhadap nilai total manfaat program berada pada kisaran 20–24 persen.

Secara konseptual, angka ini berada di atas standar umum efisiensi program sosial, yang dalam praktik internasional umumnya menempatkan biaya administrasi dan manajemen pada rentang 5–15 persen, dengan toleransi hingga sekitar 20 persen untuk program dengan kompleksitas logistik tinggi.

Oleh karena itu, struktur insentif yang menghasilkan rasio di atas 20 persen dapat dikategorikan berada pada batas atas efisiensi, bahkan cenderung melampauinya.

Implikasi fiskal dari struktur tersebut menjadi signifikan ketika diperluas ke skala nasional. Dengan menggunakan asumsi konservatif sebanyak 20.000 unit SPPG, total belanja insentif mencapai sekitar Rp2,4 triliun per bulan atau Rp28,8 triliun per tahun.

Apabila dilakukan penyesuaian insentif ke tingkat yang lebih efisien, misalnya pada kisaran Rp60–80 juta per bulan per SPPG, maka terjadi penurunan biaya sebesar Rp40–60 juta per unit per bulan.

Secara agregat, penghematan yang dihasilkan berkisar antara Rp800 miliar hingga Rp1,2 triliun per bulan, atau sekitar Rp9,6–14,4 triliun

per tahun.

Penghematan ini memiliki arti ekonomi yang substansial ketika dikaitkan dengan tujuan utama program, yaitu penyediaan makanan bergizi bagi anak.

Dengan biaya MBG sebesar Rp2,4 juta per anak per tahun, penghematan Rp12 triliun, misalnya, dapat dialokasikan untuk menjangkau tambahan sekitar 5 juta anak per tahun tanpa meningkatkan total anggaran.

Hal ini menunjukkan adanya trade-off yang sangat nyata antara besaran insentif manajerial dan luas cakupan manfaat program.

Dalam perspektif ekonomi publik, kondisi ini mencerminkan apa yang

dapat disebut sebagai ketidakseimbangan internal dalam distribusi anggaran, di mana proporsi sumber daya yang dialokasikan untuk fungsi koordinasi dan manajemen mendekati seperempat dari total nilai manfaat yang disalurkan.

Meskipun kompleksitas operasional dalam distribusi makanan skala besar memang memerlukan kompensasi yang kompetitif, besaran insentif yang terlalu tinggi berisiko menciptakan inefisiensi struktural, terutama ketika tidak diimbangi dengan mekanisme berbasis kinerja yang ketat. Apalagi dengan mempertimbangkan angka 28 ribu anak menjadi korban keracunan dan 2.162 SPPG ditutup sementara.

Oleh karena itu, optimalisasi kebijakan tidak terletak pada pengurangan insentif secara drastis, melainkan pada penyesuaian menuju kisaran yang lebih proporsional terhadap nilai program yang dikelola, disertai dengan desain insentif berbasis kinerja yang mampu menjaga kualitas layanan sekaligus menekan pemborosan.

Dalam kerangka ini, efisiensi anggaran bukan sekadar upaya penghematan, tetapi instrumen untuk memperluas dampak sosial program secara signifikan tanpa menambah tekanan terhadap fiskal negara.

Dengan kata lain, perbaikan pada struktur insentif di tingkat pelaksana memiliki potensi langsung untuk meningkatkan efektivitas redistribusi, sehingga setiap rupiah anggaran publik menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi kelompok sasaran. ●



R. HAIDAR ALWI
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI)
sekaligus Wakil Ketua Dewan
Pembina Ikatan Alumni ITB



NARASI SESAT 'PRABOWO HINA IRAN': SIAPA BERMAIN DI BALIK LAYAR?

OLEH EDY MULYADI,
WARTAWAN SENIOR

adalah para penyebar: buzzer, akun anonim, dan micro-influencer yang memanfaatkan potongan video untuk menciptakan sensasi. Mereka dapat imbalan

Dalam beberapa hari terakhir, jagad media sosial kita dijejali narasi "Prabowo menghina Iran". Kalimat "Rakyat Iran keras kepala" yang dilontarkan Prabowo Subianto dipotong. Dikemas ulang. Potongan video disebar. Makna dipelintir. Emosi publik dipancing. Maka jadilah, seolah-olah Presiden RI Prabowo menghina Iran.

Jika kita memutar ulang secara utuh pidato Prabowo, yang ada justru sebaliknya. Presiden kita memuji pemerintah dan rakyat Iran sebagai pemegang prinsip dan teguh pendirian. Sikap itu antara lain ditunjukkan dalam perlawanan terhadap Amerika dan Israel. Mereka keras kepala dalam menegakkan prinsip dan kebenaran. Keras kepala ini pula, kata Prabowo, yang dimiliki para pendiri bangsa Indonesia saat merebut kemerdekaan dari penjajah.

Jadi, tidak bisa tidak, narasi Prabowo menghina Iran jelas hoaks. Pertanyaannya, mengapa negara diam saja? Aneh, narasi yang menyebut Prabowo Subianto menghina Iran sudah beredar luas selama sehari-hari. Namun hingga kini, nyaris tidak terlihat langkah tegas dari aparat untuk menindak para penyebarannya.

Pada hal, secara teknis, melacak sumber penyebaran bukan hal sulit. Unit siber di Kepolisian Negara Republik Indonesia punya perangkat, kemampuan, dan kewenangan untuk mengurai jejak digital. Siapa yang pertama memotong video. Siapa yang membongkai narasi provokatif. Juga siapa yang menyebarkannya secara sistematis. Instrumen hukumnya pun tersedia. Lengkap. Mulai dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hingga pasal-pasal tentang penyebaran berita bohong dan fitnah.

Bukan lamban, tapi pembiaran?

Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tidak ada efek kejut. Tidak ada penindakan yang terlihat. Kekosongan ini menimbulkan pertanyaan yang lebih dalam. Apakah ini sekadar kelambanan? Atau ada sesuatu yang sengaja dibiarkan?

Kecurigaan publik pun bergerak ke arah yang lebih sensitif. Jangan-jangan para pelaku bukan orang sembarangan. Jangan-jangan mereka memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan lama. Apalagi mereka selama ini dikenal punya jejaring kuat, lentur, dan sulit disentuh. Si Manusia Merdeka Muhammad Said Didu menyebutnya sebagai Geng SOP (Solo, Oligarki, Parcock).

Apakah ini kebetulan? Atau justru bagian dari pola yang lebih besar? Di sinilah kita harus mulai melihat persoalan secara utuh.

Polemik "Prabowo vs Iran" sejak awal memang problematis. Kita ulang pelan-pelan. Pernyataan yang dipersoalkan itu, jika dilihat dalam konteks lengkap, justru mengandung makna positif. Ini tentang keteguhan. Tentang sikap tidak tunduk pada tekanan. Namun satu frasa dipotong, dilepas dari konteks, lalu diubah menjadi narasi yang berlawanan. Dari pujian menjadi hinaan. Dari pengakuan menjadi konflik.

Prabowo tidak sedang salah ucap atau keseleo lidah. Juga bukan sekadar beda tafsir. Ini adalah teknik lama dalam propaganda: memotong konteks untuk membentuk persepsi. Ini bukan spontan. Ini kerja.

Dan seperti semua operasi yang rapi, kerja-kerja seperti ini tidak berdiri sendiri. Ada pola yang bisa dibaca. Lapisan paling depan

remah-remah untuk sekadar bertahan hidup. Di belakangnya, sangat mungkin ada kepentingan politik domestik. Kekuatan lama yang tidak sepenuhnya rela melihat posisi Prabowo semakin kokoh dan stabil.

Bagi kelompok-kelompok ini, menjatuhkan secara langsung mungkin sulit. Tapi melemahkan dengan perlahan melalui erosi kepercayaan adalah strategi yang jauh lebih efektif. Cukup ciptakan keraguan. Bangun jarak antara pemimpin dan basis pendukungnya. Dan salah satu basis yang paling sensitif adalah umat Islam yang memiliki simpati besar terhadap perjuangan Iran.

Iran, dalam konteks global, bukan sekadar negara. Ia simbol perlawanan terhadap hegemoni Amerika dan agresi Israel. Ketika narasi dibangun seolah-olah Prabowo merendahkan Iran, maka yang disasar bukan hanya citra politik, melainkan emosi ideologis umat. Jika narasi ini dipercaya, maka akan terbentuk jarak psikologis yang berbahaya. Umat yang selama ini bersimpati kepada Iran bisa merasa bahwa pemimpin nasionalnya berada di posisi yang berseberangan.

Prabowo dalam ancaman

Di titik ini, dampaknya menjadi strategis. Pertama, kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional terkikis bukan karena kebijakan, tetapi karena persepsi yang dimanipulasi. Kedua, umat terpecah dalam menyikapi isu global. Sebagian terprovokasi, sebagian defensif. Polarisasi ini hanya menguntungkan pihak-pihak yang sejak awal ingin melihat Indonesia tidak solid.

Tidak berhenti di situ, kemungkinan adanya irisan kepentingan asing juga tidak bisa diabaikan. Dalam peta geopolitik, negara seperti Indonesia selalu menjadi arena perebutan pengaruh. Membenturkan figur pemimpin nasional dengan simbol perlawanan global seperti Iran adalah langkah efektif untuk menciptakan kebisingan, kebingungan, dan pada akhirnya melemahkan posisi Indonesia di mata dunia.

Di tengah semua itu, publik kembali berada di posisi yang rawan: menjadi objek. Setiap potongan video ditelan mentah-mentah. Setiap narasi emosional langsung disebar. Tanpa sadar, masyarakat justru menjadi perpanjangan tangan dari operasi yang tidak mereka pahami sepenuhnya.

Inilah wajah baru konflik. Bukan lagi perang terbuka, melainkan perang makna. Bukan lagi adu kekuatan fisik, tapi adu persepsi. Dan dalam perang seperti ini, yang paling berbahaya bukan kebohongan itu sendiri. Kebohongan yang terasa seperti kebenaran karena diulang terus-menerus jauh lebih berbahaya.

Pada akhirnya, kita harus kembali ke pertanyaan awal: mengapa ini dibiarkan? Jika aparat memiliki kemampuan, jika hukum tersedia, jika jejak digital bisa ditelusuri, maka diamnya penegakan hukum bukan sekadar kekosongan. Ia adalah sinyal. Tanda. Prabowo dalam ancaman. Dia tidak sedang diserang di depan. Tapi dibusukkan dari dalam. Digerogoti dari belakang. ●



Menko AHY Dukung Penuh Pelabuhan Tanjung Carat

GUBERNUR HERMAN DERU TARGETKAN BEROPERASI 2028

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, sebagai proyek strategis nasional yang akan memperkuat konektivitas dan perekonomian daerah.

Meski tidak hadir langsung dalam acara Project Launching yang digelar di Griya Agung, Kamis (9/4/2026), AHY menyampaikan komitmennya melalui video pernyataan.

Ia menegaskan dukungan tersebut mencakup penguatan konektivitas, transportasi logistik, serta pengembangan wilayah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat.

AHY juga diketahui sempat memimpin rapat koordinasi percepatan proyek di Palembang pada 10 Februari 2026.

Sejalan dengan itu, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, menegaskan komitmennya menghadirkan pelabuhan samudera di Sumsel pada 2028 atau paling

“Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat merupakan langkah strategis untuk menjawab keterbatasan teknis dan operasional pelabuhan saat ini,

lambat 2029.

Menurut Herman Deru, pembangunan pelabuhan tersebut merupakan cita-cita panjang yang telah dirintis selama lebih dari 40 tahun oleh para gubernur terdahulu.

“Kalau ditarik ke belakang, ini sudah lebih dari 40 tahun diperjuangkan. Dari yang tadinya baru tanda-tanda atau



'hilar', hari ini menjadi kenyataan dengan dimulainya project launching," ujarnya.

Ia menjelaskan, keberadaan pelabuhan samudera sangat krusial bagi Sum-

sel yang kaya sumber daya alam seperti batu bara, karet, dan kopi. Selama ini, keterbatasan pelabuhan membuat distribusi komoditas harus melalui provinsi

lain sehingga meningkatkan biaya logistik dan menurunkan daya saing.

Selain itu, pendangkalan Sungai Musi hingga sekitar enam meter menjadi





Investasi dan Hilirisasi RI/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu.

Saya mengajak kita semua untuk menjaga momentum ini, memperkuat sinergi dan kolaborasi, serta mempercepat realisasi agar proyek ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Sumsel

kendala serius. Kapal besar tidak dapat beroperasi optimal di Pelabuhan Boom Baru yang berada di tengah kota.

"Ini bukan hanya soal niaga, tetapi juga kemanusiaan. Kemacetan dan kecelakaan di dalam kota juga menjadi dampak dari aktivitas pelabuhan yang tidak lagi memadai," tambahnya.

Herman Deru optimistis pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat, dengan

dukungan pemerintah pusat dan sektor swasta, akan menjadi solusi strategis sekaligus menggantikan peran Pelabuhan Boom Baru.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi, Menteri ATR/Kepala BPN RI Nusron Wahid, Kepala Staf Presiden Muhammad Qodari, serta Wakil Menteri

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan Sumatera Selatan merupakan simpul penting ekonomi nasional yang membutuhkan sistem logistik kuat dan terintegrasi.

"Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat merupakan langkah strategis untuk menjawab keterbatasan teknis dan operasional pelabuhan saat ini," ujarnya.

Ia menambahkan, proyek ini telah memasuki milestone ke-11 dari total 15 tahapan dan ditargetkan selesai sebelum 2029 agar segera memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menhub juga menegaskan pembangunan pelabuhan tidak menggunakan APBN maupun APBD, melainkan melalui investasi swasta.

Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu menambahkan proyek ini telah



menarik minat konsorsium besar dan berpotensi mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK).

Pelabuhan Tanjung Carat dinilai bukan sekadar infrastruktur, melainkan pintu masa depan ekonomi Sumsel yang akan menjadi pusat ekspor komoditas unggulan seperti karet, sawit, dan batu bara.

Proyek ini juga menjadi solusi atas keterbatasan Pelabuhan Boom Baru melalui skema KPBU bersama PT Bukaka Teknik Utama.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha, Herman Deru mengajak seluruh pihak menjaga momentum percepatan pembangunan.

"Saya mengajak kita semua untuk menjaga momentum ini, memperkuat sinergi dan kolaborasi, serta mempercepat realisasi agar proyek ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Sumsel," tutupnya. ●ADV



GUBERNUR HERMAN DERU TAWARKAN POTENSI BESAR SUMSEL KEPADA AUSTRALIA

Perkuat Kerja Sama Investasi dan Kopi

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier, di ruang rapat Gubernur Sumsel, Rabu (8/4/2026).

Per pertemuan ini dimanfaatkan untuk memperkuat kemitraan sekaligus mempromosikan potensi unggulan Sumsel kepada Australia.

Herman Deru menegaskan bahwa Sumsel memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar dan peluang investasi yang menjanjikan.

"Sumsel memiliki 17 kabupaten/kota dengan potensi pertanian dan perkebunan yang luas. Areal persawahan mencapai 537 ribu hektare, kelapa sawit 1,4 juta hektare, serta karet yang menyumbang 30 persen produksi nasional. Untuk kopi, Sumsel berada di peringkat ketiga dunia dengan varietas arabika, liberika, dan





robusta," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa keberagaman budaya yang terdiri dari sembilan suku dan 17 bahasa menjadi kekuatan sosial, serta menjadikan Sumsel sebagai daerah yang aman untuk investasi.

Menurutnya, potensi tersebut perlu didorong agar memiliki nilai tambah lebih tinggi, terutama komoditas kopi yang saat ini masih diekspor dalam bentuk mentah.

Selain itu, Sumsel juga merupakan salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia, berada di posisi kedua setelah Kalimantan.

Dalam pertemuan tersebut, Herman Deru juga mengapresiasi dukungan Australia dalam pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di kawasan Sungai Selayur, yang dinilai berhasil namun masih perlu diperluas jangkauannya.

Sementara itu, Roderick Brazier menyambut baik peluang kerja sama yang ditawarkan Sumsel, termasuk peningkatan ekspor kopi ke Australia serta potensi kolaborasi di berbagai sektor lainnya. •ADV

Sumsel memiliki 17 kabupaten/kota dengan potensi pertanian dan perkebunan yang luas. Areal persawahan mencapai 537 ribu hektare, kelapa sawit 1,4 juta hektare, serta karet yang menyumbang 30 persen produksi nasional.



Di Hadapan Pelaku UMKM GUBERNUR SUMSEL TEKANKAN PENTINGNYA EKSPRESI DAN KOMUNIKASI UNTUK RAIH KESUKSESAN

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, menekankan pentingnya ekspresi dan komunikasi sebagai kunci utama meraih kesuksesan, selain penguasaan teknologi, di hadapan ratusan pelaku UMKM.

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, menekankan pentingnya ekspresi dan komunikasi sebagai kunci utama meraih kesuksesan, selain penguasaan teknologi, di hadapan ratusan pelaku UMKM.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Persiapan Pelatihan Artificial Intelligence (AI) untuk UMKM di Kantor OJK Provinsi Sumsel, Rabu (8/4/2026)

Pelatihan yang diinisiasi AIM ASEAN bersama Kumpul Impact ini diikuti 300 peserta sebagai upaya mendorong transformasi digital UMKM di Sumatera Selatan.

Dalam arahnya, Herman Deru mengingatkan bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi, generasi muda dituntut untuk terus be-

radaptasi. Menurutnya, kemampuan berinovasi menjadi hal yang tidak terpisahkan dari kesuksesan di era digital.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa faktor nonteknis tetap memiliki peran penting.

"Yang pertama itu ekspresi. Tidak ada orang sukses dengan wajah masam. Bukan soal cantik atau tidak, tetapi bagaimana menata ekspresi yang baik dan ramah," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang santun dan efektif. Sikap negatif, seperti mudah menyindir atau bersikap judes, dinilai tidak akan membawa keberhasilan jangka panjang.

Dalam kesempatan itu, Herman Deru turut membagikan pengalaman pribadinya saat mengalami kegagalan dalam kontestasi politik. Ia menyebut



kegagalan sebagai bagian dari proses menuju keberhasilan.

“Untuk sampai di titik ini, saya pernah kalah dalam pemilihan bupati dan gubernur. Namun, dengan komunikasi yang baik, banyak pihak yang akhirnya memberikan dukungan,” katanya.

Ia mengajak para pelaku UMKM untuk tidak terfokus pada keterbatasan modal, melainkan memulai usaha dengan opti-

misme dan memanfaatkan teknologi AI sebagai alat pengembangan bisnis.

Pemerintah Provinsi Sumsel, lanjutnya, menargetkan terciptanya 100 ribu wirasaha muda melalui sinergi berbagai pihak.

Associate Director AIM ASEAN, Sarita Kinanti, menambahkan bahwa program ini tidak hanya menekankan penggunaan teknologi, tetapi juga aspek etika dalam pemanfaatan AI.

la juga menyoroti kuatnya sejarah kewirausahaan di Sumsel sejak masa Sriwijaya sebagai modal sosial dalam menghadapi era digital.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital, Tiar Nabila Karbala; Kepala OJK Provinsi Sumsel, Arifin Susanto; serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel. • ADV





Rakor Nasional Karhutla 2026

WAGUB CIK UJANG DORONG PENGUATAN SINERGI DAN STATUS SIAGA DINI DI SUMSEL

Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Cik Ujang, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) di Aula Plaza Kuningan Menara Selatan, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).

Rapat tersebut menjadi bagian dari agenda strategis nasional dalam menghadapi potensi karhutla tahun 2026, sekaligus menandai pemanfaatan gedung baru KLH/BPLH di kawasan Plaza Kuningan sebagai pusat koordinasi kebijakan lingkungan hidup.

Dalam pertemuan itu, dibahas berbagai langkah antisipasi dini menghadapi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau. Sejumlah daerah rawan, termasuk Sumatera Selatan, menargetkan penetapan status siaga darurat sebelum akhir April 2026 sebagai upaya





preventif.

Cik Ujang menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung kebijakan nasional pengendalian karhutla. Ia menekankan pentingnya penguatan kesiapsiagaan daerah melalui koordinasi lintas sektor dan optimalisasi sumber daya yang tersedia.

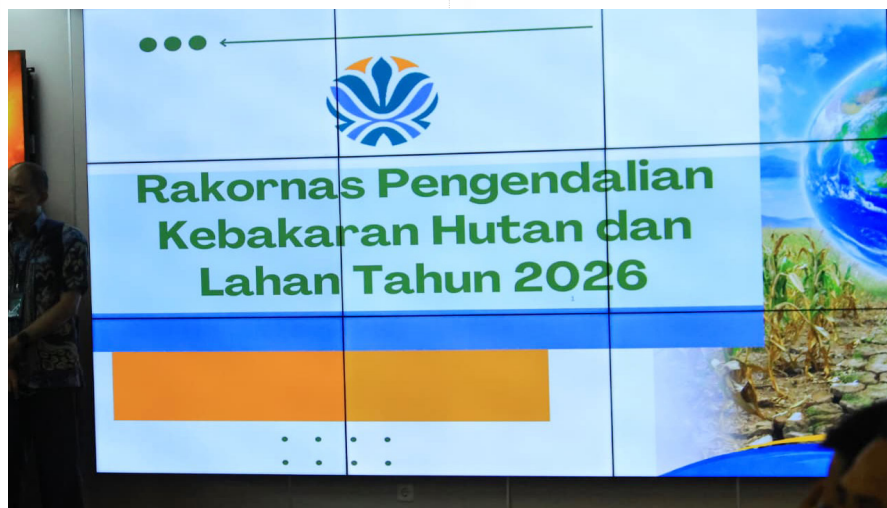
Selain itu, rakor juga menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi melalui pembentukan desk penanganan karhutla yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat personel di lapangan serta meningkatkan efektivitas langkah pencegahan.

Tahun 2026 juga dipandang sebagai momentum pembaruan kelembagaan KLH/BPLH, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat sinergi internal. Kehadiran kantor baru di Plaza Kuningan diharapkan dapat mendukung koordinasi yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap berbagai isu lingkungan hidup, termasuk pengendalian karhutla.

Melalui rakor ini, pemerintah pusat dan daerah berkomitmen untuk terus

meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat kolaborasi, serta memastikan upaya pencegahan karhutla berjalan

secara optimal guna menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. ●



SEKDA SUMSEL EDWARD CANDRA IKUTI RAKORNAS PENGENDALIAN INFLASI 2026

Evaluasi Program 3 Juta Rumah

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakor-nas) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan tersebut diikuti secara virtual melalui Sumsel Command Center, Senin (6/4/2026).

Rakornas yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsu Tohir, serta menghadirkan arahan dari Menteri Dalam

Negeri, Tito Karnavian.

Dalam arahnya, Tito Karnavian memaparkan kondisi inflasi nasional terkini sebagai acuan bagi seluruh kepala daerah. Inflasi bulanan (month-to-month) pada Maret 2026 tercatat





sebesar 0,41 persen dibandingkan Februari 2026. Angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.

Sementara itu, inflasi tahunan (year-on-year) pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,48 persen dibandingkan Maret 2025. Angka tersebut terpantau lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pemerintah pusat juga menekankan agar pemerintah daerah mewaspadai sejumlah sektor utama penyumbang inflasi tertinggi pada Maret 2026, yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta sektor transportasi.

Selain membahas pengendalian inflasi, Rakornas ini turut mengevaluasi dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Program strategis nasional tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, terutama dalam penyediaan lahan, kemudahan perizinan, serta sinkronisasi data penerima manfaat.

Melalui Rakornas ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna menjaga stabilitas harga pangan di wilayah Sumsel. Selain itu, pemerintah daerah juga beru-

paya memastikan program pembangunan hunian rakyat dapat berjalan sesuai

target yang telah ditetapkan pemerintah pusat. •





DARI KANTOR KE RUMAH, ASN SUMUT MASUK ERA KERJA HEMAT ENERGI

Transformasi birokrasi tak lagi sekadar soal absensi, tetapi juga efisiensi energi, disiplin mobilitas, dan pelayanan publik yang tetap prima.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai memasuki babak baru dalam transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN). Mulai Jumat, 10 April 2026, kebijakan work from home (WFH) satu hari setiap pekan resmi diberlakukan bagi ASN Pemprov Sumut dengan skema 50 persen bekerja dari rumah dan 50 persen bekerja dari kantor.

Kebijakan ini menjadi tindak lanjut arahan pemerintah pusat dalam upaya penghematan energi nasional.

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan bahwa fleksibilitas kerja tersebut tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik.

"50 persen WFH, 50 persen WFO, namun tidak boleh mengganggu kegiatan pelayanan dan operasional seperti rumah sakit maupun layanan di daerah. Ini tidak boleh terganggu," ujar Bobby kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin 6 April 2026.

Menurut Bobby, esensi kebijakan ini bukan sekadar mengurangi kehadiran fisik di kantor, tetapi menciptakan pola kerja yang lebih efisien, terutama dalam penggunaan energi dan bahan bakar minyak (BBM).

la menilai efektivitas kebijakan baru bisa diukur setelah berjalan beberapa waktu. Karena itu, Pemprov Sumut bersama pemangku kepentingan terkait, termasuk sektor energi dan transportasi, akan melakukan pemantauan berkala terhadap dampaknya.

"Yang pasti tujuan utamanya penghematan dan efisiensi. Tugas kita adalah membuat kebijakan ini benar-benar efektif," katanya.

Bobby juga mengingatkan agar ASN tidak menyalahgunakan hari WFH untuk aktivitas di luar rumah yang justru meningkatkan mobilitas dan konsumsi BBM.

One Day No Car Jadi Simbol Perubahan Perilaku ASN

Selain pola kerja hybrid, Pemprov Sumut juga mulai menguatkan kebijakan one day no car, yakni satu hari tanpa kendaraan pribadi bagi ASN. Program ini ditegaskan sebagai bagian dari transformasi budaya kerja birokrasi yang lebih tertib, efisien, dan berwawasan lingkungan.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi

Sumut, Sulaiman Harahap, menekankan bahwa kebijakan ini tidak boleh dipandang sebagai gerakan simbolis semata.

"Budaya kerja ASN bukan hanya perubahan cara berpikir, melayani, dan berkoordinasi, tetapi juga menyangkut perilaku keseharian aparatur," ujar Sulaiman saat menjadi keynote speaker Webinar Transformasi Budaya Kerja ASN di Kantor Gubernur Sumut.

Kebijakan tersebut telah dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Sumut Nomor 000.8.6.1/001/IV/2026 tertanggal 2 April 2026. Regulasi ini menjadi pijakan perubahan pola mobilitas ASN menuju penggunaan transportasi yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan.

Sulaiman menjelaskan, manfaat strategis program ini tidak hanya men-

daerah.

Pemprov Sumut menegaskan implementasi kedua kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap, terukur, dan menyesuaikan karakteristik wilayah serta kebutuhan pelayanan publik.

Langkah ini dinilai menjadi model baru birokrasi modern: tidak hanya fokus pada efektivitas kerja, tetapi juga memperhatikan efisiensi energi, lingkungan, dan kualitas hidup perkotaan.

Jika berjalan konsisten, kebijakan WFH dan one day no car berpotensi menjadi prototype transformasi budaya kerja ASN di daerah, sekaligus mendukung agenda nasional menuju birokrasi yang adaptif dan berkelanjutan.

Pengamat transportasi perkotaan dari Universitas Sumatera Utara, Dr. M. Rasyid Harahap, menilai langkah Pemprov



dukung penghematan energi, tetapi juga membantu mengurangi polusi udara dan kepadatan lalu lintas, khususnya di kawasan pusat pemerintahan dan perkotaan.

"Ini juga menjadi upaya membangun budaya pemanfaatan transportasi publik yang lebih baik, sekaligus membentuk karakter ASN yang disiplin, adaptif, dan berwawasan lingkungan," katanya.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara per akhir 2025, jumlah ASN di lingkungan Pemprov Sumut mencapai 36.036 orang, terdiri dari 20.897 ASN dan 15.139 PPPK. Dengan jumlah sebesar itu, perubahan pola kerja dan mobilitas diyakini dapat memberi dampak signifikan terhadap konsumsi energi harian pemerintah

Sumut cukup progresif jika diikuti pengawasan yang konsisten.

"WFH dan one day no car akan efektif jika indikatornya jelas, misalnya penurunan konsumsi BBM dinas, berkurangnya kepadatan lalu lintas di pusat kota, dan tidak turunnya kualitas layanan publik," ujarnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menyebutkan pola kerja fleksibel dapat menjadi instrumen efisiensi energi sektor pemerintahan bila diiringi perubahan perilaku.

"Penghematan terbesar bukan hanya dari gedung perkantoran, tetapi dari berkurangnya mobilitas harian pegawai. Ini berdampak langsung pada konsumsi BBM dan emisi," katanya. ●

Swasembada Pangan Jateng

SURPLUS BERAS TERJAGA, DISTRIBUSI JADI KUNCI

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat langkah menuju swasembada pangan 2026 melalui strategi terukur yang berbasis data lapangan, peningkatan produktivitas, serta penguatan distribusi antardaerah.

Pendekatan ini dijalankan secara terintegrasi oleh Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Jawa Tengah dengan fokus pada komoditas pangan strategis dan keberlanjutan usaha tani.

Kepala Distanak Jawa Tengah, De-fransisco Dasilva Tavares, mengatakan capaian produksi pada awal 2026 menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan meski masih berada pada fase awal musim tanam.

"Yang perlu menjadi perhatian berikutnya adalah distribusi agar surplus ini bisa merata, dan menjaga stabilitas harga," ujarnya.

Hingga April 2026, produksi padi Jawa Tengah telah mencapai 4,16 juta ton dari target 10,55 juta ton gabah kering giling (GKG) atau sekitar 39,48 persen. Sementara produksi jagung tercatat 984.959 ton dari target 3,7 juta ton, se-

tara 26,62 persen.

Untuk komoditas kedelai, realisasi produksi masih berada di tahap awal, yakni 762 ton dari target 52.790 ton atau sekitar 1,44 persen. Meski demikian, pemerintah optimistis akselerasi tanam pada semester berikutnya akan mendorong kenaikan produksi yang lebih signifikan.

Di sektor hortikultura, bawang merah mencatat produksi 144.705 ton atau 23,45 persen dari target tahunan. Cabai juga menunjukkan tren positif dengan realisasi 80.892 ton, setara 17,72 persen dari target.

Sementara itu, sektor peternakan turut memberikan kontribusi penting terhadap ketahanan pangan daerah. Produksi telur mencapai 238.154 ton, sedangkan produksi daging telah menyentuh 311.042 ton atau sekitar 33 persen dari target. Adapun produksi susu tercatat



17.928 ton, atau 23,41 persen dari target 76.570 ton.

Data neraca pangan hingga Maret 2026 menunjukkan kondisi Jawa Tengah masih relatif aman. Surplus beras tercatat mencapai 702.409 ton, sementara komoditas daging dan telur juga berada dalam posisi surplus sehingga kebutuhan masyarakat tetap terjaga.

Untuk memastikan target tercapai, Pemprov Jateng menyalurkan bantuan benih dan sarana produksi bagi sejumlah komoditas utama. Program tersebut mencakup bantuan untuk tanaman padi seluas 47.200 hektare, jagung 3.200 hektare, kedelai 3.000 hektare, serta dukungan bagi cabai dan bawang merah.

Intervensi juga diperluas ke sektor perkebunan melalui penguatan budidaya tebu, kopi, dan kelapa, sehingga kontribusi subsektor pertanian terhadap ekonomi daerah semakin merata.

Di sisi infrastruktur, rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan pembangunan sistem irigasi perpipaan terus dipercepat untuk menjaga kontinuitas pasokan air, terutama menjelang musim kemarau. Modernisasi pertanian juga diperkuat lewat distribusi alat dan mesin pertanian, mulai dari traktor, pompa air, hingga combine harvester.

Perlindungan petani menjadi aspek yang tidak kalah penting. Pemerintah memperluas program asuransi usaha tani, subsidi pembiayaan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, serta layanan kesehatan hewan melalui vaksinasi dan pengobatan rutin.

Menurut Frans, pendekatan tersebut menegaskan bahwa kebijakan swasembada tidak semata mengejar angka produksi, tetapi juga membangun sistem pertanian yang tangguh dari hulu hingga hilir.

Penguatan kemitraan antara petani, koperasi, pelaku usaha, dan pemerintah daerah kini menjadi fokus lanjutan untuk memastikan hasil panen terserap optimal dan distribusi antardaerah berjalan lancar.

Langkah ini dinilai sejalan dengan arah kebijakan Pemprov Jateng yang sejak akhir 2025 telah menyiapkan sedikitnya 14 program penunjang swasembada pangan 2026, mulai dari produktivitas lahan, penguatan infrastruktur, hingga

pengendalian harga pangan.

Pengamat pertanian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dalam berbagai kajian ketahanan pangan, menilai keberhasilan swasembada daerah sangat ditentukan oleh tiga faktor utama: produktivitas lahan, efisiensi logistik, dan kestabilan harga di tingkat petani maupun konsumen.

Dalam konteks Jawa Tengah, surplus

produksi yang sudah terbentuk akan semakin kuat apabila didukung distribusi yang cepat dan serapan pasar yang terjaga.

“Dengan sinergi lintas sektor tersebut, Jawa Tengah optimistis mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional sekaligus menjadi model swasembada pangan daerah yang berkelanjutan,” ungkapnya. ●



KERAHKAN 7.500 LASKAR TANAH, JATIM KEPUNG SENGGKETA DARI AKAR

Di tengah masih banyaknya persoalan sengketa lahan, tumpang tindih batas tanah, hingga aset sosial keagamaan yang belum memiliki kepastian hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memilih bergerak lebih cepat.

Bukan hanya melalui jalur birokrasi formal, tetapi juga lewat pendekatan kolaboratif yang melibatkan ribuan relawan dari kalangan santri dan mahasiswa.

Langkah itu ditegaskan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur dengan Universitas KH Abdul Chalim di lingkungan Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Surabaya, 9 April 2026.

Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat tanah wakaf, aset organisasi keagamaan, dan aset milik pemerintah daerah.

Bagi Khofifah, percepatan sertifikasi tanah tidak lagi bisa hanya mengandalkan pola kerja administratif konvensional. Persoalan pertanahan di lapangan kerap lebih kompleks: batas lahan yang kabur, dokumen yang tercecer, hingga lemahnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya legalitas aset.

"Percepatan sertifikasi tanah membutuhkan dukungan SDM yang kuat. Melalui kerja sama ini, kita ingin memastikan

ada tambahan tenaga yang bisa mempercepat proses di lapangan," ujarnya.

Pernyataan itu menegaskan satu hal, persoalan agraria bukan sekadar urusan legal-formal, tetapi juga menyangkut tata kelola aset, perlindungan hak masyarakat, dan pencegahan konflik sosial jangka panjang.

7.500 Laskar Karomah di Garda Depan

Dari kerja sama tersebut, lahir kekuatan baru yang disebut Laskar Karomah sekitar 7.500 relawan yang berasal dari unsur santri dan mahasiswa. Mereka disiapkan untuk membantu percepatan sertifikasi berbagai jenis bidang tanah, mulai dari hak milik, tanah wakaf, hingga aset rumah ibadah lintas agama.

Secara editorial, model ini menarik karena mempertemukan pendekatan teknokratis pertanahan dengan modal sosial keagamaan yang selama ini sangat kuat di Jawa Timur. Basis pesantren dan kampus dinilai efektif menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini sulit disentuh percepatan administrasi.

Khofifah menyebut model ini lahir dari evaluasi serius terhadap kebutuhan di



lapangan.

“Setelah evaluasi secara serius, kami menemukan format percepatan sertifikasi yang efektif. PKS ini menjadi dasar pelaksanaannya dan dikomandani langsung oleh Kanwil BPN dengan melibatkan organisasi keagamaan serta masyarakat luas,” katanya.

Kehadiran relawan juga dinilai mampu memangkas hambatan klasik berupa keterbatasan tenaga verifikator dan pendamping di lapangan.

Mengunci Sengketa dari Hulu

Yang menarik, percepatan ini tidak berhenti pada penambahan tenaga relawan. Pemprov Jatim bersama BPN juga menyiapkan dua gerakan berbasis partisipasi masyarakat, Gerakan Bersama Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gema Patas) dan Gerakan Bersama Pengumpulan Data Yuridis (Gema Puldadis).

Kedua gerakan ini berfungsi mengunci potensi sengketa sejak awal bahkan sebelum sertifikat diterbitkan.

Di banyak daerah, sengketa lahan kerap bermula dari persoalan sederhana, patok bergeser, batas tidak pernah disepakati, atau dokumen kepemilikan tidak tersip dengan baik. Ketika nilai tanah meningkat, konflik pun mudah muncul.

“Kalau batas bidang lahan tidak jelas dan data yuridis tidak terverifikasi, maka sangat berpotensi menimbulkan sengketa. Bahkan patok tanah bisa berpindah,” tegas Khofifah.

Pendekatan berbasis tanda batas ini penting terutama untuk aset wakaf, tanah lembaga pendidikan, dan rumah ibadah yang sering kali diwariskan lintas generasi dengan dokumentasi terbatas.

Pengamanan Aset Daerah dan Sosial

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 574 sertifikat diserahkan, terdiri atas sertifikat tanah wakaf, aset organisasi keagamaan, serta aset pemerintah daerah. Dari jumlah itu, 30 sertifikat merupakan aset milik Pemprov Jatim dengan total luas mencapai 101 ribu meter persegi yang tersebar di Kabupaten Blitar, Pamekasan, dan Probolinggo.

Bagi pemerintah daerah, legalisasi aset bukan hanya soal administrasi, tetapi juga strategi pengamanan kekayaan negara. Banyak aset daerah yang sela-

ma bertahun-tahun rawan klaim karena belum memiliki dokumen formal.

Sertifikasi menjadi instrumen penting agar aset tidak menyusut, berpindah tangan, atau masuk dalam sengketa yang berlarut.

Kepala Kanwil BPN Jawa Timur Asep Heri menyebut kerja sama ini sebagai jawaban atas keterbatasan SDM di inter-

Pembagian tugas relawan pun dibuat spesifik. Sebagian fokus pada data fisik, seperti pemasangan patok dan verifikasi batas lahan. Sisanya bertugas pada data yuridis, mulai dari pengumpulan bukti kepemilikan, akta wakaf, hingga dokumen legal pendukung lainnya.

Apa yang dilakukan Jawa Timur menunjukkan bahwa percepatan ser-



nal lembaganya.

“Melalui perjanjian kerja sama ini, kita merancang bagaimana memiliki tambahan SDM untuk membantu percepatan sertifikasi, termasuk melibatkan unsur sosial keagamaan seperti NU dan Muslimat NU,” ujarnya.

Asep menambahkan, Jawa Timur membidik target ambisius, 40 ribu sertifikat tanah wakaf dan tempat ibadah tuntas sepanjang 2026. Untuk mendukung target tersebut, seluruh relawan akan menjalani pelatihan teknis di Pacet, Mojokerto.

tifikasi tanah bisa menjadi model baru tata kelola agraria, negara hadir, tetapi masyarakat ikut bekerja.

Di tengah meningkatnya nilai ekonomi lahan dan risiko konflik kepemilikan, strategi ini bukan hanya mempercepat penerbitan sertifikat, melainkan juga memperkuat perlindungan hak masyarakat, lembaga sosial, dan aset pemerintah.

Jika model kolaboratif ini konsisten, Jawa Timur berpotensi menjadi contoh nasional dalam reformasi layanan pertanahan berbasis partisipasi publik. ●

EKONOMI JADI POROS BARU BANDUNG BARAT 2027

Di tengah tekanan ekonomi global, kebutuhan lapangan kerja yang terus tumbuh, dan tuntutan pemerataan layanan dasar, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memilih satu poros utama untuk tahun 2027, penguatan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah.

Pilihan arah itu ditegaskan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di BBPMP Batujajar. Bagi Jeje, forum ini bukan sekadar agenda tahunan birokrasi, melainkan titik penentu bagaimana wajah Bandung Barat dibentuk dalam tiga tahun ke depan.

"Musrenbang RKPD merupakan tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah agar selaras dengan kebutuhan masyarakat," ujar Jeje dalam sambutannya.

Nada optimisme itu bukan tanpa dasar. Tahun 2027 merupakan fase ketiga pelaksanaan RPJMD 2025-2029 yang membawa visi "AMANAH" Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis. Karena itu, perencanaan pembangunan didorong lebih presisi, terukur, berdampak, dan mampu menjawab kebutuhan warga lintas wilayah dari Ngamprah hingga Lembang.

Pemkab Bandung Barat datang ke meja perencanaan dengan sejumlah



modal sosial-ekonomi yang cukup menjanjikan.

"Hingga 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 71,65, ditopang angka harapan hidup 75,44 tahun," jelasnya.

Di bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah mencapai 8,34 tahun, sementara harapan lama sekolah menyentuh 12,26 tahun, menandakan akses pendidikan menengah makin terbuka.

Dari sisi ekonomi, pertumbuhan daerah mencapai 5,28 persen, lebih tinggi dibanding sejumlah daerah penyangga

lain di kawasan metropolitan Bandung Raya. Pada saat yang sama, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 10,49 persen menjadi 9,98 persen, sementara tingkat pengangguran turun ke 6,60 persen.

Angka-angka tersebut menjadi fondasi penting, tetapi Jeje menilai capaian statistik belum cukup jika belum menyentuh pemerataan kesejahteraan.

Karena itu, tema pembangunan 2027 ditetapkan sebagai "Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah dalam Rangka Pemerataan Kesejahteraan

Masyarakat.”

Tema ini menempatkan pertumbuhan ekonomi bukan sebagai tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mempersempit kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan kualitas hidup warga.

Di Bandung Barat, isu daya saing tak bisa dilepaskan dari infrastruktur. Topografi wilayah yang luas, kawasan wisata yang terus berkembang, sentra pertanian, hingga kawasan permukiman baru membutuhkan konektivitas yang lebih baik.

Karena itu, RKPD 2027 memprioritaskan pembangunan jalan penghubung, infrastruktur pelayanan dasar, digitalisasi layanan publik, dan akses kawasan produktif.

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat R. Eriska Hendrayana menegaskan, seluruh usulan pembangunan yang masuk telah melalui tahapan sinkronisasi dari tingkat desa hingga kecamatan melalui pra-Musrenbang.

“Ini adalah wahana untuk memadankan aspirasi masyarakat dari tingkat desa dan kecamatan ke dalam perencanaan daerah, sesuai prinsip partisipasi publik dan prioritas yang nyata,” ujarnya.

Pendekatan ini penting agar pembangunan tidak lagi terjebak pada proyek yang bersifat simbolik, tetapi benar-benar menjadi solusi atas hambatan mobilitas, distribusi hasil pertanian, dan akses layanan dasar masyarakat.

Dalam penyusunan RKPD 2027, Pemkab Bandung Barat menegaskan lima pilar utama pembangunan.

Pertama, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan pendidikan, kesehatan, dan pembentukan karakter.

Kedua, pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis sektor unggulan seperti pariwisata, UMKM, pertanian, dan ekonomi kreatif.

Ketiga, tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan inovatif.

Keempat, akselerasi konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur strategis.

Kelima, lingkungan hidup berkelanjutan, terutama untuk menjaga keseimbangan kawasan konservasi, wisata, dan permukiman.

Kelima pilar ini memperlihatkan bahwa Pemkab tidak hanya mengejar

pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah.

Kemiskinan dan Stunting Tetap Jadi Ujian

Meski indikator makro membaik, dua

strategi yang lebih terintegrasi, mulai dari pengurangan beban pengeluaran rumah tangga, peningkatan pendapatan keluarga, perlindungan sosial yang inklusif, hingga intervensi kesehatan ibu dan anak berbasis wilayah prioritas.

Langkah ini penting agar pertumbuhan



isu tetap menjadi ujian utama kantong kemiskinan dan prevalensi stunting.

Pemerintah daerah menyiapkan

ekonomi tidak berhenti di angka statistik, tetapi benar-benar mengubah kualitas hidup kelompok paling rentan. ●

BANTEN BIDIK LEGACY EMAS DARI PON 2032

Provinsi Banten sedang memainkan sebuah langkah besar yang bisa mengubah wajah pembangunan daerah untuk satu dekade ke depan.

Pencalonan bersama Provinsi Lampung sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII Tahun 2032 kini bukan lagi sekadar agenda olahraga, melainkan strategi percepatan infrastruktur, penguatan ekonomi kawasan, hingga pembentukan identitas baru Banten sebagai episentrum sport tourism nasional.

Gubernur Andra Soni menegaskan, ambisi menjadi tuan rumah PON harus dibaca sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan provinsi. Ajang olahraga terbesar di Indonesia itu diyakini mampu mendorong modernisasi venue, mempercepat konektivitas jalan, serta memperluas ekosistem pembinaan atlet dari level usia dini hingga elite.

Pernyataan itu disampaikan Andra Soni saat menghadiri final Turnamen Tennis Piala Gubernur Banten 2026 di UH Tennis Center, Kota Serang, Minggu 12 April 2026, di tengah menguatnya optimisme setelah tim penyaringan KONI Pusat menyelesaikan visitasi lapangan.

"Bagi kami ini penting dalam rangka

membangun infrastruktur. Supaya kita tidak terlalu tertinggal jauh dari Jakarta. Juga dalam mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga," ujar Andra Soni.

PON sebagai Mesin Percepatan Pembangunan

Di balik pencalonan ini, terdapat agenda pembangunan yang jauh lebih besar daripada sekadar penyelenggaraan pertandingan. Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan pengembangan sport center terintegrasi yang mencakup venue akuatik, tenis, bela diri, hoki, hingga lapangan tembak. Seluruh proyek itu diposisikan sebagai warisan jangka panjang bagi pembinaan atlet daerah.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Banten Ahmad Syauckani menyebut sebagian besar venue yang diajukan bahkan telah memenuhi standar kelayakan awal.

"Alhamdulillah, sekitar 70 persen venue diterima dan dinilai layak untuk PON 2032," ujarnya.



Data ini menjadi modal strategis, terutama karena Banten memiliki keunggulan geografis sebagai wilayah penyangga Jakarta dengan akses langsung ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, jaringan tol, pelabuhan, dan venue olahraga modern.

Bagi kalangan akademisi olahraga, pencalonan ini berpotensi menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru. Pengamat kebijakan olahraga Edit Tirna, akademisi yang fokus pada sport policy, menilai PON dapat memperkuat identitas Banten sebagai destinasi sport tourism dan memperluas dampak ke sektor UMKM, hotel, transportasi, hingga industri kreatif.

Efek berganda dari event berskala nasional seperti PON biasanya menjangkau peningkatan okupansi hotel dan homestay, lonjakan konsumsi sektor kuliner, perluasan pasar merchandise olahraga, pertumbuhan ekonomi mikro di sekitar venue hingga peningkatan nilai investasi kawasan.

Di level internal pemerintahan, turnamen tenis yang digelar Pemprov Banten juga menjadi simbol konsolidasi elite daerah. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memanfaatkan olahraga sebagai ruang informal untuk membangun komunikasi strategis lintas institusi.

"Ini penting karena banyak hal bisa didiskusikan sambil santai, seperti bermain tenis," kata Andra.

Pendekatan ini dinilai efektif dalam memperkuat soliditas kebijakan menjelang agenda besar seperti PON yang membutuhkan sinergi lintas OPD, aparat keamanan, dunia usaha, dan legislatif.

Kapolda Banten Irjen Hengki, yang dikenal sebagai pegiat tenis, menyoroti besarnya potensi atlet muda Banten yang mulai bersinar di level nasional.

"Ada Raya usia 9 tahun peringkat satu nasional KU-12, juga Maulasaya yang masuk seleksi nasional KU-16. Banyak atlet berprestasi yang harus menjadi kebanggaan Banten," ujarnya.

Ia mendorong skema bapak angkat dari sektor industri besar yang memang tumbuh pesat di kawasan Banten, terutama Tangerang dan Cilegon, agar pembinaan atlet memiliki dukungan finansial yang berkelanjutan.

PON 2032 pada akhirnya menjadi le-

bih dari sekadar pesta olahraga. Ini adalah pertarungan identitas daerah, apakah Banten mampu naik kelas dari provinsi penyangga menjadi pusat pertumbuhan olahraga nasional.

Dengan status sebagai calon tunggal bersama Lampung, peluang itu terbuka lebar. Namun Andra Soni mengingatkan seluruh jajaran agar tidak cepat puas

dan tetap fokus pada pemenuhan administrasi, kesiapan venue, serta pembinaan kontingen.

Jika seluruh proses berjalan sesuai peta jalan, Banten tidak hanya akan menjadi tuan rumah yang sukses, tetapi juga meninggalkan warisan pembangunan olahraga yang dapat dinikmati masyarakat jauh setelah api PON padam. ●



PEMROV DKI PERKUAT PENGAWASAN DIGITAL WFH ASN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memasuki babak baru transformasi budaya kerja birokrasi dengan menerapkan kebijakan *work from home* (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat.

Kebijakan ini ditegaskan melalui Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Nomor 3/SE/2026 tentang Transformasi Budaya Kerja, yang ditandatangani Gubernur Pramono Anung sebagai tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat mengenai efisiensi energi, digitalisasi birokrasi, dan pola kerja fleksibel ASN nasional.

Dalam skema yang mulai diterapkan pekan pertama April 2026, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diberikan ruang untuk menyesuaikan proporsi pegawai yang bekerja dari rumah, dengan kuota minimal 25 persen hingga maksimal 50 persen pada unit kerja terkecil.

Namun kebijakan ini tidak diberlakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik tugas, tingkat urgensi layanan, serta kebutuhan pelayanan publik di masing-masing OPD.

"WFH ini sudah saya tandatangani

SE Gubernur-nya. Masing-masing OPD bisa menerapkan 25 sampai 50 persen pegawainya untuk WFH. Dan mereka kita pantau, kita monitor dengan sistem yang sedang dikembangkan," kata Pramono di Balai Kota, Selasa 7 April 2026.

Pemrov DKI menetapkan persyaratan ketat agar kebijakan ini tidak menu-

runkan disiplin dan kualitas layanan. ASN yang dapat mengikuti skema WFH wajib memenuhi sejumlah indikator, antara lain memiliki masa kerja lebih dari dua tahun, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran, memiliki indikator kinerja yang terukur dan jenis tugas me-

mungkinkan dikerjakan secara fleksibel dari rumah.

"Seleksi dilakukan oleh pimpinan unit kerja masing-masing agar penerapan kebijakan tetap berbasis kebutuhan organisasi, bukan semata hak pegawai," jelas Pramono.

Seleksi dilakukan oleh pimpinan unit kerja masing-masing agar penerapan kebijakan tetap berbasis kebutuhan organisasi, bukan semata hak pegawai.



Meski bekerja dari rumah, ASN tetap terikat penuh pada disiplin kerja. Pegawai yang menjalani WFH wajib melakukan presensi mobile dua kali sehari, yakni pada pukul 06.00–08.00 WIB dan 16.00–18.00 WIB.

Selain itu, selama jam kerja 07.30–16.30 WIB, pegawai harus tetap siaga, responsif, dan dapat dihubungi sewaktu-waktu. Laporan capaian kerja harian juga wajib disampaikan kepada atasan langsung sebagai bagian dari pengawasan output.

Pramono menegaskan fleksibilitas lokasi kerja tidak boleh diartikan sebagai kelonggaran terhadap produktivitas.

“Produktivitasnya harus tetap terjaga dengan baik,” ujarnya.

Salah satu aspek paling menonjol dari kebijakan ini adalah penguatan pengawasan berbasis teknologi. Pemprov DKI tengah mengembangkan dashboard monitoring digital yang memungkinkan pimpinan OPD memantau kehadiran, progres tugas, dan capaian target pegawai secara real time.

Sistem ini diproyeksikan menjadi fondasi baru budaya kerja ASN yang lebih berbasis output ketimbang sekadar kehadiran fisik.

Menurut Pemprov, kepala perangkat daerah juga diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan WFH setiap bulan melalui sistem yang disiapkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.

Pemprov DKI memastikan sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap bekerja dari kantor. Unit seperti layanan kesehatan, pendidikan, kebersihan, administrasi kependudukan, dan perizinan masuk dalam daftar pengecualian.

Selain itu, pejabat pimpinan tinggi, camat, serta lurah juga tidak termasuk dalam skema WFH demi menjaga kecepatan pengambilan keputusan dan efektivitas pelayanan.

Agar tetap relevan dengan kebutuhan lapangan, kebijakan ini akan dievaluasi secara menyeluruh setiap dua bulan. “Evaluasi akan mengukur dampak WFH terhadap produktivitas, efisiensi anggaran, kepuasan layanan publik, hingga efektivitas sistem pengawasan digital,” sambungnya.

Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyesuaian kuota WFH maupun

pengembangan sistem kerja fleksibel ASN di Jakarta ke depan.

Diketahui Penerapan WFH Jumat di DKI Jakarta bukan kebijakan yang berdiri sendiri. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan nasional setelah pemerintah pusat menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3

dorong pelaksanaan tugas kedinasan yang lebih efisien, efektif, adaptif, dan berbasis digital, sehingga dapat meningkatkan produktivitas ASN dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan,” ujar Rini dalam keterangan resmi kementerian.

Sementara itu, Menteri Koordina-



Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah, yang berlaku mulai 1 April 2026.

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa pola kerja fleksibel dirancang sebagai instrumen reformasi birokrasi modern yang mengedepankan efisiensi, produktivitas, dan tata kelola digital.

“Melalui kebijakan ini, kami men-

tor Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut kebijakan WFH satu hari sepekan diproyeksikan menjadi salah satu instrumen efisiensi nasional, terutama dalam menekan konsumsi BBM dan biaya operasional pemerintah.

“WFH diproyeksikan menjadi salah satu instrumen efisiensi nasional, terutama menekan konsumsi BBM dan biaya operasional pemerintah,” tegasnya. •

Transparansi Anggaran Kaltim Diuji **RP25 MILIAR UNTUK KENYAMANAN PEMIMPIN**

Polemik anggaran lebih dari Rp25 miliar untuk penataan rumah jabatan, ruang kerja, serta fasilitas penunjang Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur menjadi perhatian luas publik.

Besarnya nilai belanja yang tercatat dalam 57 item pengadaan memunculkan perdebatan mengenai urgensi penggunaan APBD di tengah tuntutan efisiensi dan prioritas pelayanan masyarakat.

Berdasarkan data pengadaan daerah, sejumlah pos anggaran yang paling menonjol meliputi rehabilitasi ruang kantor gubernur sekitar Rp6 miliar, renovasi rumah jabatan gubernur Rp3 miliar, serta rehabilitasi ruang kerja wakil gubernur Rp1,2 miliar.

Selain itu, terdapat pengadaan meubelair yang nilainya mendekati Rp1 miliar, videotron lebih dari Rp700 juta, peralatan dapur di atas Rp600 juta, hingga interior ruang kebugaran dan biliar senilai Rp195 juta.

Salah satu item yang paling menyita perhatian publik ialah pengadaan akuarium air laut di rumah jabatan kepala daerah senilai Rp195 juta. Di tengah berbagai sorotan tersebut, pemerintah daerah menegaskan seluruh penge-

luan itu merupakan bagian dari upaya mengembalikan fungsi aset negara yang lama tidak digunakan.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menegaskan kondisi rumah jabatan memang membutuhkan pembenahan menyeluruh karena sudah lama tidak ditempati.

Menurut Rudy, banyak fasilitas dasar yang sudah tidak layak pakai, mulai dari perangkat elektronik, pencahayaan, toilet, hingga furnitur.

"Mulai banyak sekali yang tidak ada, elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahi, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisi-televisinya, sofa-sofanya sudah tidak layak," kata

Rudy usai rapat di Gedung DPR RI, Selasa 7 April 2026.

la menambahkan, pembenahan dilakukan agar kompleks rumah jabatan kembali representatif untuk menerima agenda resmi pemerintahan, tamu daerah, hingga kegiatan lintas kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.

Rudy juga menepis anggapan bahwa anggaran Rp25 miliar



hanya digunakan untuk satu bangunan. Ia menyebut pembiayaan itu juga mencakup rumah jabatan wakil gubernur, pendopo, ruang penerima tamu, hingga guest house dalam satu kawasan.

"Jadi intinya kalau Rp25 miliar itu tidak hanya untuk rumah gubernur saja, tapi juga wakil gubernur dan pendopo-pendopo yang ada di situ karena ada guest house-nya," ujarnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal, yang menjelaskan bahwa total Rp25 miliar merupakan akumulasi multi-tahun, bukan belanja satu kali untuk satu objek fisik.

Menurut Faisal, pembiayaan berasal dari beberapa skema anggaran, yaitu APBD Murni 2024, APBD Murni 2025, APBD Perubahan 2025 (ABT) dan pengeseran anggaran sesuai kebutuhan mendesak.

Ia merinci alokasi tersebut terbagi ke dalam tiga kelompok besar:

1. Rumah Jabatan Gubernur sekitar Rp12 miliar
Terdiri atas 35 item pekerjaan, meliputi rehabilitasi bangunan, pemeliharaan rutin, pengadaan furnitur, peralatan dapur, sistem pemadam kebakaran serta penggantian perangkat elektronik
2. Kantor Gubernur - sekitar Rp8,2 miliar
Dialokasikan untuk 5 item kegiatan penataan ruang kerja, agar lebih fungsional dan mendukung mobilitas kerja pimpinan.
3. Rumah Jabatan Wakil Gubernur - sekitar Rp4,9 miliar
Mencakup 17 item rehabilitasi dan fasilitas penunjang.

Selain pekerjaan fisik, anggaran tersebut juga termasuk jasa perencanaan, konsultan pengawas, dan pemeliharaan tahunan.

"Kami ingin meluruskan persepsi agar tidak dianggap anggaran tersebut habis hanya untuk satu rumah dinas. Ini bagian dari perawatan aset negara dan persiapan fasilitas kerja pimpinan daerah yang baru," jelas Faisal di Samarinda.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Mulawarman, Dr. Budiman Rahman, menilai renovasi aset negara pada prinsipnya sah selama memenuhi asas kepatutan, kebutuhan, dan transparansi.

Menurutnya, yang menjadi perhatian publik bukan semata besarnya, melainkan prioritas penggunaan anggaran di tengah kebutuhan layanan publik yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar masyarakat.

"Belanja fasilitas pimpinan daerah memang bagian dari kebutuhan operasional pemerintahan, tetapi harus dijelaskan

dar estetika atau simbol jabatan.

Polemik ini menjadi ujian penting bagi Pemrov Kaltim dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan APBD. Transparansi rincian belanja, alasan teknis rehabilitasi, dan manfaat langsung terhadap fungsi pemerintahan akan menjadi kunci dalam meredam persepsi negatif masyarakat.

Di satu sisi, pemerintah berargumen



secara transparan agar publik memahami urgensi dan manfaatnya," ujarnya.

Pandangan serupa juga relevan dengan prinsip efisiensi belanja daerah yang terus ditekankan Kementerian Dalam Negeri, terutama agar seluruh pengeluaran berbasis kebutuhan riil, bukan seka-

renovasi merupakan langkah normal untuk menghidupkan kembali aset lama yang terbengkalai. Namun di sisi lain, masyarakat tetap menuntut agar setiap rupiah belanja daerah memiliki nilai manfaat yang terukur dan berpihak pada kepentingan publik yang lebih luas. ●



RATU DEWA DAN GERAKAN NAIK BUS ASN

Langkah berbeda ditunjukkan Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, yang memilih meninggalkan kendaraan dinas dan berangkat kerja menggunakan transportasi umum pada Selasa 7 April 2026.

Aksi ini bukan sekadar simbol kepemimpinan, melainkan bagian dari gerakan perubahan budaya mobilitas aparatur sipil di Kota Palembang menuju pola transportasi yang lebih hemat energi, efisien, dan ramah lingkungan.

Berangkat dari kediamannya di kawasan Jalan Tanjung Barangan, Ratu Dewa menaiki layanan Teman Bus sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan kota menuju Rumah Dinas Wali Kota di Jalan Tasik.

Di sepanjang perjalanan, ia memanfaatkan momentum tersebut untuk berdialog langsung dengan masyarakat pengguna transportasi publik, menyerap masukan mengenai kenyamanan, ketepatan waktu, hingga konektivitas antarmoda.

Menurut Ratu Dewa, langkah itu merupakan bentuk konsistensi Pemerintah Kota Palembang terhadap kebijakan efisiensi energi yang telah digulirkan sejak 2025.

"Langkah ini merupakan bentuk konsistensi dari surat edaran sejak 2025. Kita ingin mengubah budaya kerja, mengurangi kemacetan, sekaligus menekan konsumsi BBM," ujar Ratu Dewa.

Kebijakan Resmi ASN: Selasa Pertama Wajib Naik Transportasi Umum

Gerakan tersebut tidak berhenti pada aksi personal wali kota. Pemerintah Kota Palembang memperkuatnya melalui ke-

bijakan resmi yang mewajibkan seluruh ASN menggunakan transportasi umum setiap Selasa pertama di awal bulan.

Dengan jumlah aparatur yang mendekati 23 ribu pegawai, kebijakan ini diproyeksikan memberi dampak nyata terhadap penurunan penggunaan kendaraan pribadi, khususnya pada jam sibuk pagi hari.

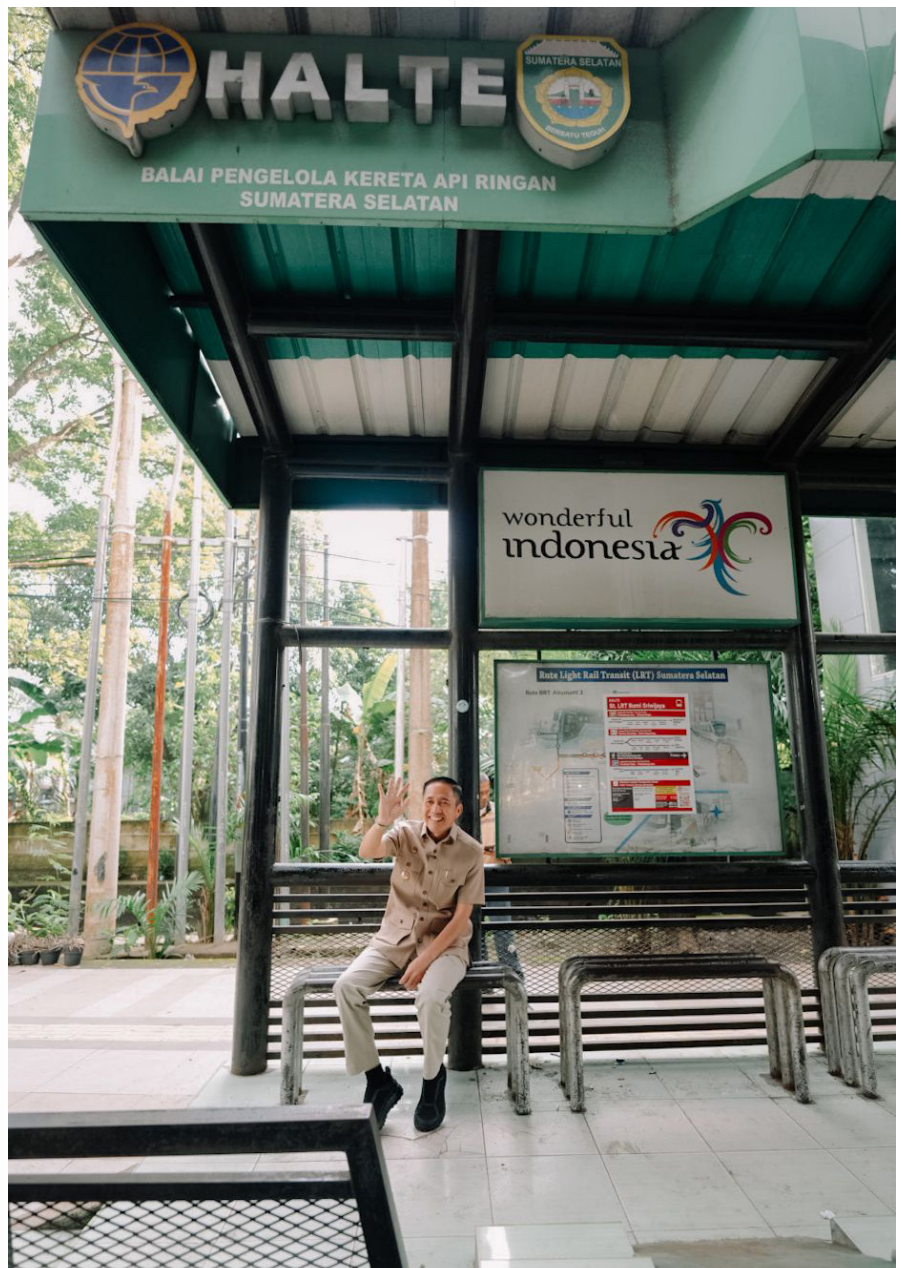
"Efek berantai yang diharapkan bukan hanya penghematan bahan bakar minyak, tetapi juga pengurangan kepadatan lalu lintas di koridor utama kota," kata

Ratu Dewa.

Secara kebijakan nasional, langkah ini selaras dengan arah penguatan transportasi massal perkotaan yang selama ini terus didorong Kementerian Perhubungan, terutama melalui pengembangan layanan bus bersubsidi dan integrasi antarmoda di kota-kota besar Indonesia.

Efisiensi Energi Sekaligus Perubahan Gaya Hidup

Semangat serupa juga digaungkan di lingkungan Dinas Komunikasi dan



Informatika Palembang, di mana jajaran pegawai mulai membiasakan diri bersepeda menuju kantor.

Inisiatif yang dipimpin Kepala Dinas Kominfo, Adhi Zahri, dipandang sebagai langkah konkret untuk membangun budaya kerja sehat sekaligus rendah emisi.

Penggunaan sepeda dan transportasi publik dinilai menjadi kombinasi strategis dalam mendukung agenda pembangunan kota berkelanjutan.

“Selain mengurangi ketergantungan terhadap BBM, pola mobilitas ini berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon perkotaan, peningkatan kualitas udara, dan kesehatan pegawai,” ungkap Adhi.

Dari perspektif energi, langkah pengurangan kendaraan pribadi sejalan dengan agenda nasional efisiensi konsumsi BBM yang terus didorong pemerintah melalui sektor transportasi, mengingat



transportasi masih menjadi salah satu penyumbang konsumsi energi terbesar di wilayah perkotaan.

Model Kepemimpinan yang Menyentuh Warga

Lebih dari sekadar kebijakan administratif, langkah Ratu Dewa menunjukkan model kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat. Dengan turun langsung menggunakan moda transportasi yang sama dengan warga, pemerintah memperoleh gambaran riil tentang kualitas layanan di lapangan mulai dari waktu tunggu, kepadatan penumpang, hingga

aksesibilitas halte dan trayek.

Pendekatan ini juga memberi pesan kuat bahwa transformasi transportasi kota tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga keteladanan dari pemimpin daerah.

Palembang kini menempatkan dirinya sebagai salah satu kota yang mulai serius membangun budaya baru mobilitas urban: mengurangi dominasi kendaraan pribadi, memperkuat transportasi publik, dan menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa efisiensi energi dapat dimulai dari kebiasaan sederhana berangkat kerja.

Langkah Pemerintah Kota Palembang



juga semakin relevan dengan arah kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi energi di sektor birokrasi. Hingga 2026, pemerintah pusat melalui koordinasi Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri tengah memperkuat skema penghematan energi bagi ASN, termasuk pengaturan hari tertentu untuk penggunaan transportasi umum dan

pola kerja fleksibel.

Di sejumlah daerah, kebijakan ini mulai disiapkan sambil menunggu surat edaran resmi dari pusat.

Sebagai rujukan yang sudah berjalan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih dulu menerapkan Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 yang mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Kebijakan tersebut mendapat dukungan dari Menteri PAN-RB karena dinilai mampu mendorong pembangunan transportasi publik, mengurangi emisi karbon, dan menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang

peduli lingkungan.

Dengan adanya arah kebijakan dari pemerintah pusat ini, langkah Palembang tidak lagi berdiri sebagai inisiatif daerah semata, tetapi menjadi bagian dari gerakan nasional menuju birokrasi yang hemat energi, rendah emisi, dan lebih dekat dengan layanan transportasi publik. ●



SIAP KAWAL PENCAK SILAT MENDUNIA

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) akan ikut mengawal pembinaan dan pengembangan pencak silat untuk bisa mendunia.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk menyebarkan pencak silat ke dunia, menjadikannya ikon Indonesia sebagaimana olahraga-olahraga bela diri lainnya yang telah memiliki panggung di dunia.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono sebagai Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar (PB) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) masa bakti 2026-2030. Menlu Sugiono terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) XVI IPSI Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC).

"Saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Sugiono yang menjadi Ketua IPSI secara aklamasi dan juga selamat kepada semua para pengurus demisioner yang selama ini juga bekerja luar biasa," ucap Menpora dalam sambutannya tak lama setelah Ketum Sugiono terpilih.

Dikatakan Menpora, prestasi pencak silat dalam hal perolehan medali sudah terbilang konsisten. Selain itu juga sudah sangat kuat dikenal di Indonesia, serta berkontribusi dalam pembangunan karakter masyarakat. Di satu sisi, pencak silat sebagai budaya bangsa dengan nilai-nilai leluhur juga harus tetap dijaga.

"Jadi bagaimana kita harus bisa membawa pencak silat ini ke panggung dunia, tidak kalah dengan negara-negara lain. Selama ini sudah ada 83 perwakilan pencak silat di dunia, sehingga ke depan bersama-sama antara IPSI dengan dukungan Bapak Presiden dan kami di kemenpora, kita bukan hanya mendorong event pencak silat ini lebih luas lagi, tetapi juga mengakar di Indonesia lebih luas lagi," jelas Menpora Erick.

Indonesia, lanjut Menpora Erick, tentu bisa memaksimalkan potensi pencak silat sebagaimana olahraga-olahraga bela diri lainnya yang lebih dahulu populer. Apalagi di Indonesia terdapat 840 perguruan pencak silat. Selain bisa dikem-



bangkan dari segi kebudayaan, juga bisa dari sisi ekonomi.

"Ini penting bahwa dukungan pemerintah ke depan harus lebih berdampak untuk pencak silat, termasuk dorongan secara industri, menjadi sebuah penetrasi yang lebih lebar lagi untuk tentu pembangunan secara ekonomi. Karena saya percaya yang namanya prestasi itu pasti sejalan juga dengan pembangunan secara ekonomi dan menyeluruh," kata Menpora.

Menutup sambutannya, Menpora Erick menegaskan semua pihak harus hadir dan terlibat, baik pemerintah maupun swasta. Kemenpora dalam hal ini ingin menjadi satu kesatuan dengan program sesuai arahan Presiden selama ini, khususnya membawa pencak silat menuju Olimpiade.

Sementara itu Ketua Umum PB IPSI terpilih Sugiono mengungkapkan, merupakan sebuah kehormatan, sebuah tugas dan tanggung jawab yang besar dipilih menahkodai IPSI periode 2026-2030. Khususnya dalam melanjutkan komitmen Ketum PB IPSI sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, bahwa pencak silat merupakan media untuk memperkokoh dan memperkuat kepercayaan diri bangsa, kepercayaan diri masyarakat Indonesia.

"Saya rasa itu merupakan tanggung jawab yang besar yang harus dilakukan oleh IPSI, selain juga di luar tanggung jawab dan tugas untuk bisa menduniaikan pencak silat dalam event-event besar dunia, khususnya Olimpiade," ujar Ketum Sugiono.

Terima Penghargaan dari Presiden

Dalam Munas XVI IPSI ini Menpora RI Erick Thohir menerima plakat penghargaan dari Presiden Prabowo Subianto atas dukungannya untuk pembinaan dan pengembangan pencak silat.

Selain Menpora, Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IPSI periode 2021-2026 ini memberikan plakat penghargaan kepada sejumlah tokoh. Di antaranya Panglima TNI Jenderal Agus Subiyakto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri.

Presiden Prabowo dalam sambutannya mengatakan, sebagai bela diri dan olahraga asli Indonesia, maka sudah

sepatutnya pencak dilestarikan dan dikembangkan lebih luas. Salah satunya bisa dipertandingkan di ajang multi event terbesar di dunia, Olimpiade.

"Kenapa pencak silat itu harus kita jaga, kenapa pencak silat itu harus dilestarikan, kenapa pencak silat itu harus kita bina? Karena pencak silat itu adalah bagian dari budaya kita, dan pencak silat itu bagian dari ilmu ksatria, ilmu bela diri," ujar Presiden.

Karenanya Presiden Prabowo mem-

IPSI, pencak silat merupakan kepribadian bangsa. Olahraga bela diri ini sarat dengan filosofi, salah satunya berkenan dengan kemerdekaan dan kemandirian, serta pelestarian nilai-nilai leluhur.

"Kemerdekaan suatu bangsa, kebangkitan suatu bangsa, keberhasilan suatu bangsa, ditentukan oleh semangat rakyatnya. Semangat rakyatnya ditentukan oleh kemampuan rakyatnya untuk menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga desanya, dan selanjutnya menjaga



berikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap pencak silat. Khususnya para tokoh, kepengurusan IPSI, serta para pimpinan perguruan pencak silat di seluruh Tanah Air. Termasuk juga para atlet dan praktisi pencak silat.

Menurut Presiden yang telah sekira 34 tahun bergelut di kepengurusan

masyarakatnya," urai Presiden Prabowo.

"Sehingga filosofi ini adalah filosofi yang dianut oleh semua negara yang berhasil, semua bangsa yang berhasil. Bahwa setiap warga negara harus kuat. Kuat fisiknya, kuat jiwanya, kuat imannya, kuat akhlaknya. Kalau tidak ada kekuatan ini, bangsa itu tidak akan langgeng," tegas Presiden. ●



Kasus Campak Turun 93 Persen

KEMENKES PERKETAT SURVEILANS DAN PERLUAS VAKSINASI

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melaporkan tren penurunan signifikan kasus campak sepanjang awal 2026.

Berdasarkan rilis resmi Kemenkes RI pada 30 Maret 2026, jumlah kasus suspek dan terkonfirmasi turun hingga 93 persen dibandingkan puncak lonjakan pada awal tahun.

Data epidemiologi menunjukkan, kasus campak yang sempat mencapai 2.220 kasus pada minggu pertama 2026, kini menurun menjadi 146 kasus pada pertengahan Maret. Penurunan tajam ini disebut sebagai hasil dari penguatan sistem deteksi dini, respons cepat, dan pengawasan lapangan yang berjalan konsisten.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes RI, dr. Andi Saguni, menegaskan bahwa tren positif tersebut terlihat di sejumlah wilayah yang sebelumnya mengalami lonjakan cukup tinggi.

"Tren penurunan ini terantau konsisten di 14 provinsi dan 10 kabupaten/kota dengan riwayat lonjakan kasus pada akhir 2025 dan awal 2026," ujar dr. Andi.

Meski demikian, pemerintah tetap

menaruh perhatian serius terhadap kualitas data, terutama setelah muncul pertanyaan publik mengenai validitas laporan selama masa libur Lebaran. Menanggapi hal itu, dr. Andi memastikan sistem pemantauan tetap berjalan tanpa jeda.

Menurutnya, pengawasan kasus dilakukan secara real-time melalui metode New All Record (NAR) dan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) dari fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Data tersebut kemudian diverifikasi silang dengan laporan dinas kesehatan daerah untuk memastikan tingkat akurasi tetap terjaga.

Kasus Kematian Jadi Alarm Serius

Di tengah tren nasional yang membaik, Kemenkes tetap mencatat adanya kasus fatal. Hingga akhir Maret 2026, tercatat 10 kematian terkait campak, termasuk satu kasus yang menimpa seorang dokter peserta program internsip di Kabupaten Cianjur.

Dokter internsip berinisial AMW (25) dilaporkan meninggal dunia pada 26 Maret 2026 setelah mengalami komplikasi pada jantung dan otak. Berdasarkan laporan resmi, almarhum diduga terpapar pasien campak saat menjalankan tugas pada 8 Maret, sebelum gejala muncul beberapa hari kemudian dan kondisinya memburuk secara cepat.

Kasus tersebut akhirnya dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium oleh Bio Farma, yang mengonfirmasi infeksi campak sebagai pemicu utama komplikasi.

Kemenkes menilai kasus ini menjadi pengingat bahwa campak tidak hanya menyerang anak-anak. Sepanjang 2026, sekitar 8 persen kasus tercatat terjadi pada kelompok dewasa, terutama mereka yang memiliki komorbid dan tingkat paparan tinggi.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah kini mempercepat analisis uji klinis vaksin guna memperluas cakupan imunisasi campak bagi kelompok dewasa, khususnya tenaga kesehatan yang bekerja di area berisiko tinggi.

"Menanggapi kasus yang menimpa dokter internsip, Kemenkes berkomitmen memberikan vaksinasi campak bagi seluruh peserta program internsip. Kami juga mewajibkan wahana penempatan memastikan ketersediaan APD, pengaturan beban kerja, serta hak istirahat yang cukup bagi nakes yang menangani penyakit menular," tegas dr. Andi.

Langkah ini dinilai penting untuk menekan risiko penularan di fasilitas kesehatan, sekaligus melindungi tenaga medis yang menjadi garda terdepan pelayanan.

Selain memperluas vaksinasi, Kemenkes juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan tenaga kesehatan dan masyarakat dalam mengenali

gejala awal penyakit menular.

"Jika muncul gejala sekecil apapun, segera melapor, beristirahat penuh, dan tidak memaksakan diri untuk bertugas," pungkas dr. Andi.

Pemerintah turut mengimbau masyarakat yang belum melengkapi imunisasi agar segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Di tengah mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, vaksinasi dinilai tetap menjadi benteng utama untuk memutus rantai penyebaran campak

imunisasi atau vaksinasi campak pada anak di berbagai daerah.

"Segera tingkatkan cakupan imunisasi pada anak, jangan sampai ini terlewat. Sebenarnya campak tidak terlalu fatal meski mudah menular, bila anak sudah dibekali dengan imunitas dari vaksin. Kalau imunitas tidak terbentuk, maka akan berisiko fatal dan lebih banyak menyebabkan kematian pada anak-anak, terutama untuk yang belum divaksin," katanya.

Dia menjelaskan kematian pada anak akibat campak banyak yang disebabkan adanya komplikasi penyakit, seperti diare dan pneumonia



dan mencegah lonjakan kasus berulang.

Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Lampung Ismen Mukhtar mengatakan untuk mengendalikan penularan campak pada anak perlu peningkatan cakupan vaksinasi pada anak di berbagai daerah.

"Campak ini persebaran virusnya melalui pernapasan dan menyebar lewat udara ataupun lewat droplet, sehingga sangat mudah menular. Tapi vaksin untuk campak ini sudah tersedia," ujar Ketua PAEI Lampung Ismen Mukhtar di Bandar Lampung.

Ia mengatakan salah satu langkah untuk mencegah persebaran campak terutama bagi anak dapat dilakukan dengan meningkatkan cakupan

pada anak.

"Komplikasi seperti diare, pneumonia, yang tidak teratasi dengan cepat ini akan menimbulkan kematian. Namun bila anak sudah memiliki imunitas, saat terpapar virus campak dampaknya akan lebih ringan dari yang tidak mendapatkan vaksin sama sekali," ucap Ismen Mukhtar.

Menurut dia, kalau cakupan vaksinasi di tengah masyarakat tinggi, maka kekebalan kelompok akan terbentuk, sehingga pencegahan persebaran penularan akan mudah dikendalikan.

"Cara terbaik untuk meningkatkan kekebalan atau imunitas kelompok dapat dilakukan dengan memberikan vaksinasi atau imunisasi ke masyarakat. Masyarakat harus segera datang ke puskesmas bawa anaknya untuk diberi imunisasi campak," kata Ismen Mukhtar. ●

CAMPAK, PENYAKIT MENULAR DAN TAK BOLEH DISEPELEKAN

Campak masih menjadi salah satu penyakit infeksi saluran pernapasan yang paling mudah menular, terutama pada anak-anak.

Penyakit yang disebabkan virus ini ditandai dengan demam tinggi, batuk, pilek, mata merah, hingga muncul ruam khas yang menyebar ke seluruh tubuh.

dr. Caesar Dewi Maulina mengungkapkan, meski sering dianggap penyakit ringan, campak tetap perlu diwaspadai. Dalam sejumlah kasus, infeksi ini dapat memicu komplikasi serius, terutama pada bayi, ibu hamil, serta orang dengan daya tahan tubuh rendah.

"Karena itu, vaksinasi lengkap tetap menjadi perlindungan paling efektif untuk memutus rantai penularan," ungkapnya.

Penyebab dan Cara Penularan

Campak disebabkan oleh virus rubella, anggota genus Morbillivirus dari keluarga Paramyxoviridae. Virus ini hanya memiliki satu inang alami, yaitu manusia.

Penularan terjadi melalui percikan air liur (droplet) saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. "Virus masuk ke tubuh lewat hidung, mulut, atau mata, kemudian menginfeksi saluran napas sebelum menyebar melalui kelenjar getah bening ke aliran darah dan berbagai organ tubuh," jelas dr Caesar.

Setelah masa inkubasi sekitar 6-21 hari, gejala mulai muncul. Penderita bahkan sudah dapat menularkan virus empat hari sebelum ruam muncul hingga empat hari setelah ruam timbul, sehingga penyebarannya sangat cepat di lingkungan padat seperti sekolah, daycare, atau permukiman padat.

Kelompok yang Paling Berisiko

Campak paling sering menyerang anak usia di bawah lima tahun. Namun, siapa pun tetap berisiko terinfeksi, terutama jika belum pernah mendapatkan imunisasi.

"Beberapa faktor yang meningkatkan risiko campak antara lain belum pernah menerima vaksin campak atau MMR, bergian ke wilayah dengan angka kasus tinggi, kekurangan vitamin A, daya tahan tubuh lemah akibat penyakit tertentu dan tinggal di lingkungan dengan cakupan imunisasi rendah," sambungnya.

Gejala yang Perlu Diwaspadai

Gejala awal campak biasanya menyerupai flu biasa, sehingga sering tidak langsung dikenali. Tanda-tanda yang umum muncul seperti demam tinggi, batuk kering, pilek, mata merah dan sen-



sitif terhadap cahaya, lemas dan nafsu makan menurun, nyeri tenggorokan, diare atau muntah dan ercah putih keabuan di mulut (Koplik spots)

Sekitar 3-5 hari setelah gejala awal, ruam merah mulai muncul dari belakang telinga dan sekitar garis rambut, lalu menyebar ke leher, dada, hingga seluruh tubuh.

Ruam inilah yang menjadi ciri khas campak akibat peradangan pembuluh kapiler di lapisan kulit.

Mengapa Campak Sangat Menular?

Diungkap dr. Robby Firmansyah Murzen, campak dikenal sebagai salah satu penyakit dengan tingkat penularan tertinggi. Satu penderita bisa menularkan virus ke banyak orang yang belum memiliki kekebalan.

Karena itu, ketika ada satu kasus di sekolah atau rumah, penyebaran dapat berlangsung sangat cepat jika anggota keluarga atau teman sekelas belum divaksin.

Penanganan dan Pengobatan

Sebagian besar kasus campak dapat membaik dalam beberapa hari dengan perawatan suportif di rumah. Fokus utama pengobatan adalah meredakan gejala dan mencegah komplikasi.

Langkah yang dianjurkan meliputi memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi, memberikan ASI cukup pada bayi, istirahat total. Konsumsi makanan lunak dan bergizi, obat penurun demam sesuai anjuran dokter, obat batuk bila diperlukan, kompres hangat untuk mata merah berair, suplementasi vitamin A sesuai dosis dokter

Vitamin A sangat penting karena terbukti membantu menurunkan risiko komplikasi berat pada anak dengan campak.

Pada bayi, ibu hamil, atau pasien dengan imun lemah, dokter dapat memberikan suntikan antibodi (imunoglobulin) bila paparan virus baru terjadi dalam waktu enam hari.

Komplikasi yang Bisa Mengancam Nyawa

Walau banyak penderita sembuh tanpa masalah, campak tetap bisa memicu komplikasi berat, seperti dehidrasi berat,

infeksi telinga yang berisiko menyebabkan gangguan pendengaran, radang pita suara, pneumonia. Kejang akibat demam tinggi, kebutaan, ensefalitis (radang otak), hepatitis, pericarditis dan gangguan pembekuan darah.

Pada ibu hamil, campak dapat meningkatkan risiko persalinan premature, bayi lahir dengan berat badan rendah hingga keguguran.

Karena itu, imunisasi sebelum ke-

* Usia 5-7 tahun: booster ulang MR/MMR

Orang dewasa yang belum pernah divaksin juga tetap bisa menerima vaksin MMR sebanyak dua dosis dengan jarak 28 hari.

Bagi perempuan yang merencanakan kehamilan, vaksin MMR sebaiknya diberikan minimal satu bulan sebelum hamil, karena vaksin ini tidak boleh diberikan saat kehamilan berlangsung.



hamilan sangat dianjurkan.

Pencegahan Paling Efektif: Imunisasi Lengkap

Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa imunisasi MR/MMR adalah langkah paling efektif mencegah campak, terutama di tengah masih ditemukannya kejadian luar biasa di sejumlah daerah.

Jadwal imunisasi yang dianjurkan:

- * Usia 9 bulan: vaksin MR
- * Usia 18 bulan: booster MR/MMR

Selain vaksinasi, pencegahan juga dilakukan dengan isolasi mandiri sejak gejala muncul hingga empat hari setelah ruam timbul.

Selama masa perawatan, penderita dan keluarga disarankan untuk tidak berbagi alat makan, tidak berbagi perlengkapan mandi, rajin mencuci tangan dengan sabun, menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, membersihkan rumah secara rutin dengan disinfektan serta menghindari kontak dengan bayi dan ibu hamil. ●



SERUNYA CAVE TUBING DI GOA PINDUL

Jika biasanya menyusuri goa dilakukan dengan berjalan kaki, Goa Pindul menghadirkan pengalaman yang berbeda yakni cave tubing.

Terletak di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta, destinasi ini menawarkan petualangan unik menyusuri sungai bawah tanah menggunakan ban dalam sambil mengapung dengan jaket pelampung.

Sebelum menjadi destinasi wisata, aliran sungai di Goa Pindul hanya dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk mandi, mencuci, dan memancing.

Selain itu, goa ini juga dianggap sakral dan angker, sehingga tidak banyak yang berani memasuki kedalaman sungai bawah tanahnya. Sejak 2010, Goa Pindul dibuka sebagai tempat wisata dan segera menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara.

Goa Pindul memiliki panjang sekitar 350 meter dan lebar rata-rata 4 meter, dengan beberapa celah sempit yang hanya bisa dilewati menggunakan ban tubing.

Aliran airnya tampak tenang, namun

di beberapa bagian memiliki kedalaman hingga 12 meter.

Oleh karena itu, setiap pengunjung diwajibkan ditemani pemandu berpengalaman untuk memastikan keselamatan, sekaligus menjelaskan mitos dan sejarah yang tersimpan di dalam goa.

Perjalanan menyusuri goa dibagi menjadi tiga zona yang memukau. Zona pertama, zona terang, memungkinkan cahaya masuk dari mulut goa sehingga pengunjung dapat melihat keindahan awal sungai bawah tanah.

Di sini tersimpan mitos tentang gamelan yang konon "membatu dan menyatu" dengan dinding goa, namun katanya bisa berbunyi sendiri saat Jumat Kliwon.

Zona kedua, zona remang, menawarkan suasana lebih misterius dengan stalagmit dan stalagtit beragam bentuk.

Salah satunya adalah Batu Lingga, yang dipercaya dapat menambah keperkasaan pria, serta Batu Mutiara yang diyakini membuat wanita semakin

cantik dan awet muda.

Zona ini juga menampilkan Batu Tirai, yang memancarkan kilauan cahaya dari kristal alami, serta area pertapaan zaman Kerajaan Mataram.

Zona ketiga, zona gelap abadi, merupakan bagian terdalam dan tergelap dengan suhu sejuk seperti ruangan ber-AC. Di sini, stalagtit terbesar keempat di dunia menjulang, dan pengunjung dapat menyaksikan celah sempit yang menantang.

Zona ini diikuti oleh zona kelelawar, di mana ribuan kelelawar kecil bergelantungan tanpa mengganggu perjalanan cave tubing.

Petualangan berakhir di ruangan besar seperti kolam dengan cahaya yang menembus dari atap goa, sering disebut sebagai "cahaya surgawi" spot favorit untuk berfoto.

Waktu terbaik untuk menikmatinya adalah antara pukul 10.00 hingga 12.00 siang saat matahari cerah. Pengunjung juga bisa mencoba cave jumping, melompat ke air dari ketinggian dengan keamanan jaket pelampung.

Goa Pindul dikenal luas karena menawarkan pengalaman unik menyusuri gua dengan cara berbeda, yakni menggunakan ban pelampung di atas aliran sungai bawah tanah.

Aktivitas ini populer dengan sebutan cave tubing, sebuah cara menikmati gua yang memadukan petualangan ringan dan keindahan alam.

Di sini kita akan diajak menyusuri sungai yang mengalir di dalam gua sepanjang ±300 meter dengan ban pelampung. Petualangan yang mengasyikkan sekaligus menegangkan ini akan berlangsung selama kurang lebih 45 menit. Gelapnya perut bumi berpadu dengan keindahan alam berupa stalaktit, stalagmit, batu kristal, hingga moonmilk yang bikin takjub.

Di tengah perjalanan, kita akan sampai di sebuah chamber besar seperti kolam alami. Jika datang pagi hari sekitar pukul 09.00 - 10.00 WIB, sinar matahari akan masuk melalui celah atap gua dan menciptakan fenomena indah yang dikenal sebagai ray of light atau "cahaya surga". Di spot ini, kita bisa berenang, main air, atau lompat bebas.

Keluar dari gua, perjalanan berakhir di Bendungan Banyumoto, peninggalan

zaman Belanda. Di sini, kita biasanya menguji adrenalin dengan melompat dari tebing ke sungai.

Rute termudah ke Goa Pindul adalah melalui Jl. Jogja - Wonosari sekitar 40

07.00- 17.00 WIB dengan retribusi Rp 10.000/orang. Tiket masuk Goa Pindul Rp 40.000/orang, Rafting Sungai Oya Rp 60.000/orang, Goa Tanding Rp 120.000/orang, Goa Kristal Rp 40.000/



km. Belok kiri di Bunderan Siyono menuju Jl. Lingkar Utara. Belok kiri di perempatan Bejiharjo. Belok kiri di pertigaan Jl. Wonosari-Bejiharjo menuju Jl. Raya Pindul. Setelah tuju belok kanan lalu ikuti petunjuk.

Goa Pindul dibuka setiap hari pukul

orang dan Jeep Offroad 450.000/jeep untuk 4 orang

Tips biar liburan makin nyaman, pakai baju yang nyaman dan cepat kering, jangan lupa baju ganti, gunakan pelindung HP anti air dan datang pagi biar dapat momen cahaya surge. ●

Bukit Paralayang Watugupit Gunungkidul MENIKMATI LAUT SELATAN DARI KETINGGIAN

Di jajaran destinasi wisata alam unggulan Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, Bukit Paralayang Watugupit menempati posisi istimewa.

Lokasi ini tidak hanya dikenal sebagai spot terbaik menikmati panorama laut selatan, tetapi juga menjadi magnet bagi pencinta olahraga udara yang ingin merasakan sensasi terbang di atas bentang alam karst khas Gunungkidul.

Dari puncak bukit, mata pengunjung dimanjakan hamparan Samudra Hindia yang luas, garis pantai yang membentang, serta gugusan perbukitan hijau yang menambah kesan dramatis. Perpaduan lanskap ini menjadikan Watugupit sebagai salah satu tujuan wisata yang ideal untuk menikmati alam dari sudut pandang berbeda lebih tinggi, lebih luas, dan lebih memikat.

Dari Bukit Gupit Menjadi Ikon Wisata Dirgantara

Sebelum dikenal luas seperti sekarang, kawasan ini lebih dulu akrab di telinga warga setempat dengan nama Bukit Gupit. Istilah "Watugupit" berasal dari bahasa Jawa, yakni "watu" yang berarti batu dan "gupit" yang bermakna terpotong.

Penamaan tersebut merujuk pada

kontur batuan bukit yang tampak seperti terbelah oleh aliran air alami.

Popularitasnya mulai meningkat pada awal 2000-an, beriringan dengan berkembangnya olahraga paralayang di Indonesia. Semula, bukit ini hanya menjadi tempat favorit warga untuk menikmati panorama senja. Namun setelah potensinya dinilai ideal untuk olahraga udara, kawasan ini resmi ditetapkan sebagai lokasi paralayang oleh Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) pada 2005.

Sejak saat itu, Bukit Paralayang Watugupit tumbuh menjadi salah satu titik terbang favorit nasional, sekaligus memperkuat posisi Gunungkidul sebagai destinasi wisata alam yang terus berkembang.

Daya Tarik Utama: Panorama dan Sensasi Terbang

Pesona utama Watugupit terletak pada pengalaman visual yang sulit ditandingi. Dari atas bukit, pengunjung dapat menyaksikan birunya laut selatan berpadu dengan relief perbukitan yang khas.



Saat sore hari, suasana berubah semakin magis ketika langit perlahan bergradasi jingga keemasan, menjadikan momen matahari terbenam sebagai salah satu yang paling diburu wisatawan.

Bagi pencari adrenalin, paralayang menjadi aktivitas unggulan yang wajib dicoba. Dengan pendampingan instruktur berpengalaman, pengunjung dapat menikmati sensasi melayang sambil melihat lanskap Gunungkidul dari udara. Aktivitas ini relatif ramah bagi pemula, sehingga tetap aman dinikmati wisatawan yang baru pertama kali mencobanya.

Selain paralayang, kawasan ini juga cocok untuk wisata santai, berburu foto lanskap, hingga sekadar menikmati suasana sore dengan latar debur ombak dari kejauhan.

Sebagai destinasi yang terus berkembang, Bukit Paralayang Watugupit telah dilengkapi fasilitas yang cukup memadai. Area parkir yang luas memudahkan kendaraan wisatawan, sementara warung makan lokal menghadirkan pilihan santapan ringan untuk menemani waktu bersantai. Toilet umum dan titik istirahat juga tersedia untuk menunjang kenyamanan selama berada di lokasi.

Bagi wisatawan yang ingin mencoba paralayang, tersedia penyewaan perlengkapan lengkap serta layanan instruktur profesional yang siap memberikan pengarahan teknis dan prosedur keselamatan.

Lokasi Bukit Paralayang Watugupit dapat ditempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam perjalanan dari pusat Kota Yogyakarta. Jalur menuju lokasi relatif mudah karena akses jalan sudah beraspal dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas.

Wisatawan dapat menggunakan kendaraan pribadi untuk perjalanan yang lebih fleksibel. Alternatif lain, layanan transportasi daring juga cukup membantu bagi pengunjung yang ingin perjalanan praktis tanpa harus menyetir sendiri.

Tips Berkunjung agar Pengalaman Lebih Maksimal

Agar kunjungan ke Bukit Paralayang Watugupit semakin nyaman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, pilih waktu kunjungan pada

pagi hari atau menjelang senja. Selain cuaca cenderung lebih bersahabat, kondisi angin biasanya lebih stabil untuk aktivitas paralayang.

Kedua, pastikan tubuh dalam kondisi fit. Meski paralayang tidak memerlukan kemampuan khusus, stamina yang baik akan membantu pengunjung menikmati pengalaman dengan lebih nyaman.

Ketiga, utamakan keselamatan. Selalu ikuti arahan instruktur dan gunakan perlengkapan sesuai standar keamanan.

Terakhir, jangan lupa membawa kamera atau smartphone. Lanskap dari ketinggian, terutama saat matahari terbenam, menjadi momen visual yang sayang jika tidak diabadikan.

Kehadiran Bukit Paralayang Watugupit memberi kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Meningkatnya jumlah wisatawan membuka peluang usaha bagi

warga, mulai dari warung makan, jasa transportasi lokal, hingga layanan pendamping paralayang.

Lebih jauh, popularitas destinasi ini turut memperkuat citra Gunungkidul sebagai kawasan wisata alam unggulan. Tidak sedikit wisatawan dari luar daerah maupun mancanegara yang datang untuk menikmati panorama dan mencoba olahraga udara, sehingga efek promosi bagi pariwisata daerah terus meluas.

Di balik pesonanya, Watugupit menghadapi tantangan yang umum dialami destinasi populer, yakni persoalan kebersihan dan kelestarian lingkungan. Lonjakan jumlah pengunjung berpotensi meningkatkan volume sampah dan menekan ekosistem sekitar bukit.

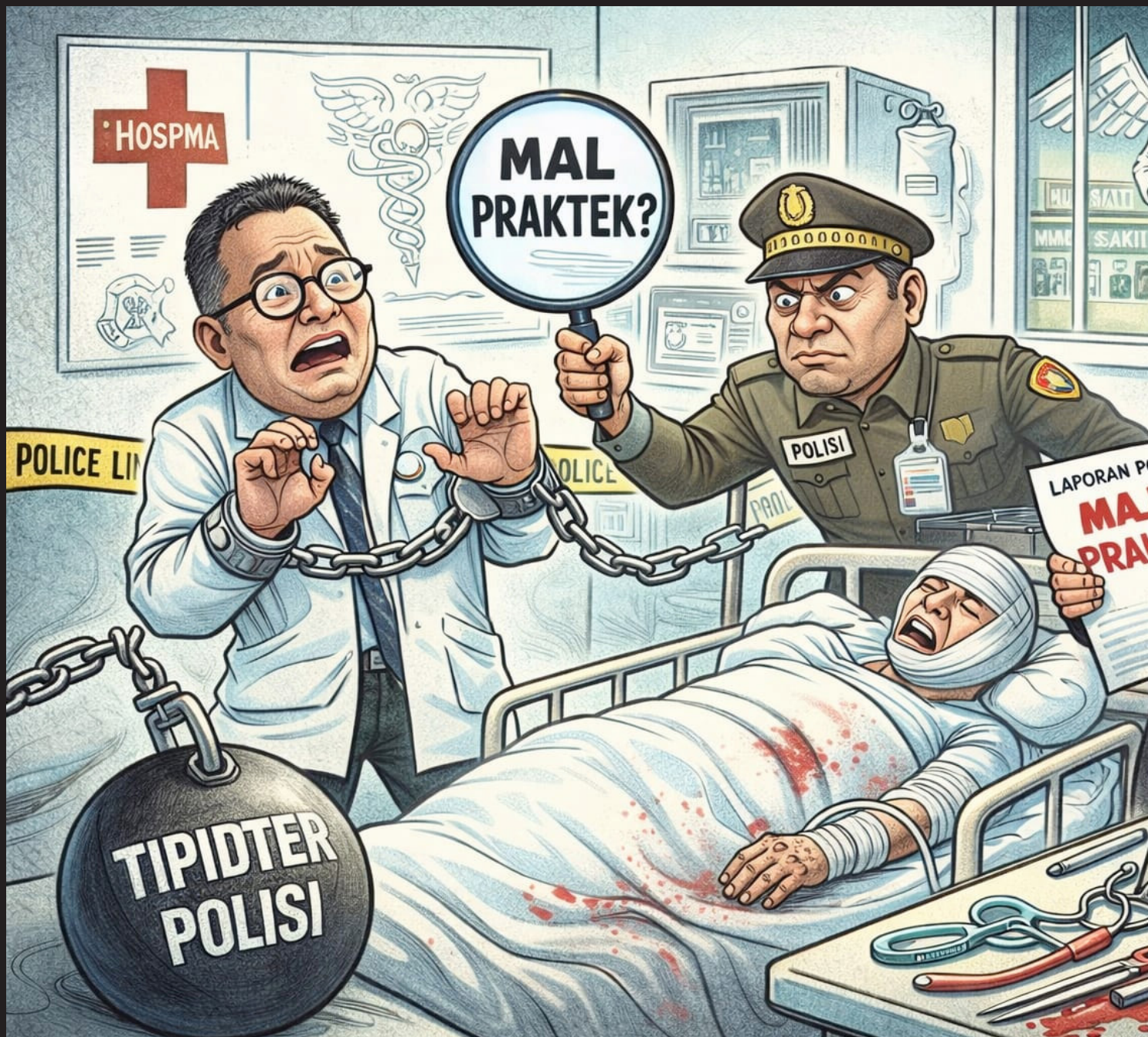
Karena itu, kesadaran wisatawan menjadi kunci utama. Disiplin menjaga kebersihan, tidak merusak vegetasi, serta mematuhi aturan kawasan harus menjadi budaya bersama. ●





HUKUM RUMAH SAKIT DAN TINDAK PIDANA MALPRAKTIK

(Antara Kesalahan Medis, Kelalaian, dan Kriminalisasi Profesi)



Dalam praktik pelayanan kesehatan di Indonesia, rumah sakit bukan hanya institusi medis, tetapi juga merupakan subjek hukum yang memikul tanggung jawab besar terhadap keselamatan pasien.

Di sisi lain, tenaga medis seperti dokter dan perawat berada dalam posisi dilematis: di satu sisi dituntut menyelamatkan nyawa, di sisi lain berhadapan dengan risiko dikriminalisasi atas dugaan malpraktek.

Pertanyaannya: kapan kesalahan medis berubah menjadi tindak pi-



dana?

Memahami Malpraktek: Tidak Semua Kesalahan Adalah Kejahatan

Dalam perspektif hukum, malpraktek medis tidak bisa disederhanakan sebagai setiap kegagalan tindakan

medis. Harus ada unsur-unsur hukum yang terpenuhi, antara lain:

1. Adanya kewajiban hukum (duty of care)
2. Terjadi pelanggaran terhadap standar profesi
3. Adanya kerugian nyata (damage)
4. Hubungan kausal antara tindakan dan kerugian

Tanpa keempat unsur ini, maka kesalahan medis tidak serta-merta menjadi tindak pidana.

Di sinilah pentingnya membedakan antara:

- ▶ Risiko medis (medical risk)
- ▶ Kelalaian (negligence)
- ▶ Kesengajaan (dolus)

Tidak semua kegagalan tindakan dokter adalah kelalaian, apalagi kejahatan.

Berdasarkan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum terhadap pelayanan yang diberikan.

Pasal 46 UU Rumah Sakit menegaskan:

> Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit.

Artinya, tanggung jawab tidak selalu dibebankan kepada dokter secara pribadi, tetapi juga kepada institusi

Ini penting untuk menghindari praktik "lempar tanggung jawab" yang selama ini sering terjadi.

Malpraktek dalam Perspektif Pidana

Dalam hukum pidana, malpraktek dapat dijerat jika memenuhi unsur kelalaian berat atau kesengajaan.

Dasar hukumnya antara lain, Pasal 359 KUHP

> Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Pasal 360 KUHP:

> Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka berat...

Namun perlu digarisbawahi:

Tidak semua kelalaian otomatis menjadi pidana.

Harus ada kelalaian berat (culpa

lata), bukan sekadar kesalahan ringan dalam prosedur medis.

Fenomena yang berbahaya saat ini adalah kriminalisasi profesi medis. Setiap kegagalan tindakan langsung dilaporkan sebagai tindak pidana.

Pada hal, dunia medis bukan ilmu pasti. Jika setiap dokter dihantui ancaman pidana, maka yang terjadi adalah:

- ▶ Dokter menjadi defensif
- ▶ Pelayanan menjadi lambat
- ▶ Risiko terhadap pasien justru meningkat
- ▶ Hukum tidak boleh membunuh keberanian dokter untuk bertindak dalam situasi darurat.

▶ Peran Etik dan Disiplin Profesi

Sebelum masuk ranah pidana, sengketa medis seharusnya diselesaikan melalui:

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)

Kode etik profesi

Ini penting untuk menentukan:

- ▶ Apakah ada pelanggaran standar profesi
- ▶ Apakah tindakan masih dalam batas kewajaran medis
- ▶ Pidana harus menjadi ultimum remedium (upaya terakhir), bukan langkah pertama
- ▶ Banyak kasus yang disebut "malpraktek" justru disebabkan oleh:
- ▶ Fasilitas yang tidak memadai
- ▶ Beban kerja tenaga medis yang tinggi
- ▶ Sistem manajemen rumah sakit yang buruk
- ▶ Jika sistemnya rusak, maka menyalahkan individu semata adalah ketidakadilan struktural.

Hukum harus hadir secara adil:

- ▶ Melindungi pasien dari kelalaian
- ▶ Melindungi tenaga medis dari kriminalisasi
- ▶ Jangan sampai hukum menjadi alat tekanan emosional, bukan alat pencari kebenaran.

Karena pada akhirnya, dokter bukanlah penjahat, dan pasien bukanlah objek eksperimen keduanya adalah manusia yang harus dilindungi oleh hukum. • Dr. (c) Pitra Romadoni Nasution, SH., MH



ART VS MAJIKAN DAN REALITA KEADILAN HUKUM INDONESIA

Dalam beberapa pekan terakhir ini kasus hukum yang menimpa seorang Asisten Rumah Tangga (ART) atas nama Refpin Akhjana Juliyanti (20) cukup menarik perhatian. Ia dipenjara atas tuduhan penganiayaan anak majikannya yang merupakan seorang politisi dan anggota DPRD Bengkulu.

Kini kasus yang dialami Refpin mendapat perhatian serius dari DPR RI setelah adanya laporan dari tim kuasa hukum yang dinilai mengandung sejumlah kejanggalan. Refpin ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan mencubit anak majikannya yang diketahui merupakan anak dari seorang anggota DPRD di Bengkulu.

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan adil dan tidak boleh mengabaikan rasa kepatutan. Dugaan yang digunakan dalam kasus ini dinilai lemah dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

"Kami melihat ini adalah hal yang janggal, tidak patut. Hukum itu harus berkeadilan," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya melihat konteks secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahan dalam penegakan hukum.

Komisi XIII pun menyoroti adanya potensi pelanggaran HAM dalam kasus tersebut. Untuk itu, DPR akan

berkolaborasi dengan Komisi III guna memanggil aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, agar perkara ini dapat dibuka secara terang dan akuntabel, sekaligus memastikan hak-hak Refpin dapat dipulihkan.

Selain itu, DPR juga menegaskan komitmennya dalam mendorong perlindungan bagi pekerja rumah tangga, sejalan dengan agenda pembahasan RUU yang didukung Presiden Prabowo Subianto.

Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu pada Kamis (9/4/2026) sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti kasus ini secara langsung di lapangan.

Seperti diketahui Refpin Akhjana Juliyanti ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan mencubit anak majikannya yang diketahui merupakan anak dari seorang anggota DPRD di Bengkulu. Peristiwa tersebut disebut terjadi pada Agustus 2025 di rumah kediaman anggota dewan tersebut.

Kasus dugaan penganiayaan yang menjerat asisten rumah tangga (ART) tersebut memicu perhatian publik karena dinilai janggal. Perkara yang bermula sejak Agustus 2025 itu disebut minim bukti kalau Refpin melakukan kekerasan terhadap anak yang diasuhinya.

Ada Potensi Pelanggaran HAM

Refpin Akhjana Juliyanti (20) sendiri berasal dari Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Provinsi Sumatera Selatan yang merantau dan bekerja di Kota Bengkulu sebagai ART. Sementara pelapor dan majikannya adalah seorang politisi Anggota DPRD Bengkulu.

Gadis berusia 20 tahun ini menjadi terdakwa dalam perkara dugaan penganiayaan anak anggota DPRD Kota Bengkulu, Fachrulsyah yang merupakan kader Partai Amanat Nasional (PAN). Refpin dilaporkan Ayu Lestari, istri Fachrulsyah pada 22 Agustus 2025 dan perkaranya terus bergulir hingga persidangan.

Refpin dituduh mencubit anak dari pasangan anggota DPRD Kota Bengkulu itu ke Polresta Bengkulu setelah menemukan memar di betis anaknya yang berusia 2,5 tahun.

Refpin ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kasus ini menjadi kontroversial karena pihak Refpin dan kuasa hukumnya mengklaim tidak ada bukti CCTV yang menunjukkan penganiayaan, dan tidak ada saksi mata.

Refpin juga membantah keras tuduhan tersebut dan memilih menghadapi proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu daripada mengakui perbuatan yang ia rasa tidak pernah dilakukan.

Pada persidangan Maret lalu, Refpin menangis saat eksepsi atau keberatan yang diajukannya dalam sidang putusan sela perkara dugaan penganiayaan terhadap anak anggota DPRD Kota Bengkulu ditolak Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu.

Majelis hakim memutuskan perkara tersebut tetap dilanjutkan ke tahap persidangan berikutnya.

Kasus yang dialami Refpin menda-

pat perhatian serius dari DPR RI setelah adanya laporan dari tim kuasa hukum yang dinilai mengandung sejumlah kejanggalan.

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan adil dan tidak boleh mengabaikan rasa kepatutan. Dugaan yang digunakan dalam kasus ini dinilai lemah dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

“Kami melihat ini adalah hal yang janggal, tidak patut. Hukum itu harus berkeadilan,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja ke Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu

Komisi XIII pun menyoroti adanya potensi pelanggaran HAM dalam kasus tersebut. Untuk itu, DPR akan berkolaborasi dengan Komisi III guna memanggil aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, agar perkara ini dapat dibuka secara terang dan akuntabel, sekaligus memastikan hak-hak Refpin dapat dipulihkan.

Selain itu, DPR juga menegaskan komitmennya dalam mendorong perlindungan bagi pekerja rumah tangga, sejalan dengan agenda pembahasan RUU yang didukung Presiden Prabowo Subianto. ●



JK WARNING SINYAL KRISIS ATAU EARLY WARNING? MEMBACA ANCAMAN “CHAOS” JULI-AGUSTUS 2026

Pernyataan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengenai potensi terjadinya “chaos” nasional pada Juli-Agustus 2026 terus memantik perhatian publik.

Isu ini berkembang bukan hanya sebagai peringatan politik, tetapi juga sebagai alarm dini atas tekanan ekonomi dan fiskal yang dinilai semakin berat.

Pernyataan itu pertama kali diungkap mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, dalam sebuah diskusi bersama jurnalis senior Edy

Mulyadi.

Menurut Said Didu, kekhawatiran JK berangkat dari pembacaan serius terhadap dua tekanan besar yang sedang menghimpit Indonesia: dinamika geopolitik global yang memanas akibat tensi Iran-Amerika Serikat, serta tekanan fiskal dari beban utang dan defisit anggaran yang terus melebar.

“Pak JK betul-betul prihatin terhadap keadaan yang dihadapi negara,” ujar Said Didu, mengutip hasil pertemuannya dengan JK pada 17 Februari 2026 yang berlangsung hampir dua jam.

Dalam pemaparan Said Didu, salah satu titik paling mengkhawatirkan adalah lonjakan defisit fiskal. Ia menghitung, dalam dua bulan pertama 2026 saja, defisit sudah mencapai sekitar Rp200 triliun. Jika pola itu terus berlanjut hingga Juli-Agustus, maka angka tersebut berpotensi menembus Rp1.000 triliun.

Bagi kalangan ekonomi-politik, angka

itu bukan sekadar statistik, melainkan indikator serius potensi pelemahan kemampuan negara menjaga pelayanan dasar.

“Jalan-jalan akan berlubang, daerah tidak ada uang lagi, Puskesmas sudah enggak bisa melayani,” kata Said Didu menggambarkan skenario terburuk yang mungkin terjadi.

Dalam perspektif fiskal, tekanan semacam ini berisiko memukul transfer daerah, memperlambat proyek infrastruktur, hingga memicu gangguan layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah.

Sebagai pembandingan, sejumlah laporan terbaru menyebut indikator makro Indonesia hingga awal 2026 masih relatif stabil, mulai dari pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11 persen hingga inflasi yang masih terkendali di kisaran 4 persen. Namun stabilitas makro tersebut dinilai belum sepenuhnya menepis



kekhawatiran terhadap tekanan likuiditas fiskal jangka menengah.

Isu ini semakin menarik perhatian setelah Said Didu mengungkapkan pertemuannya bersama JK dan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo pada 15 Maret 2026.

Pertemuan tertutup tersebut sempat memunculkan spekulasi politik, termasuk pertanyaan dari sejumlah pihak di lingkaran Istana mengenai maksud pertemuan tersebut.

"Saya sempat dikontak, mempertanyakan mau apa JK," ungkap Said Didu.

Ia menegaskan forum itu bukan manuver politik, melainkan upaya mencari jalan keluar atas persoalan bangsa yang dinilai semakin kompleks.

Lebih jauh, Said Didu menyebut JK menitipkan sembilan pesan strategis khusus untuk Presiden Prabowo Subianto. Pesan itu, menurutnya, tidak untuk konsumsi publik demi menjaga ketenangan pemerintah dalam mengambil keputusan.

Pesan tersebut disebut mencakup tiga figur yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan, tiga program yang dianggap berisiko, serta tiga langkah solusi yang mendesak untuk segera dijalankan.

Di tengah kritik keras terhadap lingkaran kekuasaan, Said Didu menegaskan dirinya tetap percaya pada niat baik Presiden Prabowo. Ia bahkan menolak wacana menjatuhkan pemerintahan secara total karena dinilai hanya membuka ruang instabilitas yang lebih besar.

"Jauh lebih gampang memperbaiki orang-orang di sekitar Prabowo daripada menjatuhkan Prabowo," pungkasnya.

Pengamat: Bisa Jadi Early Warning, Bisa Juga Pengkondisian

Pengamat geopolitik Hendrajit menilai pernyataan JK tidak bisa dibaca secara sederhana. Menurutnya, ada tiga kemungkinan besar di balik pernyataan tersebut.

Pertama, sebagai bentuk prediksi berbasis pembacaan situasi. Kedua, sebagai prognosis dari informasi yang tidak dibuka sepenuhnya ke publik. Ketiga, yang paling sensitif, sebagai bentuk pengkondisian opini publik.

"Kalau itu sekadar prediksi atau hasil

pembacaan situasi, maka itu sah sebagai bagian dari risk assessment. Bahkan bisa menjadi early warning signal bagi pemerintah dan publik," ujar Hendrajit.

Namun ia mengingatkan, apabila pernyataan itu dibaca sebagai pengkondisian, dampaknya bisa lebih serius terhadap stabilitas nasional, terutama ketika persepsi publik mulai bergerak lebih cepat daripada respons kebijakan pemerintah.

Dalam analisis Hendrajit, kekuatan utama JK bukan semata pengalaman politiknya, melainkan jaringan informasi yang sangat luas. Sebagai tokoh senior

si dalam menciptakan situasi kondusif yang menenangkan rakyat. Jangan memanas-manasi. Jangan menciptakan kondisi yang membuat rakyat semakin panik dan marah," katanya.

Idrus menegaskan bahwa pernyataan tokoh publik yang menyebut secara spesifik waktu dan potensi terjadinya "chaos" tidak lagi dapat diposisikan sebagai analisis netral, melainkan berpotensi membentuk ekspektasi kolektif masyarakat.

Dalam dinamika komunikasi publik, menurutnya, narasi dengan tingkat kepastian tinggi cenderung memen-



dengan pengalaman dua periode sebagai wakil presiden, JK dinilai memiliki akses kuat ke jaringan birokrasi, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga jejaring internasional.

"JK ini bukan sekadar tokoh politik biasa. Ia punya akses informasi yang luas, baik dari jaringan politik, birokrasi, hingga relasi bisnis," katanya.

Faktor inilah yang membuat setiap pernyataan JK selalu memiliki resonansi politik tinggi dan mampu memengaruhi persepsi elite maupun masyarakat luas.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang kebijakan publik Idrus Marham mengingatkan, dalam situasi nasional yang membutuhkan stabilitas, tokoh publik seharusnya menyampaikan pandangan yang menyejukkan, bukan memicu keresahan atau kepanikan.

"Dalam kondisi bangsa seperti sekarang ini, sejatinya kita harus berkontribu-

garuhi cara berpikir dan bertindak masyarakat, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial.

Ia menilai, ketika narasi seperti itu beredar luas, publik tidak hanya menerima informasi, tetapi mulai menyesuaikan perilaku secara antisipatif yang justru dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kondisi yang diprediksi.

Karena itu, pernyataan semacam ini dinilai berpotensi menciptakan efek yang mendorong realitas itu sendiri.

Lebih lanjut, Idrus juga menyinggung kemungkinan adanya motif lain di balik pernyataan tersebut. Ia menyebut tidak tertutup kemungkinan narasi "chaos" digunakan sebagai instrumen tekanan karena adanya kepentingan yang terganggu.

"Boleh jadi ada kepentingan yang terganggu atau tidak tercapai, lalu dijadikan instrumen penekan," ujarnya. •



DI TENGAH PERANG TIMUR TENGAH, EKONOMI INDONESIA MASIH PUNYA TENAGA

Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 menghadapi ujian serius di tengah memanasnya konflik Timur Tengah, lonjakan harga energi, dan ketidakpastian perdagangan global.

Dua lembaga keuangan internasional, World Bank dan Asian Development Bank, bahkan menghadirkan proyeksi yang berbeda arah terhadap laju ekonomi nasional.

Bank Dunia dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update April 2026 merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen, dari estimasi sebelumnya 4,8 persen.

Revisi ini sejalan dengan perlambatan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik yang diproyeksikan melambat ke 4,2 persen pada 2026, turun dari 5 persen pada 2025.

Lembaga tersebut menilai, tekanan utama datang dari eskalasi konflik Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak dunia, memperbesar biaya logistik, dan meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global. Selain itu, hambatan perdagangan dan lemahnya permintaan eksternal turut menekan prospek pertumbuhan kawasan.

“Wilayah di luar China kemungkinan akan mengalami perlambatan pada 2026 sebelum kembali menguat pada 2027 ketika tensi geopolitik mereda dan permintaan global pulih,” tulis Bank Dunia dalam laporannya.

Meski demikian, Bank Dunia menilai Indonesia masih memiliki bantalan yang cukup kuat. Subsidi energi, pengaturan harga pemerintah, dan investasi publik dinilai berhasil menahan dampak langsung lonjakan harga minyak terhadap inflasi domestik.

ADB Naikkan Outlook, Konsumsi Domestik Jadi Kunci

Berbeda dengan Bank Dunia, Asian Development Bank justru merevisi naik proyeksi ekonomi Indonesia pada 2026 menjadi 5,2 persen, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya 5,1 persen.

Dalam Asian Development Outlook April 2026, ADB menyebut ekonomi Indonesia masih ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, pasar tenaga kerja yang stabil, serta belanja infrastruktur publik yang tinggi.

Laju pertumbuhan pada 2027 juga diperkirakan tetap berada di level 5,2 persen.

Kepala Ekonom ADB, Albert Park, mengingatkan bahwa konflik berkepanjangan di Timur Tengah tetap menjadi risiko utama bagi kawasan Asia-Pasifik.

"Konflik berkepanjangan di Timur Tengah merupakan risiko terbesar karena dapat mempertahankan harga energi dan pangan tinggi lebih lama, sekaligus memperketat kondisi keuangan global," ujarnya.

ADB juga menyoroti potensi gangguan pada jalur pelayaran internasional, volatilitas pasar keuangan, dan tekanan harga pupuk global yang dapat berdampak lanjutan pada inflasi pangan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia.

Pemerintah: Fundamental Indonesia Masih Solid

Menanggapi koreksi proyeksi Bank Dunia, pemerintah Indonesia memilih tetap optimistis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menilai revisi tersebut merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya risiko global dan bukan cerminan pelemahan fundamental ekonomi nasional.

"Dengan situasi perang saat ini, hampir semua kawasan mengalami penyesuaian proyeksi. Indonesia tetap berada di atas rata-rata global," kata Airlangga.

Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno. Ia meyakini Indonesia masih berpeluang tumbuh di atas 5 persen, terutama karena posisi Indonesia sebagai eksportir komoditas strategis seperti batu bara, nikel, minyak sawit, dan timah.

Menurut Eddy, kenaikan harga komoditas global justru berpotensi menjadi penopang penerimaan ekspor nasional di tengah tekanan ekonomi dunia.

"Indonesia berbeda dengan banyak negara lain karena kita juga eksportir sumber daya alam yang mengalami apresiasi harga cukup besar," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa ketahanan sektor energi domestik, khususnya pembangkit listrik berbasis batu

bara dan gas dalam negeri, menjadi keunggulan tersendiri dibanding negara yang sangat bergantung pada impor energi.

Meski peluang pertumbuhan tetap terbuka, tekanan terhadap daya beli masyarakat dinilai perlu menjadi perhatian serius. Kenaikan harga energi global dapat merembet ke biaya produksi plastik, pupuk, transportasi, hingga harga pangan.

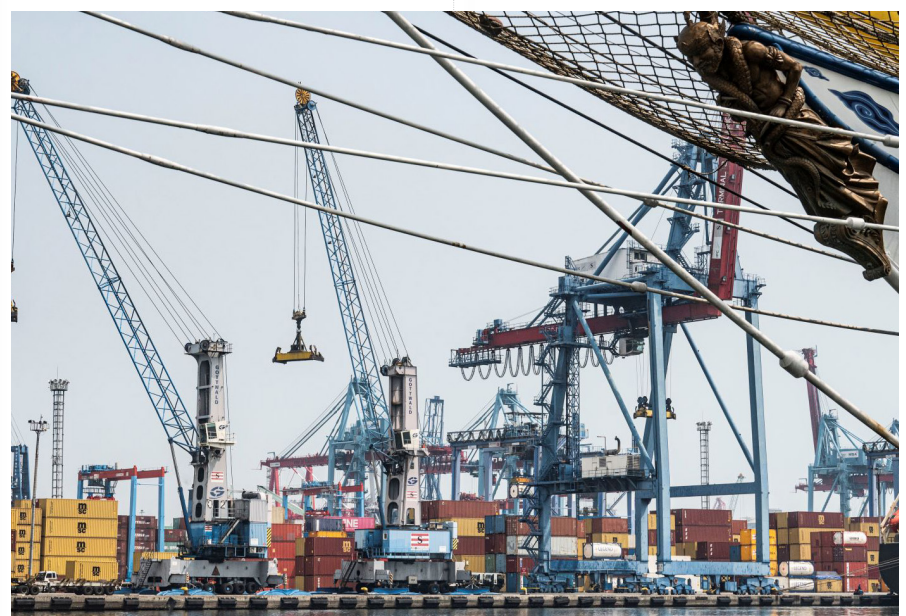
Kondisi ini berpotensi memicu kenaikan harga beras, sayuran, produk rumah tangga, hingga barang konsumsi harian seperti mi instan dan air minum kemasan.

Karena itu, para ekonom menilai ruang fiskal APBN harus dijaga ketat, terutama untuk memastikan subsidi

tetap tepat sasaran dan program perlindungan sosial mampu menopang konsumsi rumah tangga kelas menengah bawah.

Chief Economist East Asia and Pacific World Bank, Aaditya Mattoo, menegaskan bahwa arah pertumbuhan ke depan akan sangat ditentukan oleh kualitas kebijakan makroekonomi, reformasi struktural, dan kesiapan teknologi.

Dengan kata lain, di tengah tekanan perang, harga energi, dan fragmentasi perdagangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 akan sangat bergantung pada kekuatan konsumsi domestik, efektivitas subsidi, serta percepatan transformasi industri berbasis teknologi. ●



BIAYA DUNIA BERGEJOLAK, HAJI 2026 TETAP BERANGKAT

Saat gejolak biaya penerbangan global dan meningkatnya kewaspadaan terhadap praktik haji ilegal, pemerintah Indonesia resmi membuka rangkaian penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi mulai 21 April 2026, ditandai dengan masuknya jemaah ke asrama haji di seluruh embarkasi nasional.

Tahapan ini menjadi awal dari operasional haji yang akan berlangsung lebih dari dua bulan, mulai keberangkatan menuju Tanah Suci, puncak ibadah di Arafah, hingga pemulangan terakhir pada 1 Juli 2026.

Namun musim haji tahun ini tidak hanya bicara soal jadwal. Pemerintah juga mengambil dua langkah strategis yang langsung menyentuh kepentingan jemaah, menahan kenaikan biaya meski harga avtur melonjak tajam dan menutup rapat jalur visa haji furoda yang selama ini dikenal sebagai skema non-kuota.

Kombinasi dua kebijakan tersebut menjadi penanda arah baru tata kelola haji nasional: lebih protektif, lebih terukur, dan lebih tegas terhadap celah penyimpangan.

Mengacu pada Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1447 H/2026 M, jemaah mulai masuk asrama pada 21 April 2026, lalu kloter pertama diberangkatkan ke Madinah sehari setelahnya, 22 April 2026.

Gelombang pertama berlangsung hingga 6 Mei, disusul gelombang kedua melalui Jeddah mulai 7-21 Mei 2026.

Puncak ibadah dimulai saat jemaah bergerak dari Makkah menuju Arafah pada 25 Mei, sebelum menjalani wukuf pada 26 Mei 2026 yang bertepatan dengan 9 Dzulhijjah 1447 H.

Rangkaian mabit di Muzdalifah dan Mina, termasuk lempar jumrah pada hari tasyrik, berlangsung hingga 30 Mei, lalu fase pemulangan dimulai bertahap sejak 1 Juni 2026.

Dengan kuota resmi 221.000 jemaah, terdiri atas 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah khusus, Indonesia kembali menjadi salah satu negara dengan kuota haji terbesar di dunia.

Salah satu isu paling sensitif menjelang musim haji tahun ini adalah lonjakan harga avtur yang berdampak dinamika global di Timur Tengah. Kenaikan tersebut sempat memicu kekhawatiran adanya tambahan biaya penerbangan bagi calon jemaah.



Namun pemerintah memastikan hal itu tidak akan dibebankan kepada masyarakat.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas, biaya jemaah tidak boleh bertambah meskipun maskapai menghadapi tekanan operasional yang berat.

“Presiden memerintahkan agar kenaikan biaya akibat avtur tidak dibebankan kepada jemaah haji,” ujar Dahnil usai Manasik Haji Akbar di Medan.

Ia mengungkapkan, maskapai Arab Saudi telah menyampaikan surat resmi mengenai tambahan beban biaya yang rata-rata mendekati 4.000 dolar AS per jemaah.

“Kendati demikian, pemerintah menyiapkan skema solusi agar layanan penerbangan tetap berjalan optimal tanpa mengganggu biaya yang sudah ditetapkan,” ungkapnya.

Dalam keputusan yang telah disepakati pemerintah dan DPR, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 rata-rata sebesar Rp87,4 juta, sementara biaya yang dibayar jemaah (Bipih) berada di kisaran Rp54,19 juta, bahkan turun dibanding tahun sebelumnya.

Visa Furoda Nihil, Tawaran Haji Instan Patut Dicurigai

Jika stabilitas biaya menjadi kabar baik, keputusan lain justru menjadi alarm keras bagi publik, visa haji furoda resmi tidak tersedia pada musim haji 2026.

Pemerintah menegaskan Arab Saudi tidak menerbitkan visa untuk jalur non-kuota tersebut, sehingga seluruh promosi “haji tanpa antre” yang beredar di media sosial wajib diwaspadai.

“Nggak ada, jadi tahun ini Saudi tidak mengeluarkan haji furoda. Jadi yang jelas visa yang legal itu namanya visa haji,” tegas Dahnil Anzar Simanjuntak.

Pernyataan itu sekaligus mempertegas bahwa jalur resmi bagi masyarakat Indonesia hanya melalui haji reguler dan haji khusus.

Pemerintah bersama kepolisian kini mematangkan pembentukan Satgas Pencegahan Haji ilegal, yang akan memburu modus penipuan, penggunaan visa tidak sesuai peruntukan, hingga travel yang menawarkan keberangkatan instan tanpa dasar hukum.

Dengan masa tunggu haji reguler rata-rata 26 tahun dan haji khusus sekitar enam tahun, istilah “langsung berangkat tanpa antre” dinilai sebagai indikator kuat praktik ilegal.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan apresiasi atas progres kesiapan penyelenggaraan

lembaga dalam memastikan kualitas layanan haji tetap optimal.

“Kementerian dan seluruh lembaga terkait harus bekerja bersama. Melayani jemaah haji dalam jumlah besar bukan perkara mudah, sehingga dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang solid,” tegasnya. ●



ibadah haji tahun 1447 H/2026 M, khususnya terkait penerbitan visa jemaah yang telah rampung serta rencana distribusi kartu Nusuk sebelum keberangkatan.

“Penerbitan visa yang sudah selesai seluruhnya merupakan capaian penting. Demikian juga dengan Nusuk yang akan dibagikan sebelum keberangkatan, ini menjadi bagian dari upaya peningkatan layanan kepada jemaah,” ujar Marwan.

Ia menekankan bahwa penyelenggaraan haji setiap tahun selalu menghadapi dinamika yang berbeda, sehingga diperlukan kemampuan adaptasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

“Tantangan haji itu sangat dinamis. Persoalan yang muncul tahun lalu belum tentu terjadi tahun ini. Karena itu, kita harus mampu mengidentifikasi potensi masalah sejak dini agar tidak berdampak pada pelayanan jemaah,” lanjutnya.

Marwan juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antar kementerian dan

Jadwal Lengkap Operasional Haji 2026

APRIL 2026

- 21 April: Jemaah masuk asrama haji
- 22 April: Awal keberangkatan gelombang I ke Madinah

MEI 2026

- 1 Mei: Awal pergerakan jemaah dari Madinah ke Makkah
- 6 Mei: Akhir gelombang I
- 7 Mei: Awal gelombang II ke Jeddah
- 15 Mei: Akhir pergerakan Madinah-Makkah
- 21 Mei: Akhir gelombang II
- 25 Mei: Jemaah bergerak ke Arafah
- 26 Mei: Wukuf di Arafah
- 27 Mei: Idul Adha 1447 H
- 28-30 Mei: Hari tasyrik

JUNI-JULI 2026

- 1 Juni: Awal pemulangan gelombang I
- 16 Juni: Awal pemulangan gelombang II dari Madinah
- 30 Juni: Akhir pemulangan gelombang II
- 1 Juli: Kedatangan terakhir jemaah di Tanah Air

JOKOWI-JK: ANTARA BERHADAPAN DAN BERSEBERANGAN

Lama tak saling menjumpai, hubungan antara Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 HM Jusuf Kalla malah tampak semakin berseberangan. Masih adakah kemungkinan silaturahmi?

Hubungan yang makin berseberangan antara Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) tampak dari rangkaian peristiwa yang berlangsung sejak awal April 2026. Video viral yang menampilkan sosok peneliti Rismon Sianipar secara mengejutkan menuding JK sebagai penyokong dana di balik isu ijazah palsu Jokowi. Dalam narasi tersebut, JK disebut menggelontorkan dana fantastis sebesar Rp5 miliar kepada Roy Suryo dan kawan-kawan untuk menggulirkan isu tersebut ke publik.

Berdasarkan beberapa informasi yang tersebar di platform digital, Jusuf Kalla (JK) menyatakan dirinya dituding memberi pendanaan sebesar Rp5 miliar untuk hal tersebut dan memastikan informasi itu tidak benar. "Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar," kata JK di kediamannya, Jakarta, Minggu, 5 April 2025.

JK pun menegaskan

tidak pernah terlibat dalam polemik isu ijazah Jokowi. Baik terlibat dengan Roy Suryo maupun Rismon Sianipar.

Masih pada 5 April 2026, Rismon pun langsung menanggapi pernyataan JK. Pihak Rismon Sianipar membantah adanya penyebutan nama JK sebagai pendana di balik isu ijazah palsu Jokowi. "Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK, video yang edar itu hoaks AI ya," ungkap advokat Jahmada Girsang yang mewakili Rismon.

Toh JK melaporkan Rismon ke Bareskrim Polri lantaran merasa dirugikan atas tuduhan mendanai pelaporan

soal keaslian ijazah Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. "Saya melaporkan saudara Rismon Sianipar atas perbuatannya yang saya anggap itu merugikan saya karena mengatakan saya ini mendanai Roy Suryo dan kawan-kawan untuk soal ijazah Pak Jokowi," ungkapnya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu, 8 April 2025.

Nah, belum berlanjut proses pelaporan JK di Bareskrim Polri, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan Sekitarnya (Polda Metro Jaya), menerima laporan yang memosisikan JK sebagai terlapor. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dan sejumlah organisasi lainnya melaporkan Jusuf Kalla pada Minggu, 12 April 2026 sekitar pukul 20.45 WIB.

Pelapornya adalah Ketua Umum



Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sahat Martin Philip Sinurat. "Kami dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tadi datang melaporkan Bapak Jusuf Kalla. Kami hadir dari GAMKI, juga mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat yang sebelumnya pada jam 5 sore sudah berkumpul di Sekretariat GAMKI di Jalan Cirebon," kata dia dalam keterangan resmi.

JK dilaporkan karena dianggap telah menistakan ajaran Agama Kristen lewat ceramahnya yang bertajuk 'Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar'. Hadir sebagai salah satu pembicara 'Ramadan Public Lecture', JK berceramah sekitar 40 menit dan tayang melalui kanal YouTube resmi Masjid Kampus UGM.

Reaksi datang antara lain dari bekas Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. "Sepertinya Geng Solo mau coba-coba jualan SARA dengan menyerang Pak JK dengan memotong-motong ceramah," ujarnya lewat akun X, Selasa, 14 April 2026.

Said Didu juga mengingatkan agar isu suku, agama, ras, dan antargolongan tidak dijadikan alat politik yang berbahaya. "Sekadar mengingatkan, jangan coba-coba main api dengan SARA," tegasnya.

Ia bahkan menyebut sulit membantah adanya keterkaitan kelompok tersebut dalam polemik yang mencuat. Lebih jauh, Said Didu menyoroti latar belakang pihak pelapor yang disebut memiliki kedekatan dengan relawan pendukung Jokowi. "Pelapor Pak JK adalah pemimpin gerakan grassroot untuk dorong Jokowi 3 periode dan sekarang anak buah Kaesang sebagai pengurus inti PSI," ungkapnya.

Ketua Umum GAMKI yang melaporkan JK memang tercatat sebagai politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pada Januari 2026, ia ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) Sumatera Utara oleh DPP PSI. Sedangkan di akun Instagram Sahat MPSinurat, tampak jabatan Sahat sebagai Ketua DPP PSI bidang Ideologi Partai.

Mengenai pelaporan ke Polda Metro, Said Didu mengemukakan, pernyataan

Jusuf Kalla yang kini dipersoalkan sebenarnya sudah disampaikan sejak puluhan tahun lalu dan tidak pernah menjadi masalah.

Ia pun mempertanyakan mengapa isu tersebut kembali diangkat sekarang, terutama setelah Jusuf Kalla meminta mantan Presiden Jokowi menunjukkan ijazah asli. "Kenapa setelah Pak JK minta Jokowi tunjukkan ijazah asli, kok Geng Solo ngamuk?" ujarnya.

nah bercerita sudah lebih dari setahun dirinya tidak pernah berkomunikasi intens dengan Jokowi, dan hanya bertemu ketika ada acara. Ia mengaku pernah meminta waktu bertemu satu tahun lalu, tapi tidak kunjung diberikan kesempatan, sehingga kini ia tidak lagi meminta.

Menurut JK, saat itu ia ingin membuat janji bertemu untuk membicarakan Papua dan bukan soal politik. "Saya tidak tahu (alasan). Hanya sibuk sibuk,"



Dari rangkaian peristiwa dua pelaporan itu, masing-masing pendukung Jokowi maupun JK sudah kian menunjukkan bekas Presiden dan mantan Wapresnya, masih dan malah kian berseberangan. Sebelumnya, kerenggangan hubungan antara Jokowi dan JK dapat terlacak dalam rekam jejak bertahun-tahun.

Pada Januari 2024, misalnya, JK per-

katanya.

Sejak itu hubungan Jokowi-JK tampak kian merenggang dan terkesan menjadi dua tokoh elite yang saling berseberangan serta berdampak pula terhadap dinamika politik dalam negeri.

Sekarang, apakah pertemuan silaturahmi keduanya tetap relevan dan positif? Belum akan terjawab sekiranya tak ada pertemuan. ●



JELANG MUKTAMAR KE-35 NAHDLATUL ULAMA

Agenda Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama terjadwal pada Agustus 2026. Soal tempat dan tuan rumah muktamar masih menunggu musyawarah.

Sempat mengalami gesekan di lingkup elitnya pada November 2025, Nahdlatul Ulama kini tampak rukun dan menyiapkan agenda besar Muktamar ke-35. Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Miftachul Akhyar berharap pelaksanaan Muktamar ke-35 NU digelar pada 1-5 Agustus 2026.

Menurut Kiai Miftach, tanggal itu sesuai dengan siklus muktamar sebelumnya yang juga berlangsung pada Agustus. "Pelaksanaan Muktamar NU pada awal

Agustus tanggal 01-05 Agustus itu sudah siklus Muktamar, karena Muktamar sebelumnya di Jombang juga Agustus," ungkapnya saat menutup Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) PWNU Jawa Timur di Pesantren Sunan Bejagung 2, dikutip dari laman web resmi NU Online, Selasa, 14 April 2026.

Soal tempat, sambungnya, dapat dimusyawarahkan melalui rapat. "Apakah Surabaya atau Jakarta, bisa juga pesantren, apakah di Pesantren Walisongo, Situbondo asuhan KH Cholil Asad atau pesantren tuan guru di NTB yang juga sudah lama minta, ataukah di Sumbar yang didukung tiga provinsi," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Miftach mengkritisi NU saat ini yang belum melaksanakan salah satu amanat utama dalam pendirian organisasi itu atau Qonun Asasi NU. Menurutnya, NU saat ini belum melaksanakan amanat membasmi kemaksiatan dan menyejahterakan umat.

"Masalahnya, NU sekarang belum melaksanakan simbol yang dilambang-

kan tongkat Nabi Musa yang sakti dalam membasmi kemaksiatan dan menyejahterakan umat dengan mengais tanaman atau rezeki. Faktanya, warga NU yang mencapai 87 persen dari 95 persen Muslim Indonesia itu masih unggul ekonomi sekitar 30 persen," terangnya.

Saat pembukaan Muskerwil, Wakil Rais PWNU Jatim, KH Abdul Matin Djawahir, juga meminta untuk mengembalikan NU pada Qonun Asasi dan menegaskan kembali peran Syuriah sebagai pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. Dia menyampaikan pesan bahwa penentuan tempat dan tanggal muktamar seharusnya mengikuti keputusan Rais Aam PBNU.

Dia mengatakan jika diibaratkan pondok pesantren, maka Rais Aam adalah kiai dan Ketua Umum PBNU adalah pengurus pondok. Menurutnya, memasuki abad kedua NU, penting untuk mengembalikan ruh Qonun Asasi dan menempatkan Rais Aam sebagaimana posisi awalnya.

"Jangan sampai ada lembaga di atas

PBNU, apapun namanya. Tidak boleh ada yang lebih tinggi dari Rais Aam dan tidak boleh ada yang menghakimi Rais Aam. Supremasi Syuriah harus betul-betul kita perhatikan,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengonfirmasi Mukhtar NU bakal digelar Agustus tahun ini. Namun, Gus Ipul menyebut tanggal persis dan tempatnya masih dalam pembahasan.

“Sudah ditentukan kalau pelaksanaannya bulan Agustus, tapi tanggal dan tempatnya itu belum dibahas tapi diserahkan pada kesempatan pertama antara Rais Aam dan Ketua Umum untuk bisa melakukan pembicaraan terlebih dahulu,” kata Gus Ipul setelah menghadiri acara Halal Bihalal Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta Pusat, Minggu (12/4) dikutip dari detik.com.

Pada kesempatan itu dia menyebut panitia inti Mukhtar telah terbentuk, dimana dirinya yang menjabat sebagai ketua. Kemudian, ada Katib Am PBNU sebagai Steering Committee (SC), Mohammad Nuh sebagai sekretaris SC dan Amin Said Husni sebagai sekretaris Organizing Committee (OC).

“Kami berempat sedang berembuk untuk mengusulkan nama-nama melengkapi kepanitiaan yang insyaallah akan menyelenggarakan dua event sekaligus yang merupakan satu rangkaian: Munas Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama,” tuturnya.

Gus Ipul mengingatkan seluruh pengurus wilayah dan cabang untuk fokus dalam penyelenggaraan Mukhtar tersebut. Dirinya meminta pengurus wilayah jangan termakan isu yang tidak benar. “Saya ingin menyampaikan kepada khususnya pengurus wilayah dan cabang untuk bersabar mengikuti informasi yang resmi, jangan terbawa isu-isu yang tidak benar ya. Jadi semuanya sedang dalam proses dan semuanya berjalan dengan kondusif, berjalan dengan baik,” ungkap Gus Ipul yang saat ini menjabat Menteri Sosial di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama KH Yahya Cholil Staquf sowan ke pengurus Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo, Kediri KH. M. Anwar Mansyur. Video pertemuan keduanya

beredar di media sosial.

Dalam narasi video, disebutkan kedatangan Gus Yahya terkait penyampaian aspirasi permintaan Ponpes Lirboyo Kediri sebagai tuan rumah muktamar ke-35 NU. Sedangkan juru bicara sekaligus pengasuh Lirboyo, KH Oing Abdul Muid Shoib (Gus Muid) mengkonfirmasi kedatangan Gus Yahya.

Namun ia menegaskan belum ada permintaan resmi terkait penunjukan sebagai tuan rumah. “Sampai saat ini belum ada permintaan resmi, sehingga

benar-benar ditunjuk dan dipercayai, insyaallah kami siap melaksanakan amanah tersebut,” tegasnya.

Gus Muid menambahkan, Lirboyo bukan tanpa pengalaman dalam menggelar agenda besar NU. Pesantren ini pernah menjadi tuan rumah Mukhtar NU pada 1999 silam.

Selain itu, dari sisi sarana dan prasarana, kondisi Lirboyo saat ini dinilai lebih siap dibandingkan sebelumnya. “Secara pengalaman, kami pernah menjadi tuan rumah Mukhtar NU 1999. Dari sisi



kami juga belum membahasnya secara khusus di internal,” kata Gus Muid.

Meski demikian, lanjut Gus Muid, ia mengapresiasi berbagai pihak yang mengusulkan Ponpes Lirboyo Kediri menjadi tuan rumah Mukhtar ke-35 NU. Ponpes Lirboyo pun siap jika nantinya jadi ditunjuk.

“Melihat besarnya kecintaan para masyarakat Lirboyo terhadap Jam’iyah Nahdlatul Ulama, apabila nantinya

fasilitas juga alhamdulillah saat ini relatif lebih memadai,” imbuhnya.

Meski demikian, keputusan resmi terkait lokasi penyelenggaraan Mukhtar NU ke-35 masih menunggu hasil Konferensi Besar (Konbes) NU yang dijadwalkan berlangsung pada April. “Keputusan resminya tentu kita menunggu hasil Konbes NU yang menurut informasi akan dilaksanakan bulan April ini,” ujarnya. ●

TETAP MENAUNGI PENCAK SILAT

“Saya siap terus, akan terus mendukung, dengan jabatan ataupun tidak dengan jabatan. Seorang pendekar adalah sampai nafas dia terakhir, dia pendekar.” (Prabowo Subianto).

Sekitar 1,5 tahun menjadi Kepala Negara yang berkantor di Istana, Presiden Prabowo melepas jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI). Toh ia menegaskan komitmennya tetap mendukung IPSI dan perkembangan pencak silat Indonesia.

Di dunia persilatan, pendekar memang melekat sepanjang hayat. Secara harfiah, pendekar (atau pandeka dalam bahasa Minangkabau) merujuk pada seseorang yang memiliki kemahiran tinggi dalam seni bela diri. Namun, makna filosofisnya tentu saja jauh lebih dalam dari sekadar mahir berkelahi atau menguasai jurus-jurus baku perguruanannya.

Seorang pendekar pencak silat seharusnya sosok yang gagah be-

Dengan pemahaman seperti itu, maka Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak akan melanjutkan jabatannya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) dalam Musyawarah Nasional XVI IPSI Masa Bakti 2026–2030 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada Sabtu, 11 April 2026.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil seiring dengan tanggung jawab besar yang kini diembannya sebagai kepala negara. Ia menilai peran sebagai Presiden membutuhkan fokus penuh sehingga tidak memungkinkan dirinya untuk menjalankan tugas secara optimal di IPSI.

“Alhamdulillah hari ini saya menyatakan bahwa saya mohon izin untuk tidak



rani menggunakan keahliannya untuk membela orang yang lemah, tertindas, dan menegakkan keadilan. Pendekar melambangkan pula kemampuan seseorang dalam mengontrol hawa nafsu dan emosi, bukan sekadar menaklukkan lawan secara fisik. Karena itu, idealnya seorang pendekar sanggup menjadi teladan dalam mewujudkan ketenteraman dan keamanan di lingkungannya.

lanjutkan sebagai Ketua Umum PB IPSI karena saya sudah mengemban tugas kebangsaan yang menyita waktu saya sehingga tidak mungkin saya efektif sebagai Ketua Umum PB IPSI,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo juga mengemukakan, sudah mengabdikan diri di dunia pencak silat selama kurang lebih 34 tahun, baik sebagai Wakil Ketua Umum

maupun Ketua Umum PB IPSI. Ia mengaku bangga dapat menjadi bagian dari perjalanan panjang organisasi tersebut dalam membina dan mengembangkan pencak silat di tingkat nasional maupun internasional.

Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo juga mendorong IPSI menyiapkan regenerasi kepemimpinan yang kuat dan visioner. Ia meyakini bahwa organisasi ini memiliki kader terbaik yang mampu melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan serta membawa pencak silat semakin maju di masa depan. "Saya yakin generasi penerus yang pantas untuk meneruskan tongkat kepemimpinan di IPSI dan pasti saya akan dukung PB IPSI ke depan," ucap Presiden.

Presiden pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar IPSI atas dukungan dan kebersamaan selama masa kepemimpinannya. Kepala Negara berharap IPSI

paui aspek fisik sebagai olahraga atau seni bela diri.

"Pencak silat ya olahraga. Pencak silat olahraga, pencak silat seni bela diri, ya benar. Pencak silat, tapi lebih dari itu, pencak silat mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia," ujarnya.

Kekuatan sejati dalam pencak silat, kata Presiden Prabowo, tidak hanya terletak pada kemampuan fisik, tetapi pada kedalaman ilmu yang diiringi dengan kerendahan hati. Nilai-nilai kesatria yang diajarkan dalam pencak silat dimulai dari keberanian, keberanian yang digunakan untuk melindungi, bukan untuk kesombongan atau penyalahgunaan kekuatan.

"Hampir semua perguruan di pencak silat dan saya kira di semua bela diri dunia yang saya ikuti dan semua guru mengajarkan ilmu ini adalah untuk membela diri, membela keluargamu, membela sesama, membela masyarakatmu, membela bangsamu," lanjutnya.

mengingatkan bahwa bangsa Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan dari kekuatan asing selama ratusan tahun. Pada situasi tersebut, pencak silat menjadi bagian dari semangat perlawanan bangsa dengan terus dilestarikan walaupun sempat dilarang pada masa penjajahan.

"Waktu itu pencak silat dilarang. Tidak boleh belajar pencak silat. Akhirnya pencak silat dilatih malam-malam oleh guru-guru kita. Malam-malam di bukit-bukit, di gunung-gunung, di surau-surau," kata Presiden.

Penegasan Presiden Prabowo tersebut memperkuat posisi pencak silat sebagai warisan budaya yang hidup, yang tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga menjadi instrumen pembentukan karakter, persatuan, dan ketahanan nasional di tengah dinamika global.

Lantas bagaimana perjalanan IPSI sepeninggal Prabowo sebagai ketua



terus menjadi garda terdepan dalam membina karakter bangsa sekaligus mengharumkan nama Indonesia di kancah global.

Menurut dia, pencak silat merupakan kekuatan fundamental bangsa yang tidak hanya membentuk ketangguhan fisik, tetapi juga karakter dan jati diri nasional. Menurut Kepala Negara, pencak silat memiliki dimensi yang jauh melam-

Presiden pun menilai pembinaan pencak silat memiliki kontribusi langsung dalam menciptakan masyarakat yang tangguh dan stabil. "Kalau tiap dukuh, kalau tiap desa, kalau tiap kecamatan, masyarakatnya kuat, masyarakatnya baik, masyarakatnya stabil, masyarakatnya tenang, bangsa ini kuat," tambahnya.

Dalam perspektif sejarah, Presiden

umum? Munas XVI IPSI ternyata memilih Menteri Luar Negeri Sugiono sebagai Ketua Umum PB IPSI periode 2026-2030. Pas belaka dengan kehendak membina dan mengembangkan pencak silat di tingkat nasional maupun internasional semisal tampil di Olimpiade. Melalui diplomasi budaya misalnya, sekaligus menaungi pencak silat masih di lingkaran dalam Istana. ●

CENDERA MATA DAN HASIL KUNJUNGAN KE RUSIA

Apa saja hasil kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia? Bukan sekadar bertukar cendera mata tentu saja.

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia pada pertengahan April 2026 berakhir dengan momen keakraban dan pertukaran cendera mata. Usai pertemuan intensif dan produktif, kedua pemimpin tampak berbincang santai sebelum berpisah.

Kedekatan pribadi sekaligus hubungan diplomatik yang kian erat tercermin dari momen-momen menjelang perpisahan kedua kepala negara itu. Presiden Putin bahkan mengantar langsung Presiden Prabowo hingga ke kendaraan resminya di halaman Istana Kremlin. Gestur ini menjadi simbol penghormatan sekaligus persahabatan antara kedua negara.

Sebelum berpamitan, keduanya saling bertukar cinderamata sebagai bentuk kenang-kenangan atas pertemuan tersebut. Tradisi ini juga mencerminkan nilai diplomasi yang sarat mak-

na budaya.

Putin memberikan samovar, alat tradisional Rusia yang biasa digunakan untuk merebus air dan menyajikan teh. Pemberian ini mencerminkan kekayaan tradisi Rusia yang telah dikenal luas.

Sedangkan Presiden Prabowo menyerahkan vas bermotif batik serta miniatur Candi Borobudur kepada Putin. Cinderamata tersebut menjadi simbol kekayaan budaya dan warisan peradaban Indonesia.

"Ini dari Indonesia khusus, vas. Ini juga miniatur Borobudur," ujar Presiden Prabowo.

Putin menyambut pemberian tersebut dengan penuh apresiasi dan rasa terima kasih. "Terima kasih banyak Yang Mulia," ujar Putin.

Pertukaran cinderamata ini menjadi simbol kuat persahabatan kedua negara yang terus terjalin. Hal tersebut juga menegaskan komitmen untuk mem-



perkuat hubungan bilateral Indonesia dan Rusia ke depan.

Terlebih lagi, dalam pertemuan empat mata selama tiga jam antara Presiden Prabowo dan Presiden Putin di Moskow, Rusia, pada Senin, 13 April 2026, tercapai kesepakatan meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dan energi. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan pertemuan diawali dua jam secara bilateral, dilanjutkan dengan tiga jam pertemuan empat mata antara kedua pemimpin.

Pada pertemuan itu, kedua negara menyepakati sejumlah poin penting kerja sama strategis, khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral yang menjadi prioritas jangka panjang kedua negara. "Disepakati beberapa poin, antara lain kerja sama di sektor ESDM jangka panjang, termasuk ketahanan energi migas dan hilirisasi," kata Teddy Selasa, 14 April 2026.

Selain sektor energi, Teddy menyebut kedua negara juga menegaskan komitmen untuk melanjutkan dan memperluas kerja sama di berbagai bidang lainnya yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap pembangunan nasional. Kelanjutan kerja sama itu di bidang riset hingga investasi.

"Keberlanjutan beberapa kerja sama di bidang pendidikan riset teknologi, bidang pertanian, dan bidang investasi di berbagai sektor terutama pembangunan industri di Indonesia," ucapnya.

Lebih lanjut, Teddy menekankan bahwa Rusia memiliki posisi yang sangat strategis dalam percaturan global, sehingga kemitraan dengan Indonesia menjadi semakin relevan dan penting.

"Kita ketahui bahwa posisi Rusia sangat strategis di dunia global, selain sebagai salah satu negara pemegang hak veto PBB dan pendiri BRICS," ujarnya.

Menurut Teddy, Rusia juga merupakan salah satu kekuatan besar dunia dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, yang dapat menjadi mitra penting bagi Indonesia dalam mendorong pembangunan jangka panjang.

"Rusia merupakan salah satu kekuatan besar dunia yang mempunyai sumber daya alam terbesar di dunia," katanya.

Teddy menjelaskan bahwa pertemuan ini juga menunjukkan intensitas hubungan bilateral yang semakin erat

antara kedua pemimpin dalam satu tahun terakhir. Prabowo sudah bertemu 5 kali dalam setahun ke belakang di berbagai kesempatan.

"Presiden Prabowo dan Presiden Putin tercatat terakhir kali bertemu pada bulan Desember lalu di Moskow dan sudah lima kali bertemu di berbagai kesempatan dalam satu tahun terakhir," ungkapnya.

Sedangkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia bakal mendapatkan jatah minyak mentah dan LPG

rubesneft, dan Lukoil. "Alhamdulillah apa yang sudah menjadi kesepakatan itu, kita mendapatkan hasil yang cukup baik dimana kita bisa mendapatkan cadangan crude kita untuk kita nambah. Di samping itu juga kita akan bisa mendapatkan LPG," ujar Bahlil, Selasa, 14 April 2026.

Menteri Energi Tsivilyov mengungkapkan kedua negara selanjutnya segera menyusun teknis sistem kerja sama dengan pengaturan permanen. "Kami sekarang sedang bekerja serius untuk menyusun kontrak jangka panjang den-



dari Rusia. Kesepakatan ini dilakukan dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Moskow. Bahlil yang ikut mendampingi Presiden dalam kunjungan ini langsung melakukan pertemuan dengan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev pada Selasa (14/4), untuk menindaklanjuti kesepakatan Prabowo dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin sehari sebelumnya.

Pertemuan itu turut dihadiri perwakilan sejumlah perusahaan energi Rusia, antara lain Rosneft, Ruschem, Zah-

gan harga yang saling menguntungkan," kata Tsivilyov, dikutip Selasa, 14 April 2026.

Bahlil menilai hasil pertemuan itu memberi sinyal positif bagi penguatan ketahanan energi nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu. Menurut dia, kemitraan dengan Rusia dapat menjadi salah satu opsi penting, mengingat kapasitas produksi energi negara tersebut yang besar serta pengalamannya dalam industri minyak dan gas. ●



MENYIMAK KEMUNGKINAN RESHUFFLE KABINET

Jelang melewati perjalanan 1,5 tahun (18 bulan) pada 20 April 2026, wacana perombakan (reshuffle) kabinet) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka muncul kembali. Rumor tahunan atau semesteran?

Sekadar catatan, sepanjang 2025 hingga Februari 2026 saja tercatat empat reshuffle kabinet hingga muncul lagi wacana reshuffle pada April 2026. Presiden Prabowo pertama kali melakukan reshuffle menteri pada Rabu, 19 Februari 2025 atau hari ke-122 sejak dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2025. Pada reshuffle pertama ini, Brian Yuliarto menggantikan Sastryo Soemantri Brodjonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek).

Pada reshuffle kedua, Senin, 8 September 2025, perombakan meliputi empat menteri dan satu wakil menteri. Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan. Sedangkan Mukhtarudin menggantikan Abdul Kadir Karding di posisi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI. Selanjutnya, Ferry Juliantono menduduki jabatan Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiyadi.

Presiden Prabowo juga melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Pelantikan ini seiring dengan perubahan nomenklatur Badan Haji dan Umrah menjadi kementerian.

Masih di reshuffle jilid kedua, Presiden Prabowo memberhentikan Budi Gunawan dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Namun, posisi Menko Polkam belum diisi oleh pejabat baru, hanya Menko Polkam ad interim yang dijabat Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Nah, beberapa hari kemudian, pada Rabu, 17 September 2025, berlangsung reshuffle ketiga. Presiden Prabowo melantik Letnan Jenderal TNI (Purn) Djamarie Chaniago sebagai Menko Polkam. Selain itu, Presiden Prabowo menggeser Erick Thohir dari jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke posisi Menteri Pemuda

dan Olahraga (Menpora) menggantikan Dito Ariotedjo.

Tambahan pula, pada reshuffle kali ini, Presiden melantik tiga wakil menteri, kepala badan, serta wakil kepala badan. Afriansyah Noor menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan menggantikan Immanuel Ebenezer, Rohmat Marzuki mengisi posisi Wakil Menteri Kehutanan menggantikan Sulaiman Umar, Farida Fariha menjabat Wakil Menteri Koperasi menggantikan Ferry Juliantono.



Selanjutnya, Presiden melantik Angga Raka Prabowo menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah; Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan; dan Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.

Prabowo juga menambah dua posisi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yakni Nanik Sudaryati Deyang dan Sony Sanjaya. Sedangkan Sarah Sadiqa menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Perombakan kabinet terjadi lagi pada Rabu, 8 Oktober 2025. Namun, tanpa pergantian menteri atau wakil menteri. Presiden Prabowo hanya menambah dua jabatan wakil menteri di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan. Ahmad Wiyagus menjadi Wamendagri dan Benyamin Paulus Octavianus menjadi Wamenkes.

Beriringan dengan itu, Prabowo juga melantik Dony Oskaria dilantik sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN serta Aminudin Ma'ruf dan Teddy Barata menjadi Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN. Tambahan pula, Prabowo melantik enam keanggotaan Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan. Anggito Abimanyu (ketua), Farid Azhar Nasution (wakil ketua), Doddy Zulverdi, Ferdinan Dwikoraja Purba, Suminto, dan Aida S Budiman.

Prabowo juga melantik 10 jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang diketuai oleh Velix Vernando Wanggai. Selain Velix, 9 anggota lainnya yaitu John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yani, John Gluba Gebze, dan John-son Estrella Sihasale atau Ari Sihasale.

Selain itu Prabowo juga melantik dua Asisten Khusus Presiden yakni Dirgayuza

keuangan karena terjadi alih tugas pejabat ke Bank Indonesia. Presiden melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan menggantikan Thomas Djiwandono yang beralih tugas setelah terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Sedangkan Juda Agung sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur BI, sehingga tampak seperti pertukaran posisi antara kementerian dan bank sentral.

Nah, bagaimana dengan rumor reshuffle kabinet yang muncul lagi menjelang 1,5 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran? Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya hanya berkomen-



Setiawan sebagai asisten di bidang komunikasi dan analisis kebijakan, dan Agung Gumilar Saputra sebagai asisten bidang analisis data strategis.

Sebagai catatan tambahan, pada Senin, 10 November 2025, Presiden Prabowo melantik pejabat tingkat kepala lembaga. Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria dilantik menjadi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggantikan Laksana Tri Handoko. Bersamaan dengan Arif, Prabowo juga melantik Amarulla Octavian sebagai Wakil Kepala BRIN.

Namun, pelantikan ini tak mencakup menteri atau wakil menteri sehingga dianggap bukan bagian dari reshuffle.

Reshuffle berikutnya baru terjadi lagi pada Kamis, 5 Februari 2026. Kali ini bersifat terbatas dan terfokus pada pengisian posisi strategis di sektor

tar singkat.

"Tunggu aja," kata Teddy di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 7 April 2026. "Nanti Bapak Presiden akan menceritakan," sambungnya.

Toh keesokan harinya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengemukakan, belum ada tanda-tanda reshuffle Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. "Belum ada," kata Pras di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 8 April 2026.

Toh Mensesneg Pras menegaskan Presiden Prabowo senantiasa melakukan evaluasi kinerja bawahannya. "Tapi bukan berarti kemudian langsung dimaknai bahwa setiap evaluasi itu akan selalu kemudian berujung dengan terjadinya pergantian atau reshuffle. Tidak seperti itu juga," ujarnya. ●

DINAMIKA POLITIK PASCA IDUL FITRI

Dinamika politik bukanlah rangkaian peristiwa yang berdiri sendiri terpisah satu sama lain, melainkan saling terkait dan kian rumit karena urusan ekonomi, hukum, bahkan cuaca ikut mempengaruhi.

Hari ke-100 pada 2026 sudah lewat. Hingga hari terakhir tahun ini, dinamika politik akan berlanjut dan boleh jadi akan tetap bergemuruh. Secara sederhana, faktor internal domestik (dalam negeri) dan dinamika global akan saling mempengaruhi.

Maka sejak perundingan nuklir AS-Iran di Jenewa, Swiss, pada pertengahan Februari 2026 menemui jalan buntu, situasi Timur Tengah kian memanas. Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap target-target strategis di Iran pada 26 Februari 2026. Puncak eskalasi terjadi melalui serangan udara gabungan berskala besar oleh AS (Operasi Epic Fury) dan Israel (Operasi Roaring Lion).

Iran mulai membalas sejak 1 Maret 2026 dengan meluncurkan Operation Truthful Promise 4, sebuah serangan balasan besar-besaran menggunakan rudal dan drone ke Israel serta pangka-

banyak entitas negara-bangsa. Indonesia bukan perkecualian

Di dalam negeri, tampak jelas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berupaya keras mengamankan pasok energi migas di dalam negeri. Langkah terbaru, Presiden Prabowo terbang ke Moskow, Federasi Rusia, pada Minggu malam, 12 April 2026.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Kepala Negara bertolak menuju Moskow untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. "Jelang tengah malam di hari Minggu ini, 12 April 2026, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Moskow, Rusia," ujar Teddy.

Dalam kunjungan kali ini, yang mendampingi Prabowo antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahilil Lahadalia, serta Seskab Teddy. Teddy mengemukakan, agenda kunjungan Prabowo antara lain membahas sejumlah isu dengan Presiden Vladimir Putin, termasuk terkait kerja sama penguatan ketahanan energi. "Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah Rusia dan memastikan pasokan energi nasional yang stabil, termasuk ketersediaan minyak," kata Teddy.

Nah, kunjungan Prabowo ke Moskow meninggalkan sementara dinamika politik dalam negeri yang mulai meningkat intensitasnya sejak usainya Hari Raya Idul Fitri 1447 hijriyah pada minggu ketiga Maret 2026. Sebut saja misalnya halalbihalal di Beranda Utan Kayu pada Selasa, 31 Maret 2026 dengan figur utamanya Profesor Saiful Mujani, guru besar ilmu politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, juga pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Selain itu, berbagai peristiwa dan wacana seperti isu perombakan (reshuffle) kabinet, Partai Nasional Demokrat yang diwacanakan akan berfusi dengan Partai Gerindra, serta ungkapan Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo yang juga adik presiden prabowo mengenai upaya dari



lan militer AS di kawasan Teluk. Selanjutnya, pada 2 Maret 2026, Iran secara resmi menyatakan penutupan Selat Hormuz. Langkah ini dilakukan sebagai respons langsung terhadap serangan udara besar-besaran yang diluncurkan oleh Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari. Sejak itu dinamika politik global menghadapi gangguan pasok minyak dan gas dan dampak ekonominya yang mulai mengganggu stabilitas

sejumlah tokoh untuk mengguncang dan mengganggu stabilitas nasional, bahkan kudeta, di tengah berbagai program pemerintah yang tengah berjalan.

“Saya hitung satu tahun lima bulan sudah ada yang ingin menggulingkan dia, sudah ada yang mau kudeta dia, mau menggantikan dia secara inkonstitusional,” ujar Hashim saat menyampaikan sambutan dalam perayaan Paskah Nasional 2026 di Manado, Sulawesi Utara, Rabu, 8 April 2026.

Menyikapi ucapan Hashim Djojohadikusumo, pengamat politik Ubedilah Badrun mengemukakan Hashim keliru dalam memahami kritik dari para pengamat terhadap Kepala Negara. Ubedilah menyatakan Prabowo bersama lingkaran elite tidak matang dalam menanggapi kritik terhadap pemerintah dengan memunculkan tuduhan makar serta kudeta. “Tampaknya mereka gagal memahami perbedaan antara kritik, makar, dan kudeta,” ungkap aktivis prodemokrasi itu.

Sedangkan pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengemukakan kemungkinan kudeta terhadap Prabowo relatif kecil. “Melihat kondisi politik dan ekonomi saat ini kiranya kecil kemungkinan akan ada kudeta terhadap Prabowo,” kata Ritonga, Jumat, 10 April 2026.

Toh Presiden Prabowo Subianto pernah melontarkan peringatan keras terhadap praktik korupsi yang dinilai tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi menjadi ancaman serius bagi stabilitas pemerintahan. “Semakin kita tegas, semakin kita akan dilawan dan diserang. Mereka akan menggunakan segala cara, termasuk uang yang mereka curi untuk membiayai gerakan-gerakan,” ujar Prabowo dalam acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan dan aset negara senilai Rp11,4 triliun antara lain dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam memulihkan aset negara dari denda administratif sektor kehutanan dan tindak pidana korupsi di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, pada hari Jumat, 10 April 2026.

Bagaimana dengan kemungkinan

reshuffle kabinet? Dari Partai Golkar, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Sarmuji meyakini tak ada kadernya yang dicopot menyusul wacana reshuffle atau perombakan kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia pun memastikan tak ada pembicaraan internal di partai soal wacana reshuffle. Sarmuji mengatakan Golkar menyerahkan wacana reshuffle kepada Presiden.

“Kami yakin mudah-mudahan eng-



gak ada yang di-reshuffle dari Partai Golkar, Jadi kami tidak menyiapkan calon,” ujar Sarmuji usai acara halal bihalal Partai Golkar, Rabu malam, 8 April 2026.

Sedangkan mengenai fusi Partai Nasdem, Wakil Ketua Umum Nasdem Saan Mustopa mengaku kaget dan baru mengetahui wacana fusi Nasdem Gerindra. “Ini juga saya baru (tahu), kaget juga ya, baru apa, mencuat terkait

dengan soal isu fusi ya. Bahkan dalam bahasa politik itu kan fusi ya, bukan merger bukan akuisisi ya,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 April 2026.

Saan menjelaskan bahwa konsep fusi partai bukan hal baru dalam politik Indonesia. Ia menyinggung peristiwa pada 1973, ketika sejumlah partai politik dilebur menjadi tiga kekuatan besar. Menurut dia, sejumlah aspek penting

perlu diperhatikan jika wacana fusi benar-benar ingin diwujudkan, termasuk ideologi dan identitas masing-masing partai.

Toh masih banyak pertanyaan belum terjawab. Mungkin menunggu Presiden Prabowo kembali ke Tanah Air. Yang lebih penting lagi, isu atau rumor bahkan stabilitas politik akan lebih pasti jika situasi perekonomian membaik. ●

ANCANG-ANCANG 2029

Dinamika politik pasca Idul Fitri 1447 akan berimplikasi pada pemilihan politik mendatang: Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2029. Karena dinamika politik adalah rangkaian yang berujung di dua momentum itu.

Seperti drama, rangkaian dinamika politik itu memicu berbagai kejutan. Halalbihalal di Beranda Utan Kayu, rumor mengenai reshuffle kabinet, wacana kudeta, maupun kemungkinan fusi atau peleburan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) masing-masing memiliki kejujannya sendiri-sendiri.

Soal fusi Partai NasDem, misalnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Saan Mustopa mengaku terkejut. "Ini juga saya baru (dengar), kaget juga, ya, mencuat terkait dengan soal isu fusi. Dalam bahasa politik itu kan fusi, ya, bukan merger. Bukan akuisisi, melainkan fusi, Gerindra-NasDem," kata Saan, Senin, 13 April 2026.

Toh Saan menegaskan belum ada pembicaraan khusus di internal Partai NasDem terkait wacana fusi tersebut. "Karena sekarang masih fokus konsolidasi internal," kata politisi yang pernah berkiper di Partai Demokrat itu.

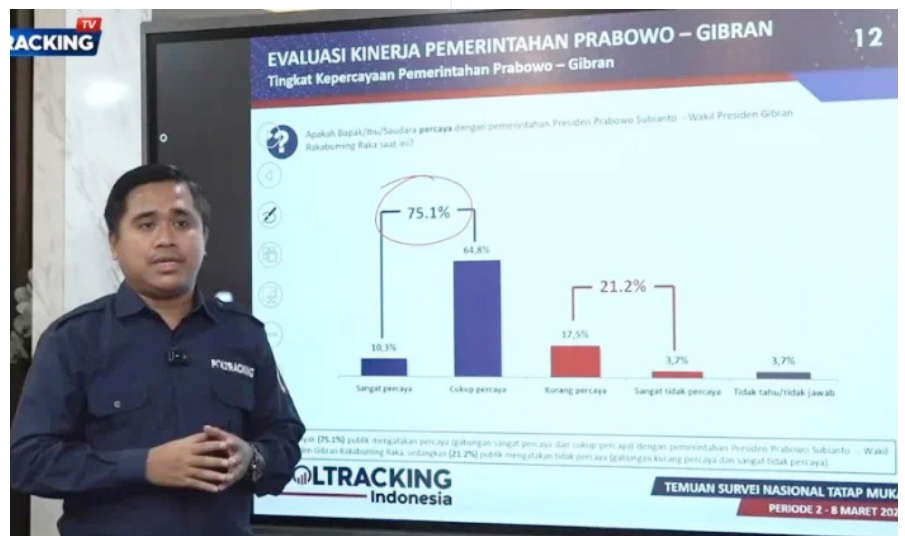
Begitu pula soal reshuffle kabinet. Kejutannya antara lain parlemen yang tampak vokal mengemukakan kritik terhadap sejumlah menteri dan kepala badan setingkat menteri pada Rapat Kerja di awal April 2026. Sebut saja misalnya kritik terhadap Menteri Pariwisata, Kepala Badan Gizi Nasional, Menteri Tenaga Kerja, juga Menteri Kehutanan. Tambahan pula tanggapan terhadap

kemungkinan kudeta terhadap Presiden Prabowo yang dapat dikaitkan dengan wacana dalam halalbihalal di Beranda Utan Kayu. Peristiwa lanjutannya adalah focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan Forum Intelektual Antardisiplin (FIAD) di kampus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, Senin, 13 April 2026.

Beriringan dengan rangkaian peris-

ujar peneliti utama Poltracking Masduri Amrawi dalam jumpa pers virtual, Senin, 13 April 2026.

Sedangkan Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengumumkan hasil survei yang menunjukkan mayoritas warga lebih memilih Presiden RI bekerja memenuhi janji kampanye ketimbang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang ditetapkan MPR. "Sekitar 63,3 pers-



tiwa itu, Hasil survei Poltracking Indonesia pada 2-8 Maret 2026 menunjukkan bahwa 75,1 persen publik percaya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "Berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, jadi 75,1 persen publik di Indonesia percaya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran,"

en lebih setuju dengan pendapat presiden bekerja sesuai dengan janji-janjinya pada masa kampanye pilpres dan harus bertanggung jawab kepada rakyat," ungkap paparan hasil survei, Minggu, 12 April 2024.

Nah, sebelum 2029 tiba, rangkaian dinamika politik termasuk jajak pendapat melalui survei masih akan berlangsung. Termasuk kejujannya. ●

info indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI



INFO PASANG IKLAN
NUR AISAH
0815-1157-6312

IKLAN BACK COVER
RP 75.000.000
 IKLAN DISPLAY/HAL
RP 50.000.000
 IKLAN ADVERTORIAL/HAL
RP 65.000.000
 CENTER SPREAD
RP 80.000.000

*Kami Hadir
 Memberikan
 info Tersebut*

- ▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**
- ▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**
- ▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**
- ▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON UNTUK PARA PELANGGAN**



iNOVASI UNTUK NEGERI
nfo indonesia

EDISI # 66 APRIL 2026

<https://www.infoindonesia.id>



JOKOWI VERSUS JUSUF KALLA

••• KEMENDAGRI
TERSEOK SEOK
URUS BENCANA

••• SETELAH DESA KOPERASI
KINI KEMENDES BENTUK
DESA ZAKAT

••• KEMENAKER
PASTIKAN LAPANGAN
KERJA MASIH ADA